

382.5
TUM
C e.1



**CAMPUR TANGAN PIHAK KETIGA TERHADAP DOKUMEN
PEMBAYARAN PERDAGANGAN EKSPORT – IMPORT
(LETTER OF CREDIT) DI INDONESIA**

TESIS

Disusun dalam rangka memenuhi
Persyaratan Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

TOTOK TUMANGKAR, SH

NIM. B4A 097068

Pembimbing

Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, SH

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2000

**CAMPUR TANGAN PIHAK KETIGA TERHADAP DOKUMEN
PEMBAYARAN PERDAGANGAN EKSPORT – IMPORT
(LETTER OF CREDIT) DI INDONESIA**

Disusun Oleh :

TOTOK TUMANGKAR, SH

NIM. B4A 097068

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 7 September 2000

Tesis ini telah diterima sebagai Persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

Pembimbing


Mengetahui

Ketua Program Magister
Ilmu Hukum


Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, SH

NIP. 130.368.053




Prof. DR. Barda Nawawi Arief, SH

NIP. 130.350.519

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan rasa syukur dan segala puji kehadiran Allah SWT, karena berkat karunia dan hidayah Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis dihadapkan pada berbagai kemudahan maupun kendala yang lebih memberikan makna pada tesis ini. Tidak sekedar pemenuhan tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh derajat Magister Ilmu Hukum namun lebih kepada suatu proses yang memperluas wawasan, memperkaya batin dan menambah bekal penulis dalam menghadapi masa depan. Proses ini tentunya tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Atas segala dukungan tersebut, rasa terima kasih setulusnya penulis sampaikan kepada :

1. Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Prof. DR. Barda Nawawi Arief, SH., beserta seluruh staf akademik maupun non akademik atas segala bekal ilmu pengetahuan maupun segala bantuan yang memperlancar proses pencapaian derajat Magister Ilmu Hukum penulis.
2. Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, SH., pembimbing dalam penyusunan tesis ini, atas segala kesabaran, sikap penerimaan, penghargaan dan disiplin serta bimbingan dalam proses penyusunan tesis maupun selama proses studi sehingga penulis terdorong untuk belajar lebih banyak, lebih menghargai diri dan lebih menghargai waktu.

3. Bapak Agung Prabowo, SH., selaku pimpinan PT Bank Niaga Cabang Semarang atas kesediaan meluangkan waktu untuk menjadi nara sumber/responden dalam penelitian ini.
4. Bapak Drs. Tim Hadi Dhanuwijaya Direktur PT ALKA Semarang, atas kesediaannya sebagai responden dalam penelitian ini. Kebersamaan dengan anda menjadikan penulis memahami akan masalah ekspor-impor atau letter of credit.
5. Ny. Dewi Permanawati, Arnando, Radityo dan Ny. Budi Sunarjo, adalah istri anak dan kakak tercinta yang dengan sabar mengikuti dan mendorong perjalanan studi penulis, membantu menyediakan sarana studi yang amat sangat memadai, dan menerima segala kegagalan maupun kesuksesan penulis dengan penuh cinta kasih dan do'a penulis panjatkan kepada almarhum Orangtua dan Kakak yaitu Almarhum Bapak Soeheri, Ibu Saryatun dan Bapak Budi Sunarjo dan merakalah penulis persembahkan semua yang telah dan akan penulis raih.

Semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan yang telah penulis terima semoga karya sederhana ini memiliki arti tersendiri dalam membalas kebaikan tersebut.

Semarang, Agustus 2000

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAKSI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	8
C. Kerangka Pikir	9
D. Tujuan Penelitian	19
E. Kegunaan Penelitian	20
F. Metode Penelitian	21
1. Metode Pendekatan	21
2. Spesifikasi Penelitian	22
3. Metode Penentuan Sampel	22
4. Metode Pengumpulan Data	23
5. Metode Analisis Data	25
G. Sistematika Penelitian	26
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Perdagangan Ekspor – Impor	28
1. Latar Belakang Perdagangan Ekspor – Impor	28
2. Pengertian dan Pengaturan Perdagangan Ekspor – Impor.	31
3. Para Pihak Dalam Perdagangan Ekspor – Impor	33
3.1. Kelompok Indentor	34
3.2. Kelompok Importir	35
3.3. Kelompok Promosi	36
3.4. Kelompok Eksportir	38

3.5. Kelompok Pendukung	40
4. Jenis-Jenis Dokumen dan Fungsi Dokumen Dalam	43
Perdagangan Ekspor – Impor	
4.1. Dokumen Induk	43
4.2. Dokumen Penunjang	46
4.3. Dokumen Pembantu	49
5. Cara Pembayaran Dalam Perdagangan Ekspor-Impor	51
6. Fungsi Dokumen Dalam Perdagangan Ekspor-Impor	57
6.1. Comercial Invoice	58
6.2. Transport Document	58
6.3. Draft (Wesel)	59
6.4. Insurance Document (Dokumen Asuransi)	60
6.5. Other Documents	63
B. Tinjauan Umum Letter of Credit	63
1. Sejarah Perkembangan Letter of Credit	63
2. Pengertian Letter of Credit	68
3. Pengaturan Letter of Credit	72
4. Pihak-pihak Dalam Letter of Credit	74
5. Bentuk dan Jenis Letter of Credit	75
5.1. Dilihat dari Bentuknya	75
5.1.1. Revocable Letter of Credit	75
5.1.2. Irrevocable Letter of Credit	76
5.1.3. Irrevocable and Contirecd Letter of Credit	76
5.2. Dilihat Dari Segi yang mengeluarkan L/C	77
5.2.1. Banker's L/C	77
5.2.2. Merchant L/C	77
5.3. Dilihat dari segi syarat-syaratnya	77
5.3.1. Documentary Letter of Credit	77
5.3.2. Oplen/Clean Letter of Credit	78
5.4. Dilihat dari cara poin pembayarannya	79
5.4.1. Sight Letter of Credit	79

5.4.2. Usance L/C	79
5.5. Dilihat dari segi perjanjiannya	80
5.5.1. Restricted/Straight Letter of Credit	80
5.5.2. General Letter of Credit	80
6. Proses Pembukaan Letter of Credit	81
7. Dokument-dokument Letter of Credit	84
C. Fungsi Bank Dalam Pembukaan Letter of Credit	86
1. Pengertian Bank	88
2. Dasar Hukum Perbankan Indonesia	88
3. Fungsi dan Tujuan Bank	88
4. Kedudukan Bank Devisa dalam lalu lintas Letter of Credit ...	89
 BAB III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	95
A. Hasil Penelitian	95
1. Deskripsi L/C Sebagai Cara Pembayaran Perdagangan Luar Negeri	95
2. Campur Tangan Pihak Ketiga Terhadap Dokumen Pembayaran Perdagangan Eksport-Import (Letter of Credit) di Indonesia dan Pengamanannya	98
2.1. Proses Pembukaan Letter of Credit L/C Dalam Transaksi Eksport-Import	98
2.2. Campur Tangan Bank dan Lembaga Instansi Terkait Terhadap L/C Dalam Perdagangan Eksport-Import	108
3. Hubungan hukum para pihak yang terkait dalam pembukaan dokumen pembayaran perdagangan Eksport-Import (Letter of Credit)	114
3.1. Hubungan Hukum Importir dengan Eksportir	115
3.2. Hubungan hukum antara Importir dengan Bank	117
3.3. Hubungan Hukum Eksportir Dengan Bank	117
4. L/C Sebagai Sarana Penunjang Kelancaran Perdagangan Eksport-Import	119

4.1. Manfaat L/C Dalam Perdagangan Eksport-Import	119
4.2. Hambatan-Hambatan Pengguna L/C Dalam Perdagangan Eksport-Import	120
B. Analisis Hasil Penelitian	121
1. Campur Tangan Pihak Ketiga Terhadap Dokumen	121
1.1. Proses Pembukaan Letter of Credit (L/C) Dalam Transaksi Perdagangan Eksport-Import	121
1.2. Campur tangan Bank dan Lembaga/Instansi terkait terhadap L/C Dalam Perdagangan Eksport-Import	132
2. Hubungan hukum para pihak yang terkait dalam pembukaan dokumen pembayaran perdagangan Eksport-Import (L/C di Indonesia)	161
2.1. Hubungan Hukum Antara Eksportir dan Importir	165
2.2. Hubungan Hukum Antara Pembeli (Importir) Dengan Bank	174
2.3. Hubungan Hukum Antara Penjual (Eksportir) Dengan Bank	178
3. L/C Sebagai Penunjang Kelancaran Perdagangan Eksport-Import	181
3.1. Manfaat L/C Dalam Perdagangan Eksport-Import	181
3.2. Hambatan Penggunaan L/C Dalam Perdagangan Eksport-Import	184
BAB IV. PENUTUP	187
A. Kesimpulan	187
B. Saran	190
Daftar Pustaka	192
Lampiran	

ABSTRAKSI

Transaksi perdagangan ekspor-impor (luar negeri) pada hakekatnya merupakan transaksi sederhana yang tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara-negara yang berbeda. Dalam transaksi perdagangan ekspor-impor tersebut dikenal bentuk cara pembayaran dengan Letter of Credit (L/C). Di dalam tahap perkembangannya, semula L/C didasarkan hanya saling percaya antara Pembeli/Importir dan Penjual/Eksportir. Penjual/Eksportir hanya mendapat jaminan bahwa pembayaran akan dilakukan dengan jasa Bank. Keadaan ini berubah menjadi Bank yang membuka kredit atas instruksi Pembeli/Importir. Pengertian dalam bentuk inilah yang sekarang dijumpai dalam pembukaan L/C. Dengan demikian dalam pembukaan L/C tersebut selain Ekportir dan Importir akan terlibat pihak ketiga yaitu Bank. Bank merupakan pihak yang dapat memberikan kepercayaan dan kepastian kepada eksportir bahwa pembayaran akan dilakukan oleh Bank sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam L/C tersebut. Dasar bagi pembukaan L/C yang digunakan oleh Bank adalah syarat-syarat L/C yang ditetapkan oleh Importir berkaitan dengan sales contract (kontrak jual beli) yang disepakati oleh Eksportir-Importir diluar keterlibatan Bank.

Terhadap L/C tersebut ketentuan hukum yang mengatur dan berlaku terhadapnya adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Uniform Customs and Practice for Documentary Credit 1993 (UCP 1993). Berpijak pada ketentuan tersebut maka semua pihak yang bersangkutan dalam penyelenggaraan L/C akan berurusan dengan dokumen-dokumen dan tidak dengan barang-barang. Dengan demikian Bank didalam melakukan pemeriksaan semata-mata atas dasar dokumen-dokumen yang diajukan kepadanya dan meneliti apakah syarat-syarat L/C tersebut telah dipenuhi.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini pada pokoknya meliputi :

1. Campur tangan pihak ketiga khususnya Bank hanya terhadap dokumen-dokumen dan tidak dengan barang. Pemeriksaan oleh Bank atas dokumen-dokumen adalah cukup sampai Bank tersebut dapat memastikan bahwa menurut penglihatan pada permukaan atau secara nyata adalah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pembukaan L/C. Penentuan apakah dokumen-dokumen sesuai dengan persyaratan atau kondisi kredit (L/C) dan telah sesuai satu sama lain hanya didasarkan pada pemeriksaan dengan metode pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank bukan berdasarkan pendapat orang lain.
2. Hubungan hukum antara pihak adalah :
 - Hubungan hukum antara Importir dan Eksportir merupakan hubungan hukum jual beli, sehingga ketentuan pasal 1457 s/d pasal 1532 KUH Perdata tentang jual beli berlaku terhadapnya.
 - Hubungan hukum antara Bank dan Importir merupakan hubungan hukum pemberian kuasa dengan pemberian upah dan melakukan pekerjaan.

- Hubungan hukum antara Penjual/Eksportir dengan Bank bergantung pada jenis L/C yang dibuka.

Pada L/C revocable kedudukan Eksportir lemah sehingga Bank tidak terikat dengan Penjual/Eksportir mengingat pada jenis L/C ini Bank dapat membatalkan setiap waktu tanpa persetujuan Eksportir.

Pada L/C irrevocable kedudukan Eksportir lebih kuat dan terjamin karena Bank telah mengikatkan diri dan tidak dapat membatalkannya sewaktu-waktu.

3. Sepanjang masing-masing pihak memenuhi dan melengkapi persyaratan yang dikehendaki dalam L/C dapat dikatakan L/C akan memberikan manfaat yang besar bagi para pihak dan merupakan cara yang aman dalam menunjang kelancaran perdagangan ekspor-impor.

ABSTRACT

Transaction of export-import (foreign) trading has essentially been a simple transaction not more than selling and buying goods among entrepreneurs who have domiciles in different countries. In transactions of the export-import trading, the form of payment with Letter of Credit (L/C) has been recognized. Within the development stage, L/C was initially based only on the mutual confidence between Buyer / Importer and Seller/Exporter. Seller/Exporter only gained the guarantee that the payment would be made with the service of Bank. This circumstance turned to Bank which opened credit on the basis of instruction of the Buyer/Importer. This understanding is currently found in opening L/C. Thus, in addition to the Exporter and the Importer, Bank as the third party will be involved, Bank is a party that can provide confidence and assurance to the exporter that the payment will be paid by the Bank in accordance with the requirements in the L/C. The basis for opening L/C used by the Bank is terms of L/C specified by the Bank in relation to Sales Contract which has been agreed by the Exporter-Importer beyond the Bank's involvement.

Legal provisions regulating and putting into effect towards the L/C are the provisions regulated in the Uniform Customs and Practice for Documentary Credit 1993 (UCP 1993). Based on the provisions all parties concerned in the performance of L/C will deal with documents, not goods. Accordingly, the Bank in undertaking review is purely based on the documents presented to and reviews whether the terms of L/C have been met or not.

From this study, the writer essentially draws conclusions as follows :

1. Intervention of the third party, particularly Bank, is only toward documents, not goods. Review by the Bank on the documents is that the Bank can assure that according to the apparent overview the documents conform to the terms and provisions in opening L/C. Determination of whether the documents adheres to the requirements or the credit condition (L/C) is mutually consistent with based only on the review with review methods conducted by the Bank, not based on other's judgement.
2. Legal relations among the parties are as follows :
 - The legal relation between the Importer and Exporter is a relation of selling and buying law, so that the provisions of articles 1457 to articles 1532 of the Code of Civil Laws about selling and buying are subject to.
 - The legal relation between the Bank and the Importer is a relation of empowerment law by providing the wage and doing the job.

- The legal relation between the seller/Exporter and the Bank depends on type of the L/C opened. On the revocable L/C the Exporter's stand is weak so that the Bank is not tied to the Seller/Exporter taking into account on this type of L/C the Bank can make revocation any time without any agreement from the Exporter. On the irrevocable L/C the Exporter's stand is strong and assured because the Bank has tied itself to and cannot make any revocation any time.
- 3. As long as the respective parties meet and complete the requirements intended in the L/C, it can be said that L/C will provide the large benefits to the parties and that is a save fashion in sustaining the fluency of export-import tradings.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap negara berbeda dengan negara lainnya baik ditinjau dari segi alamnya, iklimnya, letak geografisnya, penduduknya, keahliannya, tenaga kerja, teknologi, keadaan struktur ekonomi, tingkat harga, dan hukum, ideologi, politik maupun budayanya. Perbedaan-perbedaan tersebut akan menimbulkan perbedaan terhadap barang yang dihasilkan, biaya yang diperlukan, serta mutu dan kuantumnya. Oleh sebab itu mudah dipahami adanya negara yang lebih unggul dan lebih istimewa dalam memproduksi hasil tertentu.¹

Hal tersebut disebabkan karena ada barang yang hanya dapat diproduksi di suatu negara tertentu dengan iklim tertentu atau karena suatu negeri mempunyai kombinasi faktor-faktor produksi lebih baik dari negara lainnya, sehingga negara itu dapat menghasilkan barang yang lebih bersaing. Hal ini selanjutnya dapat mendorong orang memperdagangkan barang di luar batas negaranya.

Perdagangan itu sendiri merupakan suatu aktivitas yang sejak lama dikenal oleh manusia. Kegiatan perdagangan berawal dari

¹ Maringan Lumban Raja. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Eksportir dan Importir Dalam Perdagangan Luar Negeri (International Sale Of Goods)*. 1998. Jakarta : Proyek Ellips. hal 1.

sistem "barter" dimana seseorang yang memiliki kelebihan barang menukarkan kelebihan barangnya dengan barang yang dimiliki oleh orang lain. Sejalan dengan adanya kebutuhan untuk melakukan barter, kegiatan perdagangan kemudian menjadi suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.²

Seiring makin tingginya peradaban manusia, semakin bertambah pula kebutuhannya atas barang dan jasa. Dengan makin meningkatnya kebutuhan manusia atas barang dan jasa tersebut, maka makin pesatlah hubungan perdagangan diantara pengusaha yang satu dengan lainnya. Hingga akhirnya hubungan perdagangan itu tidak lagi hanya terbatas di dalam negeri saja melainkan ke negara lain di luar batas negaranya.³

Perdagangan barang-barang yang melampaui batas kenegaraan itulah yang akhirnya menimbulkan apa yang dimaksud dengan perdagangan luar negeri (perdagangan ekspor-impor), dan melibatkan adanya penjual (eksportir) dan pembeli (importir).

Dalam setiap transaksi perdagangan tersebut tentunya akan selalu menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bersangkutan. Pihak penjual berkewajiban melakukan penyerahan barang yang telah diperjanjikan dan berhak untuk menerima

² Newsletter No. 22/VI/1995, hal 1.

³ Perdagangan pada masa permulaan umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tempat kediaman yang relatif dapat berdekatan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan perdagangan kemudian juga dilakukan oleh orang-orang yang tempat kediamannya berjauhan. Neswletter. Ibid. hal 1.

pembayaran atas harga yang diserahkannya. Begitu pula sebaliknya pembeli berkewajiban membayar atau melunasi harga barang yang dibelinya dan berhak menuntut penyerahan barang dari si penjual.

Apabila pembeli dan penjual sama-sama berada di dalam suatu negara atau suatu tempat, maka untuk pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dengan mudah dilaksanakan dan tidak banyak mempunyai problem atau masalah yang pelik karena dapat dilakukan secara *cash* dan *carry*. Tetapi tidak demikian halnya di dalam perdagangan luar negeri (ekspor-impor), karena disini pembeli (importir) dan penjual (eksportir) terpisah satu sama lain baik secara geografis maupun oleh batas kenegaraan. Disamping itu antara negara pembeli (importir) dan penjual (eksportir) mempergunakan jenis mata uang yang berbeda dan kedua belah pihak harus memperhatikan pula peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara masing-masing dalam bidang yang menyangkut perdagangan ekspor-impor.

Dengan demikian dapat saja suatu kontrak jual beli yang telah dibuat atau disepakati oleh penjual (eksportir) dan pembeli (importir), tidak dapat dilaksanakan dengan baik akibat perbedaan hal tersebut di atas, namun tentunya para pihak dalam transaksi perdagangan ekspor-impor itu menginginkan agar transaksi yang mereka lakukan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan-hambatan.

Mengingat kesulitan utama yang sering dihadapi di dalam perdagangan ekspor-impor tersebut menyangkut tentang cara penyerahan barang dan cara pembayarannya. Maka harus selalu diupayakan bagaimana agar hubungan pembayarannya dapat berjalan lancar dan memuaskan semua pihak, sehingga transaksi perdagangan ekspor-impor tersebut dapat berjalan dengan baik.

Secara normal, keinginan pihak penjual (eksportir) dan pihak pembeli (importir) dalam hal cara pembayaran saling berlawanan. Dengan asumsi harga sama, penjual (eksportir) akan lebih senang menerima pembayaran terlebih dahulu sebelum mengirimkan barangnya. Sebaliknya pihak pembeli (importir) lebih senang melakukan pembayaran kemudian setelah menerima barang. Kepentingan yang bertolak belakang ini pada dasarnya menyangkut masalah kadar kepercayaan satu pihak terhadap pihak lainnya, masalah resiko, dan nilai uang.⁴

Pihak penjual (eksportir) pada umumnya enggan menyerahkan barangnya sebelum ada kepastian atau keyakinan bahwa pembayaran akan diterima. Sebaliknya, pihak pembeli (importir) enggan melakukan pembayaran sebelum ada kepastian atau keyakinan bahwa barang akan diterima atau diserahkan.

⁴ Sujito. 1996. **Peranan Bank Devisa Dalam Perdagangan Ekspor Impor**. Santeks Vo. IV No. 1 Desember 1996. Hal 42.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka disepakati satu jalan kompromi, yaitu pembayaran dilakukan bukan terhadap penyerahan barang secara fisik, melainkan terhadap penyerahan dokumen yang mencerminkan adanya pengiriman dan pemindahan hak kepemilikan atas barang. Dengan demikian masalah kepercayaan menjadi sangat penting dan dalam hal ini bank diminta jasanya memberikan jaminan pembayaran kepada penjual (eksportir) dengan syarat penyerahan dokumen dan sesuai dengan kondisi yang ditetapkan oleh pembeli (importir). Dengan perkataan lain, diperlukan adanya "*Dokumentary Credit*", yang dalam praktek sehari-hari disebut "*Letter of credit*", yaitu surat jaminan pembayaran dari bank.

Pelaksanaan pembayaran dengan cara pembukaan kredit berdokumen (*L/C*) itu terjadi dengan pembayaran yang dilakukan oleh bank atas permintaan dari pembeli untuk kepentingan penjual. Semua itu dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku serta dengan memperhatikan pula persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dengan didukung perkembangan teknologi dan pengaruhnya pada perkembangan dunia usaha, maka peranan lembaga perbankan tersebut dirasakan semakin menonjol terutama dengan menggunakan cara pembayaran *letter of credit*. Setiap ada pembukaan *letter of credit*, bank tetap berperan dan menjadi pihak dalam pembukaan *L/C*.

Pendapat para ahli berikut ini mendukung pernyataan terhadap peranan bank dalam pembukaan *letter of credit* tersebut.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak menyatakan bahwa : Dalam bentuknya yang paling sederhana, di dalam *credit opening (L/C)* terdapat tiga pihak, yaitu : bank, pembeli dan penjual. Bank adalah pihak yang membuka kredit, pembeli adalah pihak yang menyuruh membuka kredit dan penjual adalah pihak untuk kepentingan siapa *credit opening* itu diberikan (*beneficiary*).⁵

Pendapat yang sama dikemukakan oleh E.P.Ellinger yang menyatakan : "*More often, however, there are four and not three parties involved. In addition to the seller, buyer and issuing banker there is a "correspondent" or intermediary banker. The participation of a correspondent banker is necessary in most overseas transaction*".⁶

Dari pendapat tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam pembukaan *letter of credit* selalu terlibat pihak ketiga yakni bank. Karena terdapat tiga pihak yang bersangkutan di dalam suatu pembukaan kredit maka berarti juga terdapat tiga hubungan hukum di dalam suatu pembukaan *letter of credit* yaitu hubungan hukum antara pembeli dan bank, antara pembeli dan penjual dan antara bank dan penjual.

⁵ Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1993. **Pembukaan Kredit Berdokumen**. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Dadjah Mada. Hal 23.

⁶ E.P. Ellinger. 1970. **Documentary Letter of credit a Comparative Study**. Singapore : University of Singapore.

Dari kondisi yang demikian tentunya membutuhkan penanganan, baik pada aspek operasional maupun aspek hukumnya sehubungan dengan adanya hubungan-hubungan hukum tersebut.

Selanjutnya Pemerintah disini juga akan berperan melalui seperangkat peraturan perundangan yang dikeluarkannya yang kesemuanya dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka mengatur agar pelaksanaan pembukaan *letter of credit* tersebut tidak mengganggu kepentingan masing-masing pihak yang terkait dalam pembukaan *L/C* tersebut. Kesemuanya itu akan merupakan dasar hukum setempat, disamping harus tetap berpijak pada dasar hukum internasional sebagaimana telah disepakati oleh *Chamber Of Commerce* yaitu : *Uniform Custom and Practice for Commercial Documentary Credit (UCP)*, terakhir terdapat dalam *UCP 1993*.

Karena cara pembayaran dengan *letter of credit* memerlukan dokumen-dokumen lain sebagai syarat yang menyertainya dimana dokumen-dokumen tersebut sangat penting artinya bagi pihak pembeli (importir) yang harus melakukan pembayaran atas barang yang dibelinya, maka disamping bank dalam pembukaan *letter of credit* ini akan terkait juga instansi dan badan usaha lain seperti *Freight Forwarder* (EMKL, EMKU), Asuransi, Bea Cukai, Maskapai Pelayaran, *Surveyor*.

Kemudian mengingat *L/C* sebagai dokumen pembayaran dalam perdagangan ekspor-impor tersebut menjadi alternatif pilihan

pembayaran dalam perdagangan ekspor-impor. Dengan demikian diharapkan hal tersebut dapat menunjukkan bagaimana *L/C* sebagai dokumen pembayaran dapat menunjang kelancaran perdagangan ekspor-impor di Indonesia.

Dengan demikian sangat beralasan kiranya apabila peneliti mengkaji dan menganalisis tentang Campur Tangan Pihak Ketiga Terhadap Dokumen Pembayaran Perdagangan Ekspor Impor (*Letter of credit*) Di Indonesia dalam penelitian ini.

B. PEMBATAAN DAN PERUMUSAN MASALAH

Mengingat luasnya permasalahan yang berkaitan dengan Campur Tangan Pihak Ketiga Terhadap Dokumen Pembayaran Perdagangan Ekspor Impor (*L/C*) Di Indonesia tersebut, agar tidak terjadi bias, maka penelitian ini permasalahannya dibatasi bahwa :

Pihak ketiga dalam penelitian ini hanya meliputi pihak bank. Campur tangan dari pihak bank tersebut sebagai pihak ketiga hanya menyangkut pelaksanaan teknik pembayaran dan penyelenggaraan *flow of documents* (kelancaran jalannya dokumen-dokumen).

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan pembatasan masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana campur tangan pihak ketiga terhadap dokumen pembayaran perdagangan Ekspor-Impor (*L/C*) di Indonesia

2. Bagaimana hubungan hukum para pihak yang terkait dalam dokumen pembayaran perdagangan ekspor-impor (L/C) ?
3. Sejauhmana L/C menunjang kelancaran perdagangan Eksport-Import ?

C. KERANGKA PIKIR

Sebagaimana dijelaskan pada bagian latar belakang transaksi perdagangan luar negeri yang lebih dikenal dengan istilah ekspor-impor pada hakekatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara-negara yang berbeda. Namun kemudian dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi laut dan darat ini tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks antara pengusaha-pengusaha yang mempunyai bahasa, kebudayaan, adat istiadat dan cara yang berbeda-beda tersebut.

Salah satu hambatan atau kendala yang timbul tersebut adalah menyangkut kepercayaan antara eksportir dan importir. Dua pihak yang tempatnya berjauhan dan belum saling mengenal merupakan suatu risiko bila dilibatkan dengan pertukaran uang dan barang. Apakah importir percaya untuk mengirimkan uang terlebih dahulu kepada eksportir sebelum barang dikirim atau sebaliknya apakah eksportir mengirimkan barang terlebih dahulu kepada importir sebelum melakukan pembayaran.

Dalam membicarakan tentang pembayaran sebenarnya tidak dapat terlepas dari persoalan yang menyangkut tentang apa maksud dan tujuan pembayaran itu dilakukan. Hal ini logis karena pembayaran itu tidak lain merupakan suatu kewajiban yang timbul sebagaimana akibat dari suatu usaha yang dilakukan sebelumnya.⁷

Kaitan pembayaran tersebut dengan perdagangan luar negeri (ekspor-impor) adalah bahwa suatu pembayaran luar negeri pada hakekatnya diperlukan dalam penyelesaian transaksi-transaksi yang diadakan oleh para pihak dalam transaksi ekspor-impor tersebut. Karena perdagangan ekspor-impor tersebut baru akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila hubungan pembayarannya dapat diselenggarakan dengan baik pula. Tentunya para pihak dalam transaksi perdagangan ekspor-impor tersebut menginginkan agar transaksi yang mereka adakan dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya hambatan-hambatan apapun.

Untuk itu risiko yang muncul berkaitan dengan cara pembayaran tersebut, mungkin akan dapat diamankan oleh bank sebagai pihak ketiga atau perantara, melalui keterlibatan bank tersebut menyangkut cara pembayaran dengan suatu instrumen atau alat pembayaran yang disebut dengan *letter of credit*, yang kemudian didefinisikan sebagai sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh sebuah

⁷ Soepriyo Andhibroto. 1989. *Letter of credit Dalam Teori Dan Praktek*. Semarang : Dahara Prize. Hal 13.

bank atas nama salah satu nasabahnya, yang mengusahakan seseorang atau sebuah perusahaan penerima instrumen tersebut menarik wesel atas bank yang bersangkutan atau atas salah satu bank korespondennya, berdasarkan kondisi-kondisi/persyaratan-persyaratan yang tercantum pada instrumen tersebut.⁸

Sebenarnya dipandang dari segi teknisnya, pembayaran dalam perdagangan ekspor-impor dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain:⁹

1. Pembayaran dimuka (*Advance Payment*)
2. Wesel inkaso (*Collection Draft*) dengan kondisi *Documents againts Payment (D/P)* dan *Documents against Acceptance (D/A)*.
3. Perhitungan kemudian (*Open Account*).
4. Konsinyasi
5. *Letter of credit*. Namun demikian cara pembayaran dalam perdagangan luar negeri yang lazim dilakukan adalah cara yang kelima tersebut yaitu dengan suatu *Letter of credit*.¹⁰

Dengan digunakan *L/C* sebagai dokumen pembayaran dalam perdagangan ekspor-impor tersebut maka dapat disebutkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam *L/C* meliputi :¹¹

⁸ Roselyne Hutabarat. 1989. **Transaksi Ekspor Impor**. Jakarta : Peberbit Erlangga. Hal 21.

⁹ Soepriyo Adhibroto. Ibid hal 15.

¹⁰ Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1995. **Pembukaan Kredit Berdokumen**, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM Yogyakarta.

¹¹ Soepriyo Adhibroto. Op.cit hal 52.

1. Pemberi atau disebut juga *buyer, importer, accountee, account party, applicant, consignee*.
2. Penjual atau disebut juga *seller, exporter, supplier, beneficiary*.
3. Bank pembuka atau disebut juga *opening bank, issuing bank*.
4. Bank penerus atau disebut juga *advising bank, notifying bank*.
5. Bank pembayar atau *paying bank*.
6. Bank pengaksep atau *accepting bank*.
7. Bank penegosiasi atau *negotiating bank*.
8. Bank penjamin atau *confirmacy bank*.

Cara pembayaran dengan menggunakan *L/C* dalam perdagangan ekspor-impor akan tergantung dari perjanjian antara eksportir dan importir sebelumnya, yang dituangkan dalam *sales contract*. Mengapa demikian, karena sebelum sebuah *L/C* dibuka oleh importir melalui banknya, telah didahului oleh suatu proses yang cukup panjang hingga terwujudnya *sales contract* yang nantinya merupakan dasar dari pembukaan *L/C* oleh importir.

Dengan demikian *sales contract* merupakan dokumen yang penting oleh karena berdasarkan perjanjian inilah saling pengertian antar kedua pihak dituangkan dan ditegaskan. Kontrak tersebut umumnya menyangkut jumlah, mutu barang, harga, tanggal pengapalan, cara-cara pembayaran dan data-data lain yang diperlukan. Dalam kontrak inilah dicantumkan keterangan-keterangan yang terinci tentang tingkat, mutu barang, harga, tanggal pengapalan,

cara-cara pembayaran dan data-data lain yang diperlukan. Dalam kontrak inilah dicantumkan keterangan-keterangan yang terinci tentang tingkat, mutu dan keterangan-keterangan lain yang biasanya tidak cukup dicantumkan dalam *L/C*. selain itu persyaratan-persyaratan teknis yang hanya memberikan arti penting bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam perusahaan akan dicantumkan di dalam kontrak dimaksud bukan dalam *L/C*.¹²

Dengan ditutupnya perjanjian jual beli yang tertuang dalam *sales contract* tersebut importir sebagai pemohon pembukaan *L/C* dapat memerintahkan bank untuk membuka *L/C*. Bank yang menerima perintah dari importir kemudian meminta kepada bank cabang atau korespondennya di negara eksportir agar memberitahukan kepada eksportir bahwa telah dibuka kredit atas nama eksportir untuk pembayaran jual beli itu.

Selanjutnya setelah eksportir (*beneficiary*) menerima pemberitahuan dari *advising bank*, maka ia segera melakukan pengiriman barang-barang yang telah diperjanjikan dalam tenggang waktu yang ditetapkan dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana disyaratkan dalam *L/C*. Kemudian eksportir menyampaikan dokumen-dokumen tersebut kepada *advising bank*

¹² Sardjono Brotodiningrat. 1990. *Perkembangan Letter of credit*. Makalah Pada Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Perdata/Dagang. Kerjasama Fakultas Hukum UGM-Konsorsium Ilmu Hukum. Yogyakarta, 12 – 23 Maret 1990. Hal 14.

atau *confirming bank* dan selanjutnya *advising bank* menyampaikan dokumen-dokumen tersebut kepada *issuing bank*.

Adapun dokumen-dokumen yang digunakan dalam transaksi ekspor dan impor itu adalah : ¹³

1. *Commercial Invoice*;
2. *Transport Documents*, yang meliputi :
 - a. *Bill of Loading*
 - b. *Good Receipt*
 - c. *Mate's Receipt*
 - d. *Air Maybill*
3. *Draft (Wesel)*;
4. *Insurance Documents*;
5. *Other Documents*.

Dokumen-dokumen yang menyertai dalam pembukaan *L/C* ini sangat penting artinya, baik bagi importir maupun pihak bank selaku pemegang kuasa dari importir yang harus melakukan pembayaran. Dan bagi pihak eksportir (*beneficiary*) dokumen-dokumen itu juga mempunyai arti penting pula, karena *beneficiary* baru dapat menerima pembayaran dari *advising bank* apabila telah menyerahkan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan barang yang diekspor.

¹³ Ruddy Tri Santoso. 1994. *Pembiayaan Transaksi Luar Negeri*. Yogyakarta : Penerbit Andi Offset. Hal 25.

Pada tahap pembayaran, apabila *issuing bank* telah menerima dokumen-dokumen dari *advising bank* selanjutnya akan mengadakan penelitian dokumen-dokumen tersebut dalam waktu yang layak.

Apabila setelah meneliti, bank menolak dokumen-dokumen tersebut, maka ia harus mengembalikannya kepada yang menyerahkan, yaitu kepada penjual dalam waktu yang layak. Tetapi bila telah sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam *L/C*, maka bank akan segera melakukan pembayaran kepada eksportir atau *beneficiary* atau *reimburs* kepada *confirming bank* atau kepada bank lain yang telah melakukan pembayaran atau mengakseptasi atau menegosiasi wesel atas *L/C*. Pada tahap akhir *issuing bank* menyampaikan dokumen kepada pembeli (importir) setelah pembeli melakukan pembayaran kembali kredit yang dibuka.

Agar kepentingan-kepentingan para pihak yang terlibat dalam pembukaan *L/C* sebagai dokumen pembayaran dalam perdagangan ekspor-ekspor tersebut dapat terlindungi, maka diperlukan adanya suatu kejelasan mengenai aturan hukumnya.

Sejauh ini pengaturan mengenai *letter of credit* dapat dijumpai dalam :

1. *Unifform Customs* 1962 (UC '1962) yang mengalami beberapa revisi pada UC '1974, UC'1983, UC'1993.

Unifform Customs tersebut merupakan peraturan dasar dari *L/C* yang bersifat internasional, sehingga UC tidak berwenang untuk

mengatur persoalan yang menjadi wewenang dalam negeri dari negara yang bersangkutan, terutama mengenai masalah-masalah perdagangan yang erat hubungannya dengan pelaksanaan *L/C*.

2. Hukum Setempat

Selain adanya peraturan dasar dari *L/C* yang bersifat internasional, maka berlaku juga hukum nasional negara yang bersangkutan. Di Indonesia peraturan yang erat hubungannya dengan pembukaan *L/C* antara lain :

- a. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Lalu Lintas Devisa.
- b. Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.
- c. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kapabeanan.
- d. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- e. Inpres No. 3 Tahun 1998¹ tentang Perubahan Inpres No. 4 Tahun 1985 tentang Kebijakanaksanaan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi.
- f. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa.
- g. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 558/MPP/ Kep/12/1988 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor.

- h. SK. Dir BI Nomor 31/174/Kep/Dir tentang Perubahan SK Dir BI Nomor 31/88/Kep/Dir tentang Jaminan Pembiayaan Perdagangan Internasional.
- i. Lain-lain peraturan yang erat hubungannya dengan pembukaan L/C.

Selanjutnya terdapat beberapa jenis L/C yang dapat ditinjau dari kekuatan berlaku, pihak yang mengeluarkan, cara pembayaran, syarat-syarat perjanjian, hak beneficiary dan L/C khusus.¹⁴

Kemudian karena pembukaan L/C sebagai dokumen pembayaran tersebut ada peraturan hukumnya, maka dapat dikatakan hal tersebut merupakan peristiwa hukum.

Sudikno berpendapat bahwa :

Peristiwa hukum adalah peristiwa yang relevan bagi hukum, peristiwa yang oleh hukum diberi akibat hukum atau peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan lenyapnya atau timbulnya hak dan kewajiban. Suatu peristiwa konkret tidak dengan sendirinya akan menjadi peristiwa hukum. Suatu peristiwa hukum tidak mungkin terjadi tanpa adanya kaedah hukum. Peristiwa hukum tidak dapat dikonstatir tanpa penggunaan kaedah hukum, atau peristiwa hukum itu diciptakan oleh kaedah hukum. Sebaliknya kaedah hukum itu dalam proses terjadinya dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa konkret.¹⁵

Dari pendapat tersebut diatas dapat diketahui bahwa suatu peristiwa akan menjadi peristiwa hukum, jika terhadap peristiwa tersebut terdapat hukum yang mengaturnya. Terhadap peristiwa hukum tersebut akan menimbulkan akibat-akibat hukum, yang dapat

¹⁴ Munir Fuady. 1994. **Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek (Buku Kedua)**. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Hal. 93-105.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo. 1996. **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**. Yogyakarta : Liberty. Hal 17.

berupa lahir atau lenyapnya suatu keadaan hukum; lahir atau lenyapnya hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih, dimana hak dan kewajiban disatu pihak akan berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak lain.

Jadi untuk dapat terjadi suatu hubungan hukum diperlukan syarat-syarat, yaitu : ada dasar hukumnya, berupa peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum tersebut; dan peristiwa hukumnya.¹⁶

Hubungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pembukaan *L/C* sebagai dokumen pembayaran tentunya membutuhkan pengaturan yang akan mampu memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan tersebut.

Setelah menyimak tahap-tahap pelaksanaan pembayaran dengan pembukaan *L/C* dalam perdagangan ekspor-impor tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa cara pembayaran dengan pembukaan dokumen pembayaran *L/C* merupakan cara yang aman apabila ditinjau dari kedua belah pihak baik dari pihak eksportir maupun importif sebab dalam pembayaran yang dilakukan dengan pembukaan *L/C* baik eksportir maupun importir akan memperoleh kepastian bahwa hak-hak mereka dalam transaksi akan dipenuhi

¹⁶ Soerojo Wognjodipoerno. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Haji Mas Agung. Hal. 39.

apabila masing-masing dapat melengkapi semua persyaratan yang dikehendaki dalam *L/C*.¹⁷

D. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai campur tangan pihak ketiga terhadap dokumen pembayaran perdagangan ekspor-impor (*L/C*) di Indonesia, sedangkan tujuan khusus adalah :

1. Dapat menjelaskan tentang dibutuhkannya campur tangan pihak ketiga dalam pembentukan dokumen pembayaran perdagangan ekspor-impor (*L/C*) pada umumnya dan menjelaskan sejauhmana peraturan perundangan yang ada mengatur dan berlaku terhadap hal tersebut.
2. Dapat mengetahui bagaimana campur tangan pihak ketiga dalam pembukaan *L/C* tersebut menunjang kelancaran ekspor-impor di Indonesia.
3. Dapat memahami hubungan hukum para pihak yang terkait dalam campur tangan pihak ketiga terhadap pembukaan dokumen pembayaran perdagangan ekspor impor (*L/C*).

¹⁷ Aryani Witasari. 1995. *Letter of credit Sebagai Alternatif Pilihan Dalam Perdagangan Luar Negeri*, Majalah Hukum Kaligawe Edisi 5/Th. III/Pebruari 1995. Hal. 46.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis, sebagai berikut :

1. Segi Praktis

- a. Sebagai bahan informasi mengenai dibutuhkannya campur tangan pihak ketiga dalam pembukaan dokumen pembayaran perdagangan ekspor-impor (*L/C*) pada umumnya dan informasi tentang peraturan hukum yang mengatur dan berlaku terhadap hal tersebut.
- b. Sebagai bahan informasi mengenai campur tangan pihak ketiga terhadap pembukaan dokumen pembayaran *L/C* dalam menunjang kelancaran perdagangan ekspor-impor di Indonesia.
- c. Sebagai bahan informasi untuk mengetahui hubungan hukum para pihak yang terkait dalam campur tangan pihak ketiga terhadap pembukaan dokumen pembayaran perdagangan ekspor-impor (*L/C*) di Indonesia.

2. Segi Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum dan Hukum Ekonomi.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah, pendekatan yuridis-normatif yang bertumpu pada data sekunder dan dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris yang bertumpu pada data primer.¹⁸ Pendekatan yuridis normatif digunakan karena dalam penelitian ini akan dilakukan inventarisasi terhadap peraturan hukum yang mengatur dan atau berkaitan dalam campur tangan pihak ketiga terhadap pembukaan dokumen pembayaran perdagangan ekspor-impor (*L/C*) di Indonesia, dan melakukan penelitian terhadap sistematik hukum dalam campur tangan pihak ketiga terhadap pembukaan dokumen pembayaran perdagangan ekspor-impor (*L/C*) di Indonesia. Sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan karena dalam penelitian ini akan melakukan studi terhadap proses campur tangan pihak ketiga terhadap pembukaan dokumen pembayaran perdagangan ekspor-impor (*L/C*) tersebut dikaitkan dengan norma hukum yang mengaturnya.

¹⁸ Penelitian Hukum dibedakan menjadi penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder; penelitian hukum empiris atau sosiologi, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal 10.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki spesifikasi sebagai penelitian inferensial analisis, yaitu akan berusaha mencari data yang seteliti mungkin tentang campur tangan pihak ketiga terhadap dokumen pembayaran perdagangan ekspor-impor (*L/C*) di Indonesia, untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut sesuai permasalahan yang dirumuskan, dan akhirnya dibuat suatu kesimpulan yang faktual dan akurat terhadap hasil penelitian.

3. Metode Penentuan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah bank devisa baik bank swasta maupun pemerintah.

b. Sampel

Sampel ditentukan dengan cara purposive sampling, yaitu dengan cara menunjuk pihak-pihak yang dianggap dapat mewakili, dengan alasan populasi itu sifatnya homogen karena pembukaan dokumen pembayaran perdagangan ekspor-impor (*L/C*) di Indonesia menggunakan pedoman yang sama, sehingga diperoleh sampel sebagai berikut :

1. PT. Bank Negara Indonesia 46 (Persero) Tbk;
2. PT Bank Niaga;

c. Responden

Adapun respondennya adalah :

1. Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau staf yang ditunjuk mewakilinya;
 2. Pimpinan PT Bank Niaga atau staf yang ditunjuk mewakilinya;
- d. Nara sumber adalah :
1. Bank Indonesia
 2. Kanwil Bea Cukai
 3. Departemen Perindustrian dan Perdagangan
 4. Perusahaan Pengangkutan (EMKL / EMKU)
 5. Maskapai Pelayaran
 6. Perusahaan Asuransi

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

a. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan ini alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumenter dalam rangka memperoleh data sekunder, meliputi :

1. Bahan hukum primer, terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);

- d) Peraturan perundangan yang mengatur pembukaan dokumen pembayaran *L/C*;
- e) Peraturan perundangan lainnya yang mempunyai kaitan dengan permasalahan penelitian;
- f) Dokumen-dokumen yang dibuat dalam rangka pembukaan dokumen pembayaran *L/C*.

2. Bahan hukum sekunder

- a) Literatur yang relevan dengan penelitian;
- b) Laporan hasil penelitian tertulis;
- c) Makalah dan jenis tulisan lainnya yang relevan dengan penelitian;

3. Bahan hukum tersier

- a) Kamus dan Ensiklopedia;
- b) Majalah dan Surat Kabar;
- c) Brosur-brosur yang relevan.

b. Studi Lapangan

Di dalam studi lapangan, alat pengumpul data yang dipergunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan berdasarkan kepada pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang

difokuskan (*focused interview*).¹⁹ Dalam wawancara ini, responden yang diwawancarai mempunyai pengalaman tertentu atau yang diawawancarai terjun langsung pada obyek tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Dari hasil wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam praktek. Mula-mula kepada subyek penelitian diajukan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan tersebut diperdalam untuk mendapatkan hasil lebih lanjut. Dengan demikian diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam. Hasil yang diperoleh dari wawancara ini merupakan data primer untuk mendukung data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Jika proses pengumpulan data telah selesai, maka pengolahan terhadap data tersebut dilakukan dengan editing dan menyusun data-data tersebut sesuai perumusan permasalahan penelitian. Data yang telah tersusun secara sistematis itu akan dianalisis, dengan normatif kualitatif.²⁰ Analisis normatif maksudnya adalah melakukan analisis terhadap peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang mengatur terhadap campur tangan pihak ketiga terhadap pembukaan dokumen pembayaran (L/C). Norma-norma hukum itu akan dikaitkan dengan proses campur tangan

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro. Opcit hal 60-61.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro. Opcit hal 35.



pihak ketiga terhadap dokumen pembayaran (*L/C*) yang terjadi dilapangan. Sedangkan analisis kualitatif adalah melakukan analisis secara deskriptif dari ungkapan-ungkapan yang disampaikan para responden, artinya analisa tidak menggunakan perhitungan angka secara kuantitatif.

G. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistimatika Penulisan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pada BAB I diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tinjauan Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistimatika Penulisan.

BAB II : Pada BAB II diuraikan tentang Tinjauan Pustaka yang mempunyai kaitan dengan campur tangan pihak ketiga terhadap dokumen pembayaran perdagangan ekspor-impor (*L/C*) di Indonesia antara lain : Tinjauan Umum Perdagangan Ekspor-Import meliputi : Latar belakang perdagangan ekspor-impor, Pengertian perdagangan ekspor-impor, Para pihak dalam perdagangan ekspor-impor, Jenis-jenis dokumen dalam perdagangan ekspor-impor. Fungsi dokumen dalam perdagangan ekspor-impor, serta Cara pembayaran dalam perdagangan

ekspor-impor. Tinjauan Umum *Letter of credit* meliputi :
Sejarah perkembangan *L/C*, Pengertian *L/C*, Pengaturan
L/C, Pihak-pihak dalam *L/C*, Bentuk dan jenis *L/C*, Proses
pembukaan *L/C*, Dokumen-dokumen dalam *L/C*.
Selanjutnya Keberadaan Bank Dalam Pembukaan *L/C*
meliputi Pengertian Bank, Dasar hukum perbankan,
Fungsi dan tujuan bank dan Kedudukan bank devisa
dalam pembukaan *L/C*.

BAB III : Pada BAB III diuraikan tentang Hasil Penelitian dan
Analisis, yang meliputi Dibutuhkannya Campur Tangan
Pihak Ketiga Dalam Pembukaan Dokumen Pembayaran
Perdagangan Ekspor-Impor (*L/C*) Pada Umumnya dan
Hukum Yang berlaku dan Mengaturnya, Campur Tangan
Pihak Ketiga Terhadap Pembukaan *L/C* Dalam
Menunjang Kelancaran Perdagangan Ekspor-Impor Di
Indonesia, dan Hubungan hukum Para Pihak Yang Terkait
Dalam Campur Tangan Pihak Ketiga Terhadap
Pembukaan Dokumen Pembayaran Perdagangan Ekspor-
Impor (*L/C*) Di Indonesia.

BAB IV : Pada BAB IV adalah Penutup yang berisi kesimpulan dan
saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM PERDAGANGAN EKSPOR – IMPOR

1. Latar Belakang Perdagangan Ekspor – Impor

Indonesia mempunyai keadaan alam yang sangat indah dan kaya raya, hasil-hasil buminya yang melimpah ruah, dari tambang batu bara, biji besi sampai minyak buminya. Iklimnyapun tidak hanya satu, hampir tiap tahun terjadi pergantian musim. Penduduknya juga beragam baik dari daerah, suku ataupun tingkat kecerdasannya.²¹ Namun demikian ciri-ciri yang ada di negara kita itu belum tentu terdapat di negara lain. Begitupun sebaliknya ciri yang ada di negara kita.

Dengan demikian setiap negara akan mempunyai sumber kekayaan alam dan hasil produksi yang berbeda-beda yang disebabkan oleh perbedaan letak geografis, sumber alamnya, iklimnya, penduduk, keahliannya, tenaga kerja, tingkat harga, keadaan struktur ekonomi dan sosialnya.²² Perbedaan-perbedaan itu menimbulkan pula perbedaan barang yang dihasilkan, biaya yang diperlukan, serta mutu dan kuantumnya.²³ Karena itu sangat

²¹ Aryani Witasari. 1995. Letter of Credit (L/C) sebagai Alternatif Pilihan Dalam Perdagangan Luar Negeri. Majalah Hukum Kaligawe Edisi 5/Thn III/Pebruari 1995.

²² Amir M.S. 1985. Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri. Jakarta : PT. Pustaka Binaman Presindo. hal 1.

²³ Maringan Lumban Raja. 1994. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Eksportir dan Importir Dalam Perdagangan Luar Negeri (International Sale of Goods). Makalah. hal 1.

dimungkinkan jika suatu negara akan mempunyai keunggulan dalam memproduksi hasil tertentu karena adanya hasil alam yang dapat diproduksi di daerah dan iklim tertentu atau karena negara tersebut memiliki perpaduan produksi yang lebih baik daripada negara lainnya sehingga akan menghasilkan barang yang lebih baik.

Dewasa ini hampir tidak ada lagi suatu negara di dunia yang betul-betul dapat memenuhi kebutuhannya dari hasil produksi negaranya sendiri. Baik negara kecil maupun negara yang ekonominya sudah sangat maju, maupun yang masih terbelakang, langsung atau tidak langsung membutuhkan dan melaksanakan pertukaran barang dan jasa antara satu dengan lainnya. Pendeknya antara negara-negara di dunia sudah terjalin suatu hubungan perdagangan satu sama lainnya.

Sebagai contoh hasil produksi Indonesia pada umumnya sampai kini belum dapat dipergunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sebab masih terdiri dari bahan mentah dan hasil tambang seperti palawija, karet, kopra, teh, minyak mentah, timah yang masih harus diekspor ke luar negeri sebagai bahan baku untuk industri negara-negara maju, dan sebaliknya untuk kebutuhan dalam negeri masih mengimpor barang konsumsi hasil industri yang jumlahnya sangat terbatas.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebab-sebab yang menimbulkan adanya perdagangan ekspor-impor tersebut adalah :

- a. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.
- b. Memperoleh keuntungan yang timbul dari adanya spesialisasi.

Selanjutnya terdapat beberapa hal yang dapat disebutkan sebagai keuntungan-keuntungan dari adanya perdagangan ekspor-impor tersebut yaitu :²⁴

1. Diperolehnya secara tidak langsung barang yang lebih baik daripada kalau barang tersebut dibuat di dalam negeri dengan sumber-sumber produksi yang sama jumlahnya sebagai penukaran hasil produksi yang menurut perbandingan dapat dibuat dengan lebih menguntungkan. Dengan demikian keuntungan perdagangan ekspor-impor adalah dalam upaya untuk mendapatkan barang yang lebih baik dengan harga yang lebih murah dan pada barang tersebut diproduksi di dalam negeri.
2. Mendapat keuntungan untuk mendapatkan barang yang belum diproduksi di dalam negeri.
3. Mendapatkan devisa apabila barang yang terjual ke luar negeri, dimana barang yang dijual ke luar negeri tersebut adalah

²⁴ Maringan Lumban Raja. Ibid. hal 2.

barang yang relatif biaya produksinya lebih murah dibandingkan dengan ongkos pembuatan barang itu di luar negeri.

2. Pengertian dan Pengaturan Perdagangan Ekspor-Import.

Perdagangan barang-barang dari suatu negara ke negara lain di luar batas itulah yang kemudian dimaksudkan dengan perdagangan luar negeri.²⁵ Disebutkan juga bahwa perdagangan luar negeri merupakan penyelenggaraan barang-barang ke luar negeri.²⁶

Dalam perdagangan luar negeri terdapat aktivitas jual yang disebut ekspor dan aktivitas beli yang disebut impor. Ekspor – impor ini sebenarnya adalah perdagangan internasional atau internasional trade. Dengan demikian tidak lebih adalah perdagangan antara bangsa (National). Jadi ekspor-impor ini sebenarnya adalah usaha swasta di satu negara dengan usaha swasta di satu negara lainnya. Usaha swasta ini di dalam dunia usaha lazim disebut sebagai perusahaan (*Firms*) yang kegiatan usahanya melampaui batas negaranya (*National Boundaries*). Perusahaan seperti inilah yang paling sering di dalam mengadakan ekspor – impor ini.

²⁵ Amir M.S. *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*. Jakarta : Penerbit LPPM dan PT. Pustaka Binaman Pressindo. 1998.

²⁶ Pamoentjak KST. 1981. *Survei Pelne dan Teknik Perniagaan*. Jakarta : Prayuda Paramita. hal 13.

Oleh karena itu perlu dibedakan antara ekspor – impor (*International Trade*) dengan perdagangan dalam negeri (*Domestic Trade*). Perbedaan ini penting karena :

1. Menyangkut hal adanya perbedaan standard nilai tukar yang dipakai serta alat tukar yang berbeda pula.
2. Perbedaan ad.1, di atas membawa akibat yang lebih jauh lagi yaitu adanya perbedaan hukum (*Laws*) dan kebiasaan (*Customs*) yang berlaku di negara masing-masing.

Alasan-alasan di luar hukum adanya *International Trade* yang dapat dikemukakan adalah sebagaimana dikatakan di atas yakni letak suatu negara (*geografy*), perbedaan tanah (*geology*), perbedaan iklim (*climate*) serta perbedaan penduduk dan keahliannya.

Dalam situasi perekonomian dunia yang kurang menentu dan penuh dengan persaingan yang tajam, peningkatan daya saing ekonomi nasional akan menentukan keberhasilan kita. Oleh karena itu harus ada kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha dan antara pelaku dalam dunia usaha. Kerjasama seperti ini telah membawa keberhasilan ekonomi nasional bergerak dalam lingkungan ekonomi dunia yang kurang menentu dan kompetitif itu.

Selanjutnya pengaturan perdagangan ekspor-impor tertuang dalam berbagai kebijakan pemerintah berikut ini :

1. Undang-Undang No.32 Tahun 1964 tentang Lalu Lintas Devisa.

2. Undang-Undang No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.
3. Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
4. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
5. Inpres No.3 Tahun 1992¹ tentang Perubahan Inpres No.4 Tahun 1985 tentang kebijaksanaan kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi.
6. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1985 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa.
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 588/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.
8. SK.Dir BI Nomor 31/174/Kep/Dir tentang Perubahan SK Dir BI Nomor 31/89/Kep/Dir tentang Jaminan Pembiayaan Perdagangan Internasional.
9. Lain-lain peraturan yang erat hubungannya dengan perdagangan ekspor – impor.

3. Para Pihak Dalam Perdagangan Ekspor-Impor

Para pelaksana dalam perdagangan ekspor-impor dapat dibagi dalam lima kelompok :²⁷

²⁷ Adhibroto Supriyo. *Letter of Credit Dalam Teori dan Praktek*. Penerbit Dahara Prize.

- 3.1. Kelompok Indentor
- 3.2. Kelompok Importir
- 3.3. Kelompok Promosi
- 3.4. Kelompok Eksportir
- 3.5. Kelompok Pendukung

ad. 3.1. Kelompok Indentor

Apabila kebutuhan atas suatu barang belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka terpaksa diimpor dari luar negeri. Perlu diketahui bahwa tidak semua peminat barang impor melaksanakan impornya sendiri langsung dari luar negeri, tetapi seringkali pelaksanaan impor itu mereka serahkan pada perusahaan yang sudah biasa melaksanakan impor barang yang dibutuhkan itu atau para peminat tersebut menempatkan pesanan kepada importir yang sudah biasa melaksanakan impor barang tersebut. Para indentor ini terdiri dari :²⁸

- 1) para pemakai langsung
- 2) para pedagang
- 3) para pengusaha perkebunan, industriawan dan instansi pemerintah.

²⁸ Amir M.S. 1993. *Import Teori dan Penerapannya*, Seri Umum No. Jakarta : LPPM. hal 6.

Ad.3.2. Kelompok Importir

Para Importir ini terdiri dari :²⁹

a) Pengusaha Impor

Pengusaha impor (*Import Merchant*) adalah badan usaha yang diberi izin oleh pemerintah dalam bentuk TAPPI (Tanda Pengenal Pengakuan Importir) untuk mengimpor barang yang khusus disebut dalam izin tersebut, dan tidak berlaku untuk barang lain di luar yang disebut dalam TAPPI tersebut.

b) *Approved Importir/Approved Traders*

Approved Importir/Approved Traders hanyalah pengusaha impor biasa yang secara khusus diistimewakan oleh pemerintah cq Departemen Perdagangan untuk mengimpor komoditi tertentu untuk tujuan tertentu pula yang dipandang perlu oleh pemerintah.

c) Importir Terbatas

Untuk memudahkan perusahaan-perusahaan yang didirikan dalam rangka UU PMA/PMDN untuk mengimpor mesin-mesin dan bahan baku yang diperlukannya sendiri dan bukan untuk diperdagangkan.

²⁹ Amir MS. *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*. Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressindo. hal. 179.

Ijin ini diberikan dalam bentuk APIT (Angka Pengenal Importir Terbatas), yang dikeluarkan oleh BKPM atas nama Menteri Perdagangan.

d) Importir Umum

Perusahaan Impor yang khusus mengimpor aneka mata dagangan dapat memperoleh kedudukan sebagai importir umum atau lazim disebut General Importir. Perusahaan yang biasanya memperoleh status sebagai importir umum ini adalah perusahaan dagang negara yang lazim disebut *Trading House* atau Wisma Dagang yang mengimpor barang-barang mulai barang kelontong sampai instalasi lengkap suatu pabrik.

e) *Sale Agent Importir*

Perusahaan asing yang berminat memasarkan hasil produksinya di Indonesia seringkali mengangkat perusahaan setempat sebagai kantor perwakilannya atau menunjuk suatu agen tunggal yang akan mengimpor hasil produksinya ke Indonesia.

Ad.3.3. Kelompok Promosi

Masalah perdagangan luar negeri sudah merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari masalah perekonomian nasional. Sehubungan dengan masalah impor

maupun ekspor tidak lagi terbatas pada masalah pemerintah dan masyarakat umumnya.

Merosotnya devisa dari minyak bumi telah memaksa kita untuk menengok kembali pada sumber devisa non migas yang terdiri dari hasil industri, komoditi tradisional dan pariwisata yang memerlukan penjagaan, rintisan dan promosi di luar negeri, yang dilakukan oleh para eksportir sendiri, badan-badan khusus dan juga aparat pemerintah.

Kelompok promosi ini terdiri dari :³⁰

1. Kantor perwakilan dari produsen/eksportir asing di negara konsumen/importir.
2. Kantor perwakilan Kamar Dagang dan Industri yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri.
3. Misi perdagangan dan pemasaran internasional trade fair yang diadakan di pusat perdagangan dunia.
4. Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), suatu instansi yang khusus didirikan Departemen Perdagangan untuk melakukan kegiatan pengembangan dan promosi komoditi Indonesia keluar negeri, serta badan-badan usaha seperti Indonesia *Trade Centre* yang didirikan di luar negeri.
5. Kantor Bank Devisa di dalam maupun di luar negeri .

³⁰ Roselyne Hutabarat. 1992. *Transaksi Ekspor-Impor*. Jakarta. Penerbit Erlangga. Hal. 5.

6. Atase perdagangan dan *Trade Comisioner* maupun bagian ekonomi dari tiap kedutaan di luar negeri.
7. Majalah Dagang dan Industri / *Trade Directories* termasuk lembaran kuning buku petunjuk telepon merupakan sarana promosi yang lazim.
8. Brosur dan leaflet yang dibuat oleh masing-masing pengusaha ekspor termasuk *price list*.

ad.3.4. Kelompok Eksportir

Pada umumnya eksportir terdiri dari :³¹

a. Produsen eksportir

Produsen eksportir adalah produsen yang sebagian hasil produksinya memang diperuntukkan untuk pasar luar negeri, yang ekspornya diurus sendiri oleh produsen bersangkutan. Produsen ini disebut produsen eksportir.

b. *Confirming House*

Confirming house adalah perusahaan lokal yang didirikan sesuai dengan perundang-undangan hukum setempat tetapi bekerja untuk dan atas perintah kantor induknya yang berada di luar negeri.

³¹ Sardjono Brotodiningrat. 1990. *Perkembangan L/C*. Makalah Pada Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Perdata/Dagang. Kerjasama Fakultas Hukum UGM Konsorsium Ilmu Hukum, Yogyakarta, 12 – 13 Maret 1999, hal 3.

c. Pedagang Ekspor (*Export Merchant*)

Pedagang ekspor adalah badan hukum yang diberi izin oleh pemerintah dalam bentuk surat pengakuan eksportir dan diberi kartu Angka Pengenal Ekspor dan diperkenankan melakukan ekspor komoditi yang dicantumkan dalam surat pengakuan itu, bila *Confirming House* bekerja atas perintah dan untuk kepentingan konsumen yaitu kantor induknya sendiri yang ada di luar negeri, maka *export merchant* lebih banyak bekerja untuk dan atas kepentingan dari produsen dalam negeri yang diwakilinya.

d. Agen Ekspor (*Export Agent*)

Bilamana hubungan antara *Expor Merchant* dengan produsen tidak hanya sebagai rekanan biasa, tetapi sudah meningkat dengan suatu ikatan perjanjian keagenan, maka dalam hal ini *Export Merchant* disebut juga *Export Agent*.

e. Wisma Dagang (*Trading House*)

Wisma Dagang/*Trading House* adalah suatu perusahaan ekspor impor yang besar yang dapat melaksanakan impor dan ekspor aneka komoditi dan mempunyai jaringan pemasaran dan kantor perwakilan di pusat perdagangan dunia. Perusahaan tersebut memperoleh

fasilitas tertentu dari pemerintah baik dalam bentuk fasilitas perbankan maupun dalam bidang perpajakan.

Ad.3.5. Kelompok Pendukung

Disamping eksportir dan importir sebagai pelaksana utama dalam perdagangan luar negeri, terdapat badan usaha lain yang mempunyai peranan penting dalam menunjang dan menjamin pelaksanaan impor maupun ekspor secara keseluruhan. Kelompok penunjang/ pendukung ini terdiri atas :³²

a. Bank Devisa

Bank Devisa merupakan kelompok pendukung yang memberikan jasa perkreditan, baik dalam bentuk kredit ekspor maupun uang muka jaminan-jaminan *L/C* impor. Disamping itu bank devisa juga sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembukaan *L/C* impor, penerimaan *L/C* ekspor, penyampaian dokumen pengapalan dan dalam verifikasi jenis dan isi masing-masing dokumen pengapalan.

b. Badan Usaha Transportasi

Dengan berkembangnya ekspor dan juga dengan adanya perombakan dalam bidang angkutan baik di darat, laut maupun di udara, khususnya dengan

³² Roselyne Hutabarat. Op cit. hal. 3. Sardjono Brotodiningrat. Ibid. hal. 4.

munculnya perpetikemasan (*containerization*), maka muncul usaha jasa baru dalam bidang transportasi yang dikenal dengan *freight forwarder* atau *forwarding agent*. Tugas *freight forwarder* ini lebih luas dari tugas EMKL, EMKU, EMKA (Ekspedisi Muatan Kapal Laut/Udara/Kereta Api) yang kita kenal. Tugas itu dapat meliputi mulai dari pengumpulan muatan, menyelenggarakan pengepakan sampai membukukan muatan aneka barang yang biasa diperdagangkan (*egiotable*).

c. Maskapai Pelayaran

Perusahaan pelayaran masih tetap berada pada tempat terdepan dalam bidang angkutan internasional walaupun angkutan melalui udara dan darat cukup berkembang, baik dalam jasa angkutan penumpang maupun barang.³³

d. Maskapai Asuransi

Resiko atas barang tak mungkin dipikul sendiri oleh para eksportir maupun importir. Dalam hal ini maskapai asuransi memegang peranan penting dalam merumuskan persyaratan kontrak perdagangan internasional yang dapat menjamin resiko yang terkecil dalam tiap transaksi itu.

³³ Amir MS. *Opcit.* hal. 51. Roselyne Hutabarat. *Opcit.* hal. 28.

e. Kantor Perwakilan/Kedutaan

Kantor kedutaan di luar negeri berwenang untuk mengeluarkan dokumen legalitas seperti *Consuler Invoice* yang berfungsi untuk mengawasi dan mensahkan pengapalan suatu barang dari negara tertentu.³⁴

f. Surveyor

Pada umumnya importir dan eksportir berada pada jarak yang berjauhan. Hal ini menyebabkan kurang dapat diketahuinya bonafiditas dan integritas dari masing-masing pihak. Oleh karena itu diperlukan pihak ketiga yang netral dan obyektif untuk dapat memberikan kesaksian atas mutu, keaslian, kondisi, harga, nomor pos CCCN serta tarif bea dari komoditi atau produk yang diperdagangkan. Selain itu surveyor telah dimanfaatkan pula oleh pemerintah untuk mengamankan bea masuk impor maupun sertifikat ekspor.³⁵

g. Pabean

Pabean merupakan alat pemerintah yang berfungsi sebagai pengawas lalu lintas komoditi internasional,

³⁴ Sardjono Brotodiningrat. Ibid. hal. 4.

³⁵ Sardjono Brotodiningrat. Ibid. hal. 4.

mengamankan pemasukan keuangan negara serta
memperlancar arus barang dan penumpang.

4. Jenis-jenis Dokumen Dan Fungsi Dokumen Dalam Perdagangan Ekspor-Import

Dokumen-dokumen dalam perdagangan luar negeri (ekspor-
import) pada dasarnya dapat dibedakan dan dimasukkan dalam
kelompok berikut :³⁶

4.1. Dokumen Induk

Dokumen induk merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh
Badan Pelaksana Utama Perdagangan Internasional yang
fungsinya sebagai alat pembuktian realisasi suatu transaksi,
yang meliputi :

1) Faktur Perdagangan

Faktur perdagangan adalah suatu nota perhitungan yang
dibuat dan dikeluarkan oleh eksportir untuk importir yang
terutama berisi tentang :

- a) Jumlah barang (*quantity*);
- b) Harga satuan (*unit price*);
- c) Harga total (*total price*);
- d) Perhitungan pembayaran (*payment breakdown*).

³⁶ Amir. M.S. 1996. *Ekspor Import Teori Dan Penerapannya*. Jakarta : PT. Pustaka
Binaman Pressindo. hal 35.

Faktur tersebut berfungsi sebagai alat bukti perhitungan atas suatu transaksi yang dilakukan antara eksportir dengan Importir.

2) *Letter of Credit*

Letter of Credit ialah suatu surat kredit yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir, yang memberi hak kepada eksportir untuk menarik wesel atas importir bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat kredit itu.

3) *Bill of Lading*

Merupakan surat tanda terima penyerahan barang yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran sebagai tanda bukti pemilikan atas barang yang telah dimuat di atas kapal laut oleh eksportir untuk diserahkan kepada importir. B/L merupakan alat bukti penerimaan dan sekaligus penyerahan hak milik atas barang sebagai pelaksanaan suatu transaksi antara eksportir dengan importir. B/L juga merupakan alat bukti adanya kontrak pengangkutan antara *shipper* dengan perusahaan pelayaran.

Oleh FDC Sudjatmiko disebutkan bahwa dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pengiriman barang dari satu negara ke negara lain dinamakan dokumen pengapalan atau

shipping documents (diantaranya Bill of Lading) yang mempunyai beberapa fungsi yaitu :³⁷

- a. Melindungi muatan sejak dipersiapkan untuk dimuat ke dalam kapal di pelabuhan pembuatannya sampai muatan diserahkan kepada pemiliknya atau mereka yang berhak atas penerimaan barang di pelabuhan tujuan.
- b. Menyatakan hak milik atas barang yang diangkut oleh kapal serta hak-hak lain yang timbul sebagai akibat dari pengangkutan.

4) Polis Asuransi

Merupakan surat bukti pertanggungan yang dikeluarkan oleh maskapai asuransi atas permintaan eksportir maupun importir untuk menjamin keselamatan barang yang dikirim dari segala resiko bencana dan kerusakan, dengan membayar premi. Polis asuransi merupakan bukti pertanggungan atas barang yang dimaksud sebagai pelaksanaan suatu transaksi antara eksportir dengan importir.

Beberapa hal yang perlu untuk diketahui dalam penutupan asuransi adalah :³⁸

³⁷ FDCSujatmiki. 1979. **Pokok-pokok Pelayaran Negara**. Jakarta : Barata .hal. 72.

³⁸ Ruddy Tri Santoso. 1994. **Pembiayaan Transaksi Luar Negeri**. Yogyakarta : Andi Offset. hal 38.

- Jenis valuta antara polis asuransi harus sama dengan jenis valuta pada *L/C* (umumnya asuransi ditutup dengan mata uang \$ US).
- Penutupan asuransi dihitung sejak tanggal pengapalan terakhir (polis yang bertanggal sesudah tanggal pengapalan berakhir dapat ditolak oleh bank).
- Minimum jumlah harga penutupan asuransi adalah 110% dan harga CIF atau *CIP* (*Cost Insurance Paid*).
- Jenis penutupan asuransi harus ditegaskan.
- Memuat data-data yang konsisten dengan dokumen pengapalan lainnya.
- Ditandatangani oleh maskapai asuransi dengan materai secukupnya.

4.2. Dokumen Penunjang

Dokumen penunjang ialah dokumen yang dikeluarkan untuk memperkuat atau memerinci keterangan yang terdapat dalam dokumen induk terutama faktur perdagangan yang meliputi :³⁹

a) *Packing List* (daftar pengepakan)

Adalah daftar yang berisi perincian lengkap mengenai jenis dan jumlah satuan dari barang yang terdapat dalam tiap peti atau total keseluruhannya sama dengan jenis dan jumlah

³⁹ Agoes Moejono. 1993. **Melangkah Menuju Ekspor Suatu Petunjuk Praktis**. LPPI. Institut Bankir Indonesia. hal 23.)

yang tercantum dalam faktur perdagangan. *Packing list* penting sekali untuk barang yang tidak sejenis.

b) *Weight Note*

Merupakan pernyataan yang berisi perincian berat dari tiap peti/kemasan yang biasanya menyebutkan berat kotor dan berat bersih dari tiap kemasan itu dan dihipunk menjadi satu daftar yang total keseluruhannya sama dengan total berat bersih yang tercantum dalam faktur perdagangan. *Weight Note* penting artinya bagi barang yang harganya didasarkan pada beratnya dan penting untuk menyediakan alat bongkat muat maupun alat angkut yang sesuai dengan berat tiap kemasan itu.

c) *Measurement List* (daftar kubikasi)

Adalah daftar yang berisi ukuran dan takaran dari tiap peti/kemasan yang biasanya menyebutkan volume dan kubikasi dari tiap kemasan. Daftar isi total keseluruhannya sama dengan total volume yang tercantum dalam faktur perdagangan. *Measurement list* penting artinya untuk barang yang didasarkan pada volumenya dan untuk menyediakan alat bongkat muat dan alat-alat angkut yang sesuai.

d) *Inspection Certification/Surveyor Report*

Merupakan pernyataan yang berisi keterangan mengenai mutu barang, jenis, jumlah, harga dan keterangan lain yang dibutuhkan yang dikeluarkan oleh suatu badan jasa yang independen atas permintaan eksportir maupun instansi yang memerlukan. *Inspection* penting untuk penilaian secara menyeluruh suatu barang dalam suatu transaksi.

e) *Chemical Analysis*

Adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh laboratorium kimia dari perusahaan sendiri, atau dari badan penelitian yang independen yang berisi komposisi kimiawi dari suatu barang. *Chemical Analysis* ini penting artinya untuk menentukan mutu dari produk kimia.

f) *Test Certificate*

lalah suatu pernyataan yang dibuat oleh laboratorium perusahaan atau badan penelitian yang independen yang menyatakan hasil uji coba atas suatu barang atau peralatan mengenai kekuatan, data tahan, kapasitas dan konstruksinya. *Test Certificate* ini dipergunakan untuk menahan beban seperti kemasan, alat angkut, mesin industri dan sebagainya.

g) *Manufactur's Certificate*

Adalah surat pernyataan pernyataan yang dibuat oleh produsen yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah hasil produksinya yang membawa merk dagangnya (*Trade Mark*). *Manufactur's Certificate* penting artinya sebagai bukti keaslian dan jaminan mutu atas barang, yang dikaitkan dengan nama baik dari produsen itu dalam pasaran internasional yang juga menyangkut patent, trade mark dan lisensi.

h) *Certificate of Origin* (surat keterangan negara asal)

Adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, biasanya Kamar Dagang (*Chamber of Commerces*), yang menyebutkan negara asal suatu barang. *Certificate of Origin* ini penting artinya untuk memperoleh fasilitas bea masuk maupun sebagai alat penghitung quota di negara tujuan, atau untuk mencegah barang dari negara yang terlarang.⁴⁰

4.3. Dokumen Pembantu

Yang dimaksud dokumen pembantu ialah dokumen yang diperlukan untuk membantu para pelaksana perdagangan luar

⁴⁰ Hartono Hadisoeparto. 1984. *Kredit Berdokumen (Letter of Credit) Cara Pembangunan Dalam Jual Beli Perniagaan*. Yogyakarta. Liberty. Hal. 82.

negeri dalam menjalankan tugas *follow up* (tugas lanjutan) yang meliputi :⁴¹

a) Instruction Manual

ialah keterangan terperinci mengenai tata cara dan tata kerja suatu alat, termasuk uraian mengenai *manufacturing process* (proses produksi) dari suatu komoditi. *Instruction Manual* ini penting artinya untuk memudahkan operator dalam mempergunakan suatu alat dalam menemukan kelainan/ kerusakan suatu alat, sehingga sangat berguna dalam upaya reparasi.

b) Layout Schema

Merupakan gambar denah tata letak mesin dalam pabrik yang susunannya disesuaikan dengan urutan proses produksi dan bertujuan untuk memperoleh efisiensi dan produktivitas yang optimal pada saat pemasangan masing-masing dilakukan dalam arena pabrik.

c) Brochuer atau Leaflet

Merupakan buku kecil yang berisi keterangan singkat mengenai suatu produk yang bertujuan memberikan informasi kepada konsumen tentang produk tersebut. *Brochure/*

⁴¹ Saadualin Ibrahim dan Parnoto Kartoadmodjo. 1984. *Ekspor Dengan Syarat Pembayaran L/C Berjangka*. Jakarta : Jaya Persada. Hal. 33.

leaflet ini penting artinya bagi salesman untuk memudahkan pada saat melakukan pemasaran.

5. Cara Pembayaran Dalam Perdagangan Ekspor-Import

Pembayaran mengandung arti sebagai setiap pelaksanaan atau pemenuhan perjanjian secara sukarela, misalnya pembayaran sejumlah uang, melaksanakan pekerjaan oleh seorang buruh dan lain sebagainya. Dalam perjanjian jual beli, pembayaran yang harus dilakukan oleh seorang pembeli harus berupa sejumlah uang tertentu; sebab kalau tidak berupa sejumlah uang tertentu maka perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian jual beli lagi, melainkan merupakan perjanjian jenis lain, misalnya tukar menukar dan sebagainya.⁴²

Dalam membicarakan tentang pembayaran, sebenarnya tidak dapat terlepas dari persoalan yang menyangkut tentang apa maksud dan tujuan pembayaran itu dilakukan. Hal ini adalah logis karena pembayaran itu sendiri tidak lain merupakan suatu kewajiban yang timbul sebagai akibat dari suatu usaha yang dilakukan sebelumnya.

Hubungan pembayaran luar negeri (*Foreign Payment Relation*) diperlukan dalam penyelesaian lalu lintas bayar membayar antara para pihak yang mengadakan usaha (perdagangan) dimana mereka masing-masing berada di negara yang berlainan. Suatu

⁴² Hartono Hadisoeparto. 1984. *Kredit Berdokumen*. Yogyakarta : Liberty. hal. 16.

hubungan pembayaran luar negeri pada hakekatnya diperlukan dalam penyelesaian transaksi-transaksi perdagangan internasional yang meliputi transaksi ekspor-import baik barang maupun jasa.

Oleh karena itu dilihat dari sudut resultatnya suatu perdagangan luar negeri baru akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila hubungan pembayarannya dapat diselenggarakan dengan baik pula, secara *a contratio* suatu hubungan pembayaran luar negeri baru ada setelah adanya transaksi perdagangan dengan luar negeri (*payment flows the trade*).⁴³

Dari segi teknisnya, pembayaran dalam perdagangan luar negeri dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain :⁴⁴

- a. Pembayaran di muka (*advance payment*)
- b. Wesel inkaso (*collection draft*) dengan kondisi *Documents againts payment (D/P)* dan *Documents againts Acceptance (D/A)*.
- c. Perhitungan kemudian (*open account*).
- d. Konsinyasi
- e. Letter of Credit (*L/C*)

Ad.a. Pembayaran di muka (*Advance Payment*)

Pembayaran di muka (*Advance Payment*) merupakan pembayaran yang dilakukan oleh importir kepada eksportir

⁴³ Soepriyo Adhibroto. *Letter Of Credit Dalam Teori Dan Praktek*. Semarang : Dahara Prize. Hal 14.

⁴⁴ Soepriyo Adhibroto. *Ibid* hal 15.

sebelum barang dikapalkan, baik untuk seluruh nilai barang (*full payment*) maupun untuk sebagian (*partial payment*) tanpa menggunakan *L/C*.

Kesepakatan perihal cara pembayaran ini dicantumkan dalam kontrak jual beli (*sales contract*) antara kedua pihak, atau dalam surat pesanan (*order*) yang diterima eksportir dari importir. Pembayaran di muka ini dapat dilakukan melalui bank devisa atau langsung kepada eksportir. Adapun caranya dapat dilakukan dengan transfer, payment order, cek, wesel dan sebagainya. sedangkan dokumen pengapalan dan dokumen-dokumen lainnya pada umumnya dikirim langsung eksportir kepada importir.

Jika pembayaran di muka itu untuk seluruh nilai barang, berarti eksportir telah menerima pembayaran penuh sebelum barang dikirimkan kepada importir. Dengan demikian pada hakekatnya importir memberikan kredit kepada eksportir. Ditinjau dari segi pembiayaan, pembayaran untuk seluruh nilai barang ini adalah paling menguntungkan eksportir dan kebalikannya bagi importir.⁴⁵ Biasanya cara pembayaran seperti ini hanya dilakukan untuk transaksi yang nilainya tidak besar, atau jika pembeli (importir) sangat percaya kepada penjual (eksportir), atau apabila pembeli sangat membutuhkan barang itu sedangkan pilihan lain tidak ada. Untuk transaksi berdasarkan pembayaran di muka yang nilainya

⁴⁵ Aryani Witasari. Opcit. Hal. 35.

besar, kemungkinan importir akan minta garansi bank dari eksportir sebagai jaminan bahwa atas pembayaran yang telah dilakukannya, importir akan benar-benar menerima barang yang dipesan.

Ad.b. Wesel Inkaso (*Collection Draft*)

Yang dimaksud dengan cara pembayaran wesel inkaso (*collection draft*) adalah suatu cara penagihan pembayaran yang dilakukan dengan pengiriman dokumen-dokumen baik financial documents maupun commercial documents dari eksportir kepada importir melalui bank. Sistem pembayaran collection ini ada dua jenis, yaitu :⁴⁶

- a. *Documentary Collection*, yaitu penagihan dilakukan melalui pengiriman dokumen baik yang berupa financial disertai commercial documents ataupun hanya commercial documents saja oleh eksportir kepada importir dengan mempergunakan jasa bank.
- b. *Clean Collection*, yaitu penagihan dilakukan hanya dengan pengiriman dengan mempergunakan jasa bank.

Untuk kedua jenis collection tersebut di atas, eksportir dapat meminta kepada bank yang menyalurkan dokumen-dokumen tersebut kepada importir atas dasar pembayaran :

⁴⁶ Hartono Hadisoeperto. Ibid hal 19.

- a. Pembayaran tunai (*D/P = documents againts payment*) yaitu penyerahan dokumen kepada importir baru dilakukan apabila importir telah membayar.
- b. Akseptasi atas wesel atau promes (*D/A = document againts acceptance*), yaitu penyerahan dokumen kepada importir apabila importir telah mengakseptasi wesel atau promes tersebut.

Ad.c. Perhitungan Kemudian (*Open Account*)

Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem Advance Payment. Dikatakan demikian karena pembeli akan membayar apabila penjual (importir) telah mengirim barang-barang tersebut. Pembayaran dengan cara ini membawa kerugian bagi eksportir dalam hal :⁴⁷

- a. Tidak terbayarnya barang setelah tiba atau disepakati untuk dibayar.
- b. Pembayaran yang tidak sesuai dengan harga barang/ kesepakatan atau terjadinya penundaan pembayaran.

Keuntungan yang diperoleh dalam hal ini tentu dari pihak importir karena cenderung telah diterima sebelum dibayar.

⁴⁷ Aryani Witasari. 1995. *Letter od Credit (L/C) Sebagai Alternatif Pilihan Dalam Perdagangan Luar Negeri*. Majalah Hukum Kaligawe Edisi 5/Th. III?Pebruari 1995. hal 36.

Ad.d. Konsinyasi

Yang dimaksud dengan *cosignment* (konsinyasi) adalah pengiriman barang ekspor kepada eksportir di luar negeri dimana barang-barang tersebut dikirim oleh eksportir sebagai titipan untuk dijualkan oleh importir yang merupakan agen dari eksportir dengan harga yang sudah ditetapkan oleh eksportir. Setelah terjual maka pembayaran akan dilaksanakan. Seberapa kerugian yang bisa dialami oleh eksportir dengan sistem pembayaran ini adalah sebagai berikut :⁴⁸

- a. Modal terlalu lama tertimbun pada barang yang diperdagangkan.
- b. Tidak ada kepastian eksportir akan menerima pembayaran.
- c. Eksportir dapat menjadi beban kenakalan importir.
- d. Bila importir tidak membayar maka tidak ada bukti yang diperoleh oleh eksportir untuk menuntut importir di pengadilan sebaliknya keuntungan ada pada pihak importir.

Ad.e. Letter of Credit (L/C)

Letter of Credit merupakan suatu alat yang dikeluarkan oleh bank (Bank Penerbit) untuk kepentingan eksportir (beneficiary) atas nama pembeli (Pemohon), sedangkan bank penerbit sanggup membayar kepada beneficiary melalui bank di negara beneficiary sejumlah uang tertentu, apabila ada penyebaran dokumen-dokumen.

⁴⁸ Aryani Witasari. Ibid hal 38.

Sistim pembayaran dengan *L/C* merupakan sistem yang paling sering dipergunakan, sebab sistim ini merupakan suatu cara yang aman bagi eksportir. Kepastian bahwa pembayaran akan dilakukan oleh Bank kepada eksportir apabila eksportir dapat menyerahkan dokumen-dokumen yang telah diperjanjikan.⁴⁹

6. Fungsi Dokumen Dalam Perdagangan Ekspor-Import

Dokumen yang digunakan dalam perdagangan ekspor-import adalah :⁵⁰

6.1. *Commercial Invoice*

6.2. *Transport Documents*, yang meliputi :

6.2.1. *Bill of Lading*

6.2.2. *Good Receipt*

6.2.3. *Mate's Receipt*

6.2.4. *Air Waybill*

6.3. *Draft (Wesel)*

6.4. *Insurance Documents*

6.5. *Other Documents*

⁴⁹ Sudjono Briotodiningrat. *Op cit* hal. 8.

⁵⁰ Ruddy Tri Santoso. 1993. *Pembiayaan Transaksi Luar Negeri*. Yogyakarta : Penerbit Andi Offset hal. 25.

ad.6.1. Commercial Invoices

Commercial Invoices tersebut berisi diskripsi lengkap dari barang yang telah disepakati dalam Sales Contract. Commercial Invoices dibuat atas nama Importir kecuali jika ditentukan lain. Commercial invoices juga memuat informasi antara lain : tanggal invoices, nama dan alamat buyer maupun seller, nomor kontrak/order, harga satuan, total harga dan kondisi (FOB, C&F, CIF), jumlah dan uraian barang, shipping marks, data-data mengenai pengangkutan dan lain-lain.

ad.6.2. Transport Documents

Transport documents diterbitkan sebagai bukti bahwa barang yang telah dimuat dan diangkut tiba dengan selamat di tempat tujuan (pelabuhan laut maupun udara) sesuai yang dinyatakan dalam *L/C*. Sarana pengangkutan komoditas ekspor tersebut dapat melalui laut/samudera atau udara. Jika melalui laut maka transport documents yang disertakan adalah dalam bentuk :

- *Bill of lading*;
- *Good receipt*, atau
- *Mate receipt*.

Selanjutnya jika melalui udara, maka transport documents yang disertakan adalah dalam bentuk : *air waybill*.

Ad.6.3. Draft (Wesel)

Wesel adalah surat perintah pembayaran tertulis tanpa syarat kepada pihak tertentu untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebutkan dalam wesel tersebut. Dalam transaksi ekspor, wesel ditandatangani oleh beneficiary sebagai sarana untuk menagih pembayaran kepada bank (buyer) di luar negeri. Wesel ini biasa disebut dengan wesel ekspor. Jika dilihat dari sudut pembayarannya, maka wesel (draft) dibedakan antara :

- *Sight draft*, bila draft uang diajukan segera dapat dibayar, dan
- *Usance draft*, bila pembayaran wesel dilakukan setelah tanggal jatuh tempo (30, 90 atau 120 hari) setelah wesel ditunjukkan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wesel adalah :

- Nominal wesel yang tertulis dengan angka harus sama dengan yang tertulis dalam huruf.
- Bermaterai cukup.
- Tanggap pada materai harus sama dengan tanggal penarikan.
- Wesel dapat berupa sight draft atau usance draft.
- Dapat dilakukan endorsemen karena merupakan surat atas Order.
- Bila berupa usance draft maka perlu dilakukan akseptasi.

Ad.6.4. Insurance Documents (Dokumen Asuransi)

Dokumen asuransi pengangkutan laut atau marine insurance sering diminta pembeli/importir sebagai syarat pembayaran di samping commercial invoice dan bill of lading/transport document. Dalam Uniform Customs and Practice for Documentary credit (UCP) yang mengatur tentang dokumen-dokumen asuransi yang dibutuhkan oleh bank ternyata tidak terdapat satu pasalpun yang menyebutkan secara tegas bahwa dokumen asuransi dimaksud haruslah polis asuransi.⁵¹

Meskipun demikian menurut hemat kami yang dimaksudkan Insurance Documents, tentunya adalah polis, sebab surat bukti untuk penutupan asuransi pada umumnya hanyalah polis (pasal 255 KUHD).

Di dalam "Recognizing and handling documents" yang diterbitkan oleh Bank Negara Indonesia 1946, dikatakan :⁵²

"Dokumen asuransi dapat berbentuk polis *sertificaat*. Bila berbentuk polis dan *sertificaat*. Bila berbentuk polis, maka dokumen tersebut, berisikan lengkap, semua ketentuan-ketentuan maskapai tersebut, demikian pula syarat-syarat pertanggungan dari masing-masing clausula dari risiko pertanggungan. *Certificaat of insurance* berbentuk keringkasan daripada polis (*abbreviated insurance pol* = polis yang diperingkas/ dipersingkat). *Certificaat* ini hanya berisikan *conditie-conditie* daripada risiko yang dipertanggungan.

⁵¹ Soepriyo Andhibroto. 1989. *Letter Of Credit Dalam Teori & Praktek*. Semarang : Dahara Prize, hal 196.

⁵² Hartono Hadisoepipto. 1984. *Kredit Berdokumen (Letter of Credit) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan*. Yogyakarta : Liberty, hal 78.

Dengan demikian jika yang dipergunakan sebagai dokumen di dalam L/C itu polis, maka cara pembuatan polis harus lengkap, tentunya minimal harus berisi ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 256 KUHD juncto pasal 592 KUHD. Sedang kalau yang digunakan sertifikat boleh dibuat secara singkat/ringkas.

Hal-hal yang perlu diperhatikan terhadap dokumen asuransi di dalam L/C sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam UCP 1993, antara lain :

- a. Tentang pihak yang dapat mengeluarkan dokumen asuransi.

Dokumen asuransi harus diterbitkan atau ditandatangani oleh pejabat perusahaan asuransi atau perusahaan penjamin (underwriter).

- b. Tentang tanggal pembuatan dokumen asuransi.

Tanggal pembuatan dokumen asuransi, yang dimaksudkan ialah tanggal sah kapan penanggung mulai bertanggung jawab atas resiko yang diperalihkan kepadanya. Apabila tanggal pada dokumen asuransi dibuat kemudian dari pada tanggal pengapalan atau pemberangkatan barang (tanggal pada B/L). Bank akan menolaknya. Ratio dari persyaratan ini ialah bahwa apabila tanggal dokumen asuransi lebih kemudian dari tanggal pengapalan barang sebagaimana disebutkan di dalam B/L nya, berarti sejak tanggal pengapalan sebagaimana tersebut pada B/L sampai tanggal asuransi, timbul suatu waktu yang vacuum, artinya

barang yang dikapalkan itu tidak asuransinya, sehingga apabila terjadi kerusakan atau kerugian atas barang-barang tersebut tidak dijamin penggantianannya oleh pihak penanggung. Oleh karena itu senantiasa disyaratkan, bahwa tanggal dokumen asuransi harus lebih dahulu daripada tanggal B/L, sehingga keadaan vacuum itu dapat dihindarkan.

c. Jumlah asuransi/pertanggungan yang ditutup

Jumlah asuransi/pertanggungan ialah suatu jumlah uang dengan nama seorang penanggung akan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada seorang tertanggung apabila kerugian yang disebabkan evenement benar-benar terjadi, dalam hal ini H.M.N. Purwosutjipto mengatakan sebagai berikut :

“Jumlah pertanggungan, yakni jumlah maksimum uang sebagai batasan tertinggi dari kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian kepada tertanggung”

Dalam kaitannya dengan dokumen asuransi dalam *L/C* pada article 34 UCP 1993 ditentukan bahwa jumlah asuransi dalam dokumen asuransi harus dinyatakan dalam mata yang sama seperti kredit itu. Hal ini dimaksudkan agar jika barang-barang yang diasuransikan sebagaimana dimaksud dalam *L/C* benar-benar mengalami kerusakan atau musnah, maka pihak Issuing bank akan mendapat ganti rugi yang sama dengan nilai *L/C* yang menjadi kewajibannya untuk membayar.

d. Risiko-risiko yang diasuransikan

Dalam article 35 UCP 1993 ditentukan bahwa kredit harus secara jelas menyatakan jenis asuransi yang diminta serta risiko-risiko tambahan bila hal itu ada.

Ad. 6.5. Other Documents

Other Documents adalah dokumen yang tidak diminta dan dokumen yang diminta berkenaan dengan jenis komoditas ekspor yang dikirim dan merupakan dokumen yang digunakan oleh importir untuk mengontrol barang yang dikirim oleh eksportir kepadanya.

Dokumen-dokumen tersebut antara lain :

1. *Certificate of origin*
2. *Certificate of inspection*
3. *Certificate of weight (weight list)*
4. *Packing list*
5. *Laporan pemeriksaan surveyor (LPS)*

B. TINJAUAN UMUM LETTER OF CREDIT

1. Sejarah Perkembangan Letter of Credit

Letter of Credit sebagai sistem pembayaran dalam transaksi perdagangan mulai kapan dipergunakan, tidak dapat dinyatakan

dengan pasti.⁵³ Meskipun demikian sudah dapat diduga bahwa cara pembayaran ini, dalam salah satu bentuknya telah dipergunakan orang pada masa ramainya perdagangan di Romawi dan Lombardia tatkala negara-negara tersebut memegang peranan dalam perdagangan dunia.

Perkembangan dari bentuk yang sederhana sampai menjadi bentuk kredit yang modern dimulai kira-kira pada abad ke-17 dan di negara Inggrislah kredit dokumenter ini berkembang menjadi bentuknya seperti yang sekarang. Sebelum tahun 1914 London telah menguasai monopoli dalam bidang lalu lintas perdagangan luar negeri. Kota ini telah memiliki pula pasar uang dan model yang telah maju dan sangat luas. Selain daripada itu para bankir di London memiliki pengalaman-pengalaman yang luas dalam bidang pembiayaan internasional, sehingga mereka mendapatkan kepercayaan dari seluruh dunia. Posisi yang sedemikian baik ini telah mengakibatkan mata uang *Poundsterling* dapat diterima di negara manapun dan menjadilah valuta dunia.⁵⁴

Selanjutnya dengan pecahnya Perang Dunia I ternyata membawa akibat perubahan keadaan secara radikal. Sebagai akibat dari hasil penjualan senjata, Amerika Serikat telah mengalami jaman keemasan dan segera dapat menarik sebagian besar dari lalu lintas

⁵³ Soepriyo Andhibroto. 1987. *Letter of Credit Dalam Teori Dan Struktur*. Semarang : Prize hal.30.

⁵⁴ Soepriyo Andhibroto. Opcit.hal. 31.

keuangan dunia. Dengan diterimanya *Federal Reserve Act* pada tahun 1914 pasar diskonto di New York semakin berkembang dan akhirnya New York menjadi pusat keuangan dunia menggeser kedudukan London.⁵⁵

Akibat lain daripada Perang Dunia I yang menyangkut perkembangan dalam penggunaan kredit dokumenter adalah jika sebelum 1914 perdagangan didasarkan atas saling percaya mempercayai, dimana pada waktu itu para supplier tidak perlu khawatir apabila mereka segera mengapalkan barang-barang yang dipesan oleh importirnya walaupun pembayarannya baru diterima kemudian. Namun sesudah Perang Dunia I berakhir cara pembayaran berdasarkan kepercayaan ternyata tidak dapat dipertahankan lagi.

Adanya unsur risiko bagi eksportir dan importir tersebut telah mendorong mereka untuk menempuh cara-cara yang termuat dalam *documentary credit*. Sehingga kemudian membawa *documentary credit* sebagai alat pembayaran kepada suatu kemajuan dan perkembangan yang amat pesat dengan keuntungan-keuntungan yang dapat dinikmati oleh eksportir dan Importir.

Guna menyeragamkan istilah-istilah yang dipakai dalam *documentary letter of credit*, di Amerika Serikat telah diadakan

⁵⁵ Moerdjono. Jamal Wiwaho. *Transaksi Perdagangan Luar Negeri Documentary Credit dan Devisa*. Yogyakarta : Libertyu. hal

musyawarah pada tahun 1919 yang disebut *American Foreign Trade Definition*. Pada tahun 1920 diadakan *New York Bankers Commercial Credit Conference* yang menghasilkan *Regulation Effecting Export Commercial credit*.⁵⁶ Pada tahun 1933 Majelis Perdagangan Internasional (*The Council of The International Chamber of Commerce*) telah berhasil mengeluarkan ketentuan yang lebih sempurna yang disebut *Internatuional Reglement*. Pada tahun 1951 *International Reglement* disempurnakan dan menghasilkan *Uniform Customs and Practice for Commercial Documentary Credits*. Revisi tahun 1951 tersebut ditujukan untuk menyesuaikan semua peraturan tahun 1933 dengan perkembangan-perkembangan yang dialami dan yang terjadi di antara tahun 1933 sampai tahun 1951 dalam lalu lintas perdagangan antar negara sehingga peraturan tersebut dipandang dapat menampung kebutuhan-kebutuhan negara peserta.⁵⁷ Walaupun demikian revisi tahun 1951 itu ada sesuatu hal yang masih kurang ialah karena Inggris menolak untuk menjadi peserta dan tunduk peraturan tersebut.

Kemudian pada bulan Nopember 1962 *International Chamber of Commerce* berhasil mengadakan revisi lagi dengan ditandai masuknya Inggris sebagai pesertanya. Pada peraturan tahun 1933

⁵⁶ Moerdjono. Jamal Wiwaho hal. 61.

⁵⁷ Emmy Pengaribuan Simanjuntak. Opcit . hal. 17.

dan 1951 yang menjadi pusat perhatian ialah kedudukan dari Bank. Tetapi dalam revisi tahun 1962 Inggris mengemukakan bahwa tidak hanya kedudukan bank saja yang harus diperhatikan akan tetapi juga kedudukan pihak pembeli.⁵⁸ Adapun dasar alasannya ialah bahwa semua hak dan kewajiban yang timbul dari tindakan pembukuan *L/C* bersumber pada amanat atau kuasa yang diberikan oleh pembeli sebagai *applicant* kepada bank pembuka *L/C* (*issuing bank*).

Setelah Inggris menjadi peserta dengan menganut peraturan tersebut pada revisi 1962, maka teks dari bahasa Perancis secara resmi diganti dalam bahasa Inggris.

Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang pengangkutan (antara lain barang tidak lagi diangkut sebagai barang yang terpisah-pisah tetapi sudah dimasukkan di dalam suatu wadah (*container*)). Syarat-syarat pengangkutan juga sudah berada, sehingga kemudian dibutuhkan dokumen-dokumen pengangkutan yang baru sesuai dengan perkembangan masa itu. Hal ini mendorong untuk meninjau kembali UCP 1962. Pada tahun 1974 dengan *Publication No. 290* yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975 *International Chamber of Commerce* berhasil mengadakan revisi seperlunya. Kemudian pada tahun 1983 oleh *ICC Commission on Banking Technique and Practice* telah berhasil

⁵⁸ Emmy Pengaribuan Simanjuntak. Opcit hal 18. Soepriyo Andhibroto. Ibid hal 34.

mengadakan revisi lagi atas *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* yang terkenal dengan sebutan *1983 Revision ICC Publication No. 400* yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1984 terakhir revisi tahun 1993 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1994 (*UCP 1993 Publication 500*). Langkah selanjutnya ke arah yang lebih dekat dengan *Documentary Letter of Credit* didalam perkembangan cara-cara pembayaran suatu transaksi ialah bahwa bank diberi peranan untuk mengatur pembiayaan suatu transaksi. Semua yang berhubungan pembayaran suatu transaksi kemudian diatur oleh bank, juga mengenai dokumen-dokumen harus diserahkan kepada bank apabila akan mengambil pembayaran pada bank yang bersangkutan. Perkembangan lebih lanjut yang timbul adalah bahwa dari bentuk pihak pembeli yang membuka kredit untuk kepentingan penjual berubah menjadi bentuk bank membuka kredit atas amanat dari pembeli. Pengertian dalam bentuk inilah yang sekarang dijumpai.

2. Pengertian Letter of Credit

Istilah *Letter of Credit* terdapat keanekaragaman dalam penyebutannya. Penyebutan dalam bahasa Belanda adalah *creditbrief*, dalam bahasa Perancis *Lettre de Credit*, di Jerman istilah yang digunakan adalah *Accreditief*, kemudian di Belgia dan Amerika Serikat lebih dikenal sebagai *Credit*.

Dalam buku *Mr. W.L.P.A. Molengraaff Ze deel 1954* cetakan 9 (yang diperbaharui *Zevenbergen*), sebagaimana dikutip Emmy Pangaribuan Simanjuntak menyebutkan bahwa yang dimaksud credit opening disini bukan credit opening di dalam arti sebenarnya (suatu pemberian kredit).⁵⁹

Di dalam *Uniform Customs and Practise for Documentary Credits* (disingkat UCP) 1993, istilah yang digunakan terhadap *letter of credit* disebut dengan *documentary credits*, dalam *article 1* disebutkan bahwa :

The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 1993 Revision, 1993 Revision, ICC Publicaton No. 500, shall apply in all Documentary Credits (including in the extent in which they may be applicable. Standby Letter (s) of Credits where they are incorporated into the text of the credit. They are binding, an all parties there to, unless otherwise expressly stipulated in the Credit.

Kemudian E.P. Ellinger dalam menjelaskan sejarah perkembangan *letter of credit*,⁶⁰ menyebut *documentary credit* sebagai berikut :

"open letter of credit are much older than documentary credits, and since this study is concerned only with documentary credits, the history of open letter of credit will only briefly summarized"

Karena pembayaran atas dasar *L/C* ini dilakukan berdasarkan dokumen, Soepriyo Andhibroto mengatakan bahwa *L/C* yang dibuka sering disebut *Documentary Letter of Credit*, yakni pembayaran *L/C* yang dijamin dengan dokumen.⁶¹

⁵⁹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak. Opcit hal 7.

⁶⁰ E.P. Ellinger. 19709. *Documentary Letters of Credit*. hal 4.

⁶¹ Soepriyo Abndhibroto. 1989. *Letter of Credit*

Selanjutnya Emmy Pangaribuan menyebutkan *letter of credit* sebagai *credit opening* atau pembukaan kredit atau membuka *letter of credit*.⁶²

Bank BNI 1946 menyebutkan "*Letter of Credit*" atau *documentary credit* atau yang lengkapnya dimaksud disini berbunyi *Bankers Commercial Documentary Letter of Credit*.⁶³

Adapun pengertian dari *Letter of Credit* tersebut Zevenbergen dalam buku Emmy Pangaribuan Simanjuntak :⁶⁴

"*L/C* yaitu setiap usaha, apapun ia dinamakan dalam hal mana sebuah bank (bank pembuka) bertindak atas permintaan dan sesuai dengan instruksi dari pihak langganan (pemohon kredit) untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau untuk mengakseptasi atau membeli wesel-wesel yang diterbitkan oleh yang berkepentingan (pihak ketiga), atau menguasai melakukan pembayaran-pembayaran sedemikian yang diaksep atau dibeli oleh bank lain, berdasarkan dokumen-dokumen yang telah ditetapkan yang memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diminta."

Kemudian Art 2 UCP 1993 menyatakan *L/C* sebagai berikut :

"*For the purpose of these Articles, the expressions "Documentary Credit (s) of Credit (hereinafter to as credits), mean any arrangement, however named or described where by a bank (The issuing bank), acting at the request and on the instruction of a customer (the applicant) or on its own behalf, it is to make a payment in or to the of a third party (The Beneficiary)*

Selanjutnya Moerdjono dan Jamal Wiwoho menyatakan :

"*Letter of Credit* adalah suatu surat (yang merupakan suatu perikatan) yang diterbitkan oleh suatu bank atas permintaan/perintah nasabah (importir) atau permohonan surat mana memberikan kuasa untuk membayarkan kepada pihak ketiga (exportir) mengakseptir, menegosir wesel yang ditarik oleh eksportir dan melaksanakan

⁶² Emmy Pangaribuan Simanjuntak. Opcit. hal 4.

⁶³ BNI 1946. **Credit Instruments and its Applianceis**. Tanpa tahun. hal 13.

⁶⁴ Emmy Pangaribuan Simanjuntak. Ibid . hal. 5

pembayaran yang telah dibayar oleh bank lain, sepanjang dokumen-dokumen dan syarat-syarat dalam *L/C* dipenuhi.⁶⁵

Sedangkan Kartono menyatakan :

"*L/C* adalah suatu alat atau surat yang dikeluarkan oleh suatu bank, atas permintaan dan atas beban si pembeli. Dengan *L/C* itu bank tersebut menyetujui, bahwa wesel-wesel tersebut jika memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam *L/C* nya, akan dibayar sebagaimana mestinya dengan akseptansi dan/atau pembayaran, yang terakhir ini bergantung kepada jenis wesel yang ditentukan dalam *L/C*, yaitu apakah wesel-wesel itu adalah "Time Bills of Exchange", atau Bills of Exchange Payable on demand".⁶⁶

Kemudian J.T. Sianipar menyatakan :

"*Letter of Credit (L/C)* adalah suatu persetujuan atau surat perintah untuk membayarkan uang dari seseorang kepada orang lain dengan syarat. Biasanya surat perintah membayar ini datang dari pembeli untuk penjual. Oleh karenanya *L/C* dibuka oleh pembeli untuk penjual, akan tetapi pelaksanaannya diatur dari bank ke bank, yaitu dari bank si pembeli kepada bank si penjual",⁶⁷

Pengertian yang hampir sama tentang *L/C* dikemukakan oleh

Amir yang menyatakan :

"*Letter of Credit* atau biasa disingkat dengan *L/C* adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan dari importir langganan dari bank tersebut yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi diri importir itu, yang memberi hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importir yang bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat itu. Seterusnya bank bersangkutan menjamin untuk mengakseptif atau menghonorir wesel yang ditarik itu asal saja sesuai dan memenuhi semua syarat-syarat itu".⁶⁸

⁶⁵ Moerdjono, Jamal Wiwoho. 1989. *Transaksi Perdagangan Luar Negeri, Documentary Credit & Devisa*. hal 60.

⁶⁶ Kartono. 1980. *Surat Kredit, Konosemen, Wesel, Dokumen-dokumen lainnya*. Hal 9.

⁶⁷ J.T. Sianipar. 1982. *Asuransi Pengangkutan Laut*. Jilid kesatu. hal. 38.

⁶⁸ Amir. *Teknik Perdagangan Luar Negeri*. hal 22.

Dari beberapa pendapat yang menyebutkan pengertian *L/C* tersebut dapat dikatakan bahwa *L/C* adalah merupakan suatu cara pembayaran, dengan dasar-dasar dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk pembayaran kepada eksportir. Hal ini dipertegas oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak yang menyatakan :

"Apabila beneficiary telah menerima *L/C* itu, maka langkah selanjutnya adalah menjadi kewajibannya yaitu mengirim atau mengapalkan barang-barang dan memperoleh semua dokumen-dokumen yang diperlukan untuk itu, terutama yang diminta dalam *L/C*. semua dokumen-dokumen ini adalah menjadi dasar dari adanya realisasi dari *L/C* yaitu pembayaran dan harus ditawarkan kepada bank sebelum hari gugur dari *L/C*. sebelum bank melakukan pembayaran, ia harus meneliti lebih dahulu, apakah dokumen-dokumen itu sesuai yang ditentukan dalam *L/C*".

3. Pengaturan *Letter of Credit*

Bahwa cara pembayaran *L/C* tersebut tentunya harus selalu didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku. Sejauh ini ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan pembayaran dengan membuka *L/C* antara lain :

a. Peraturan Internasional

Peraturan-peraturan internasional tersebut telah berkembang sejak tahun 1933 pada konggres ke-7 dari *the International Chamber of Commerce* (ICC) dan direvisi pada tahun 1951, 1962, 1974, 1983, terakhir tahun 1993.

Uniform Customs 1962 (UC 1962) yang mengalami beberapa revisi pada UC 1974, UC 1983, UC 1993.

Uniform Customs tersebut merupakan peraturan dasar dari *L/C* yang bersifat internasional, sehingga UC tersebut tidak berwenang untuk mengatur persoalan yang menjadi wewenang dalam negeri dari negara yang bersangkutan, terutama mengenai masalah-masalah perdagangan yang erat hubungannya dengan pelaksanaan *L/C*.

b. Hukum Setempat

Selain adanya peraturan dasar dari *L/C* yang bersifat internasional, maka berlaku juga hukum nasional negara yang bersangkutan. Di Indonesia peraturan yang erat hubungannya dengan pembukaan *L/C* antara lain :

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 1964 tentang Lalu Lintas Devisa.
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 tentang Perbankan.
3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa.
4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982.
5. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 27/KP/I/82 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor.
6. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 28/KP/I/82 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor.

7. Lain-lain peraturan yang erat hubungannya dengan pembukaan *L/C*.

4. Pihak-pihak Dalam letter of Credit

Dalam pembukaan suatu *L/C* terdapat beberapa pihak antara lain :⁶⁹

1. Importir sebagai pihak yang langsung berkepentingan atau biasa disebut *Opener*.
2. Bank di dalam negeri sebagai *Opening Bank*, atau lazim disebut *Issuing Bank*.
3. Koresponden Bank di luar negeri yang disebut *Advising Bank* (*Notifying Bank*).
4. Eksportir sebagai penerima *L/C* yang disebut *Beneficiary*.

Importir disini merupakan pemohon pembuatan *L/C* yaitu pihak yang memerintahkan untuk membuka *L/C*. Permohonan pembukaan *L/C* dilakukan oleh pembeli kepada Bank Devisa setelah ditutupnya perjanjian jual beli yang telah diadakan sebelumnya.

Kemudian Bank adalah sebagai pihak perantara dalam pembukaan *L/C*. Banyaknya Bank yang terlibat dalam pembukaan *L/C* tergantung dari kebutuhan akan jasa Bank untuk mempermudah pelaksanaan *L/C*.

Adapun Bank yang dikenal dalam pembukaan *L/C* adalah :

⁶⁹ AK. Zaelani Zein. 1993. *Letter of Credit*. Jakarta : International Operations Series. Lat. 21.

- *Issuing Bank* atau juga disebut *Opening Bank* yaitu Bank yang membuka atau mengeluarkan *L/C* atas dasar perintah dari importir (pembeli).
- *Advising Bank* adalah bank korespondensi *Issuing Bank* di negara penjual yang berkewajiban untuk meneruskan pemberitahuan pembukaan *L/C* kepada eksportir.

Sedangkan Eksportir atau disebut beneficiary adalah pihak yang akan mendapatkan pembayaran atas pembukaan letter of credit dengan memenuhi semua syarat-syarat yang ditentukan di dalam pembukaan *L/C*, sesuai dengan perjanjian jual beli yang ditutup sebelumnya.

5. Bentuk dan Jenis Letter of Credit

5.1. Dilihat dari segi bentuknya

5.1.1. Revocable Letter of Credit

Yang dimaksud dengan *Revocable L/C* adalah *L/C* yang dapat dibatalkan/dirubah setiap saat tanpa persetujuan para pihak. Jenis *revocable L/C* mempunyai suatu tanggal *expiration/habis waktunya* yang tepat sebelum mana dokumen-dokumen itu bisa dinyatakan untuk dinegosiasi. Meskipun begitu, penarikan kembali dari *L/C* ini dapat dilakukan oleh salah satu pihak sebelum, habis berlakunya *L/C* tanpa persetujuan pihak yang lain.⁷⁰

UPT-PUSTAKA-DUNIA

⁷⁰ Hartono Hadisoeparto. Opcit. hal 29.

5.1.2. Irrevocable L/C

Merupakan L/C yang tidak dapat dibatalkan sebelum masa berlakunya L/C lewat. L/C ini hanya dapat dibatalkan apabila ada consent dari semua pihak yaitu pihak pembeli, opening bank, penjual dan advising bank.⁷¹

5.1.3. Irrevocable and Confirmed Letter Of Credit

Yang dimaksud dengan *confirmation of a L/C* adalah surat penegasan dari suatu L/C yang telah dikawatkan, sedangkan confirmed L/C mengandung arti bahwa Bank kedua bertanggung jawab untuk meneruskan L/C/melaksanakan L/C tersebut.

Antara pengertian Irrevocable L/C dengan *Confirmed L/C* itu terdapat adanya perbedaan, sebagai berikut : Irrevocable L/C mempunyai pengertian sebagai suatu L/C yang tidak dapat dibatalkan/dirubah kecuali dengan persetujuan para pihak, sedangkan pada confirmed L/C, maka L/C ini merupakan L/C yang diterbitkan oleh issuing bank dan diperkuat lagi oleh bank lain, yang biasanya berkedudukan di negara penjual; bank lain itu disebut *Confirming Bank*.⁷²

⁷¹ Munir Fuady. 1994. *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek (Buku Kedua)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hal 94.

⁷² Hartono Hadisoeparto. Ibid. hal 34.

5.2. Dilihat dari segi yang mengeluarkan L/C

5.2.1. Bankers L/C

Pada L/C bentuk ini, pihak yang menerbitkannya adalah Bank atas permintaan pengimpor. Karena L/C jenis ini dikeluarkan oleh Bank, maka ada jaminan bagi pihak pengeksport, jaminannya karena banklah yang akan membayar bukan pihak pengeksport, yang mungkin kurang ada kepastian tentang reputasi ataupun cara kerja pembayarannya. Sedangkan bagi pihak pengimpor, dengan bankers L/C, membuat si pengimpor menjadi lebih dipercaya, karena kemampuan dan cara pembayaran telah ditransfer ke pihak bank.⁷³

5.2.2. Merchant L/C

Dalam hal ini bukan bank, tetapi pengimporlah yang mengeluarkan L/C, sedangkan bank hanya meneruskan saja L/C tersebut. Bank karenanya tidak bertanggungjawab atas pelaksanaan pembayaran. Dalam praktek L/C jenis ini dinilai tidak praktis dan sangat jarang dilaksanakannya. Di Indonesia penerbitan L/C jenis ini dilarang oleh Keputusan Menperdag No. 146/KP/V/1997.

5.3. Dilihat dari segi syarat-syaratnya

5.3.1. Documentary Letter of Credit

Pengertian documentary L/C adalah suatu L/C dimana pembayarannya dilakukan dengan penarikan wesel yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain sebagaimana disebut pada syarat-

⁷³ Munir Fuady. Ibid. hal 96.

syarat *L/C*. sehingga di dalam *L/C* ini, dokumen-dokumen merupakan syarat yang penting yang harus dipenuhi oleh penjual/eksportir untuk menerima pembayaran.

5.3.2. Open/Clean Letter of Credit

Yang dimaksud dengan Clean *L/C* adalah bahwa di dalam *L/C* itu tidak dicantumkan syarat lain untuk penarikan wesel, dalam arti tidak diperlukan dokumen-dokumen, bahkan pengambilan credit yang tersedia, si penerima hanya akan menyerahkan tanda terima kuitansi atau bukti lain seperti factur, debet nota, rekening dan lain-lainnya tergantung keinginan dari si pembuka *L/C* dan atau sifat transaksi atau jasa-jasa bersangkutan. Biasanya *L/C* ini dipergunakan untuk pembayaran dalam hal :

- Pembelanjaan sekolah anak-anak / keluarga yang berada di tempat lain.
- Pembayaran langganan majalah, pembelanjaan buku-buku secara teratur dan terus-menerus.
- Pembayaran lain asuransi oleh cabang/perwakilan di lain negeri.
- Jasa-jasa lainnya.⁷⁴

⁷⁴ Hartono Hadisoeparto. Ibid. hal 38-39.

5.4. Dilihat dari cara pembayarannya

5.4.1. Sight Letter of Credit

Dalam hal ini pembayaran *L/C* dilakukan oleh advising bank pada saat wesel-wesel diajukan oleh eksportir, disertai dokumen-dokumen lain yang sesuai dengan syarat-syarat *L/C*.

Yang kemudian menjadi tanggung gugat dari pembayaran transaksi yang bersangkutan adalah pihak atas nama siapa wesel itu diterbitkan, yaitu salah satu pihak dari para pihak sebagai berikut :

- Advising Bank
- Opening Bank
- Bank ketiga (Principal dari bank pembuka *L/C*)
- Pembeli (dalam hal ini dikatakan bahwa wesel diterbitkan atas pihak ketiga)⁷⁵

5.4.2. Usance *L/C*

Pembayaran terhadap *L/C* jenis ini dilakukan dengan advising bank bukan pada saat dokumen diserahkan kepadanya, tetapi pada saat jatuh temponya wesel berjangka. Wesel tersebut biasanya berjangka waktu bervariasi dari 30 sampai 180 hari. Sungguhpun pembayaran *L/C* jenis ini tidak pada saat penyerahan dokumen, tetapi pada saat tersebut pihak eksportir dapat mengajukan permintaan agar *L/C* tersebut didiscount dengan pembayaran didiskonto yang berlaku. Dalam hal yang demikian, importir akan

⁷⁵ Periksa. Ruddy Tri Santoso. 1994. hal. 15.

menerima bersih barang, sedangkan eksportir akan menerima uang tersebut dikurangi bunga yaitu untuk diskonto.⁷⁶

5.5. Dilihat dari segi perjanjiannya

5.5.1. Restricted/Straight Letter of Credit

Yang dimaksud dengan restricted *L/C* yaitu *L/C* yang hanya dapat dinegosiasikan oleh Bank yang disebutkan secara khusus dalam *L/C* tersebut.⁷⁷ Klausula pembatasan negosiasi oleh Bank ini akan dijumpai pada *L/C* yang berbunyi :

"This credit is only available with Bank X atau This credit is restricted to Bank X".

Adanya restricted *L/C* ini mempunyai alasan tertentu yaitu karena adanya hubungan koresponden yang telah mereka jalin diantara kedua Bank itu, disamping itu adalah :

- Untuk memudahkan penagihan pembayaran bagi Bank negotiating.
- Untuk memberikan kepastian pada Bank pembuka bahwa bank yang menegosiasi adalah bank yang mereka kenal.

5.5.2. General Letter of Credit

Dalam hal ini, suatu *L/C* yang telah diteruskan oleh adanya Bank, maka selain advising bank tersebut, bank-bank lain juga boleh menegosiasi *L/C* yang bersangkutan.⁷⁸

⁷⁶ Ruddy Tri Santoso. Ibid. hal. 15.

⁷⁷ Aryani Witasari. Opcit. hal. 42.

⁷⁸ Munawir Fuady. Ibid. hal. 99.

L/C yang bersangkutan harus diteliti dahulu keamanan, kecocokan, dan bonafiditas dari *L/C* dan para pihak dalam *L/C* yang bersangkutan.

6. Proses Pembukaan Letter of Credit

Seseorang yang akan membuka kredit berdokumen harus melalui suatu prosedur. Prosedur yang berhubungan dengan *L/C* itu harus terlebih dahulu dilandasi oleh langkah-langkah yang telah ditentukan oleh eksportir dan importir dalam perjanjian jual beli oleh mereka dalam hal ini dapat dituangkan dalam bentuk Sales Contract. Disana mereka menentukan bahwa pembayaran akan dilakukan melalui pembukaan *L/C*.

Bank yang ditugaskan untuk membuka *L/C* atas perintah importir, dapat ditunjuk pada saat jual beli diadakan, jadi dalam penunjukan tersebut boleh dipilih oleh eksportir. Biasanya importir sebelumnya telah menjadi nasabah dari Bank yang ditunjuknya. Jadi mereka sudah mempunyai hubungan hukum terlebih dahulu, sedang dengan eksportir bank belum tentu mempunyai hubungan hukum sebelum atau dengan kata lain belum menjadi nasabah dari bank yang telah ditunjuk oleh importir. Berikutnya importir mengajukan permohonan kepada Bank Devisanya (Issuing Bank) untuk membuka kredit bagi penjual sejumlah harga barang yang sudah disepakati dalam perjanjian. Setelah bank tersebut memberi suatu

formulir untuk diisi dengan lengkap serta harus ditanda tangani oleh importir.⁷⁹

Formulir itu adalah formulir permohonan membuka kredit atau application form. Didalam formulir itu ditegaskan persyaratan yang dikehendaki oleh L/C, misalnya mengenai jumlah, jenis barang dan sebagainya.

Syarat umum untuk pembukaan *Letter of Credit* antara lain memuat persyaratan :

- a. Adanya janji dari importir untuk membayar kembali kepada Bank bilamana bank melakukan pembayaran lebih dahulu atas dokumen-dokumen yang diserahkan.
- b. Persyaratan bahwa importir akan memberikan dokumen-dokumen dengan dasar hak atas barang-barang kepada bank sebagai jaminan.⁸⁰

Dalam praktek perbankan biasanya bank mengeluarkan formulir permohonan membuka kredit dengan bentuk standar yang memuat klausula yang membebaskan bank dari suatu kerugian, misalnya menyatakan bahwa bank bebas dari segala kerugian akibat kerusakan pada barang-barang yang dimuat dalam kapal, barang-barang tidak sesuai dengan perjanjian, cacat di

⁷⁹ Roselyne Hutabarat. 1992. *Transaksi Ekspor Impor*. Jakarta : Erlangga. hal 166.

⁸⁰ Sujiyo Andi Broto. *Letter of Credit dalam Teori dan Praktek*. Semarang : Dahara Prize, hal 147.

dalamnya atau kesalahan-kesalahan mengenai dokumen-dokumen dan sebagainya.

Setelah importir mengirim dengan lengkap formulir kredit tersebut dan disetujui oleh bank pembuka, maka bank pembuka mengirimkan *L/C* itu kepada eksportir (beneficiary) langsung atau melalui bank koresponden (advising bank) dari bank pembuka tersebut. *L/C* itu dilengkapi dengan semua persyaratan yang dikemukakan dalam application form.

Setelah beneficiary menerima *L/C*, maka langkah selanjutnya adalah menjadi kewajiban beneficiary untuk mengirimkan atau mengapalkan barang-barang dan memperoleh semua dokumen yang diperlukan untuk itu, terutama yang diminta dalam *L/C*. Semua dokumen tersebut menjadi dasar dari adanya realisasi dari *L/C*, yang pembayaran dan harus ditawarkan kepada bank sebelum hari gugur *L/C*. Dalam hal ini bank harus meneliti lebih dahulu apakah dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan yang ditentukan dalam *L/C* sebelum importir melakukan pembayaran tersebut beneficiary.

Apabila dokumen-dokumen tersebut tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam *L/C*, maka bank wajib menolak, dan bila sesuai dengan ketentuan, maka bank harus membayar *L/C* tersebut. Dengan menerima dokumen-dokumen tersebut dan dibayarkan *L/C* tersebut kepada beneficiary, maka dapat dikatakan bahwa kewajiban

utama dari bank berdasarkan *L/C* sudah dipenuhi, kecuali penyerahan dokumen-dokumen pada importir.

Kewajiban ini hanya mungkin dilaksanakan apabila memang pembayaran yang dilakukan oleh bank itu adalah dari dana yang telah disediakan oleh pembeli pada bank, lain halnya kalau pembeli belum menyediakan dana, sehingga pembayaran dilakukan oleh bank sebagai uang muka. Dalam hal ini sesuai dengan persyaratan yang terdapat didalam application form, maka bank berhak menguasai dokumen-dokumen yang dijadikan jaminan sampai importir membayar kembali kepadanya. Bentuk jaminan ini disebut *Pledge*.

Tindakan bank dalam menguasai dokumen-dokumen tersebut gunanya ialah supaya pembeli melaksanakan prestasinya demi kepentingan ekportir (beneficiary), tetapi dalam keadaan tersebut, bank diberi hak menjual barang-barang itu berdasarkan dokumen-dokumen yang dikuasai.

7. Dokumen-dokumen dalam Letter of Credit

Untuk memperoleh pembayaran atas draft, beneficiary harus memenuhi syarat-syarat khusus yang tertera dalam letter of credit yaitu dokumen-dokumen tertentu dengan disertai draftnya itu sendiri.⁸¹ Dokumen tersebut sebagai bukti pelaksanaan oleh beneficiary mengenai sales contract dipihaknya dan pemindahan

⁸¹ Tjipto Rahardjo. 1986. *Letter of Credit*. Jakarta. hal. 41.

pemilikan atas barang-barang. Dengan cara ini pihak importir memperoleh kepastian bahwa importir akan menerima barang-barang tersebut yang importir telah menyetujui dan menetapkan pembayarannya. Begitu pula bank yang bersangkutan dengan transaksi ini diberikan hak kepemilikan atas barang-barang, sehingga dengan demikian dapat dijamin bahwa importir akan memenuhi kewajibannya berdasarkan persetujuan dengan *Letter of Credit*.

Seperti kita ketahui bahwa pembayaran yang dilakukan dengan cara membuka credit adalah untuk pembayaran atas pembelian barang. Sudah barang tentu dokumen yang diserahkan oleh penjual adalah dokumen mengenai barang yang dibeli oleh pihak importir. Dokumen-dokumen inilah yang nanti yang akan diteruskan oleh bank kepada importir untuk atas dasar itu membuktikan bahwa bank telah melaksanakan tugasnya dan sekaligus minta penggantian (*reimburs*) dari jumlah yang telah dibayarkan. Arti pentingnya dokumen ini tidak hanya bagi issuing bank, tetapi juga bagi confirming bank. Semua bank yang terlibat dalam pelaksanaan *documentary letter of credit* bukanlah berurusan dengan barang-barang melainkan berurusan dengan dokumen-dokumen.

Adapun dokumen-dokumen yang digunakan dalam *letter of credit* sebagai berikut :

1. Commercial invoice
2. Transport Documents yang meliputi :
 - a. *Bill of Lading*
 - b. *Good Receipt*
 - c. *Mate's Receipt*
 - d. *Air Waybill*
3. *Draft (wesel)*
4. *Insurance Documents*
5. *Other Document*.⁸²

C. FUNGSI BANK DALAM PEMBUKAAN LETTER OF CREDIT

1. Pengertian Bank

Mengenai pengertian bank pada umumnya, ada berbagai pendapat di kalangan para Sarjana, yang mana masing-masing menggunakan pengertian yang berbeda-beda sehingga perlu diketahui mengenai adanya perbedaan pengertian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman didalam menafsirkan atau mendefinisikan.

Perbedaan pendapat dari para sarjana itu karena perbedaan pola berpikir, pandangan hidup dan tingkat pengetahuan serta karakter dari individu, sehingga masing-masing para sarjana itu mengemukakan, memberikan dan menginterpretasikan pandangan atau pendapat yang dianggapnya lebih tepat/lebih sesuai dengan

⁸² Ruddy Tri Santoso. *Pembiayaan Transaksi Luar Negeri*. 1994. Jakarta, hal. 25.

pendapat masing-masing. Seperti tercantum dalam Undang-undang 10 tahun 1998 pasal 1 (2) : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Untuk memperjelas pengertian dari bank, maka penulis akan mengutip beberapa pendapat para sarjana yaitu :

Prof. G.M. Verrin dalam bukunya Bank Politik yang mengatakan bahwa : bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.⁸³

A. Abdurrachman dalam bukunya Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan mengatakan : Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat

⁸³ Thomas Suyatno, dkk. **Kelembagaan Perbankan**, Jakarta : PT. Gramedia, hal. 1.

penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.⁸⁴

Drs. OP. Simorangkir EK, dkk menyatakan bahwa : Bank merupakan lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit-kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri maupun dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.⁸⁵

2. Dasar-dasar hukum Perbankan Indonesia

Dasar hukum perbankan di Indonesia yang berlaku sekarang adalah Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, serta undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

3. Fungsi dan Tujuan Bank

Dalam perbankan di Indonesia mempunyai fungsi dan tujuan yang terdapat dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan antara lain sebagai berikut :

– Pasal 2

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

⁸⁴ Thomas Suyatno. Dkk, Ibid, hal. 2.

⁸⁵ OP. Simorangkir dkk, **Kamus Perbankan Inggris Indonesia**, Jakarta : Bina Aksara, 1988, hal. 33.

– Pasal 3

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana penyalur dana masyarakat.

– Pasal 4

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

4. Kedudukan Bank Devisa dalam lalu lintas Letter of Credit

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa salah satu fungsi bank adalah melakukan pembayaran dan penagihan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perdagangan Luar Negeri peranan Bank sangat dirasakan penting oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan.

Dalam setiap transaksi perdagangan selalu timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang, dan berhak atas pembayaran harganya. Di lain pihak, pembeli berkewajiban membayar harga barang yang telah disepakati dan berhak memperoleh barang yang telah dibelinya.

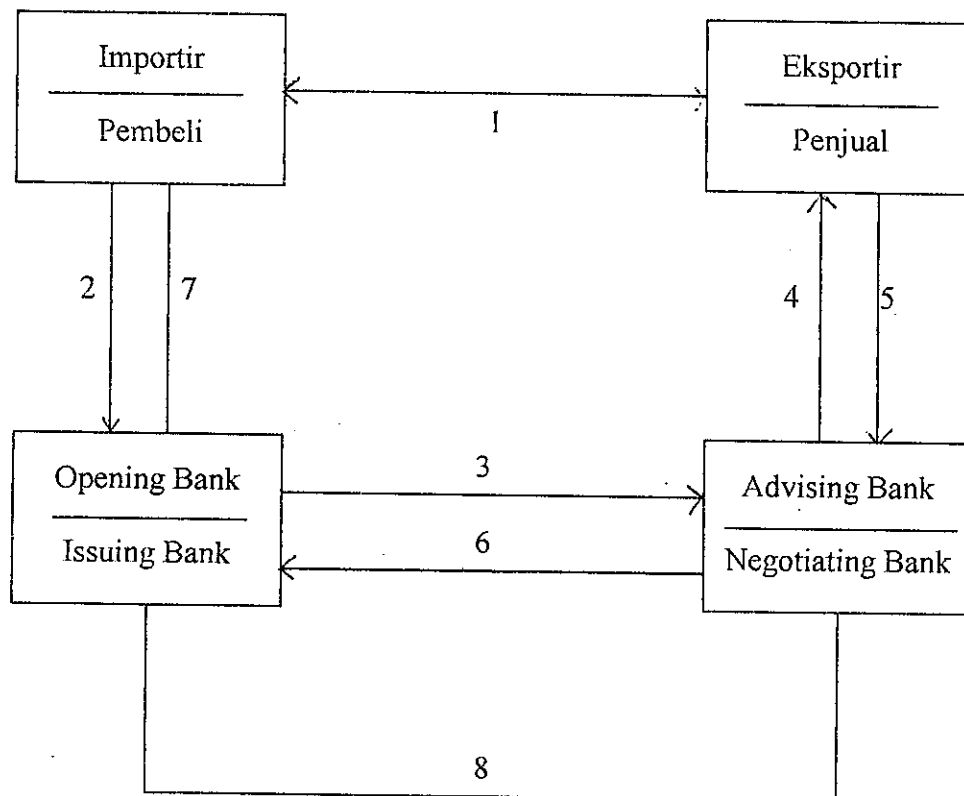
Hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut mudah / dapat dipenuhi apabila masing-masing pihak tidak dipisahkan oleh batas-batas kenegaraan, lain halnya dengan perdagangan yang

melibatkan para pihak yang terpisah oleh batas-batas kenegaraan. Dalam hal ini masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan tidak dapat begitu saja dapat memenuhi hak dan kewajibannya, karena mereka akan dihadapkan pada adanya peraturan yang berbeda, perbedaan mata uang, tingkat harga dan faktor atas sistem perdagangan. Dalam keadaan yang demikian dibutuhkan suatu sarana yang dapat menjamin agar penjual dan pembeli memperoleh hak dan kewajibannya dari masing-masing pihak.

Oleh karena itu maka dalam perdagangan Luar Negeri dipergunakan cara pembayaran yang aman yang disebut dengan kredit berdokumen atau yang lebih dikenal dengan *Letter of Credit (L/C)*. Dalam hal ini pembayaran perdagangan luar negeri dengan *L/C*, bank bertindak sebagai perantara antara para pihak.

Posisi bank dalam lalu lintas pembayaran *L/C* ini, secara garis besar dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut :⁸⁶

⁸⁶ Roselyne Hutabarat. 1991. *Transaksi Ekspor Impor*. Jakarta : Erlangga. 35.



Keterangan Gambar :

1. Eksportir/penjual dan importir/pembeli mengadakan suatu perjanjian perdagangan (*sales contract*).
2. Berdasarkan sales contract tersebut, importir mengajukan aplikasi pembukaan *L/C* pada banknya (Bank Devisa) untuk dan atas nama eksportir dalam jumlah tertentu.
3. Setelah Opening Bank menyetujui permohonan pembukaan *L/C* melalui salah satu Bank Devisa di Negara eksportir yang menjadi korespondennya. Bank yang menjadi koresponden dalam hal ini disebut *Advising Bank*.

4. Advising bank kemudian meneruskan pembukaan *L/C* tersebut kepada eksportir. Dalam hal ini Advising bank juga dikuasakan untuk membeli wesel-wesel yang ditarik oleh eksportir, maka ia juga bertindak sebagai negotiating Bank.
5. Setelah penerimaan pembukaan *L/C* dari Importir, selanjutnya eksportir menyiapkan dokumen-dokumen ekspor tersebut kepada Advising Bank untuk diteruskan kepada importir melalui Opening Bank/Issuing bank. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa barang-barang yang dikirimkan eksportir sudah sesuai dengan yang dipesan oleh importir.
6. Setelah menerima dan memeriksa semua dokumen yang disyaratkan oleh importir, Advising Bank mengirimkan dokumen-dokumen tersebut pada Opening Bank/Issuing Bank.
7. Setelah memeriksa dokumen-dokumen yang dikirimkan oleh eksportir melalui Advising Bank tersebut, Opening Bank meneruskan dokumen-dokumen tersebut kepada importir.
8. Apabila dokumen-dokumen yang dikirimkan oleh eksportir sudah sesuai dengan dokumen-dokumen yang di isyaratkan dalam *L/C*, Opening Bank mengeluarkan kredit advis sebesar ini berfungsi sebagai bukti bahwa dokumen-dokumen yang dikirimkan telah dibayar oleh Opening Bank.

Dalam aktivitas perdagangan internasional baik segi *Export* maupun impor ternyata fungsi bank sangat penting, terutama fungsi

sebagai perantara dibidang teknis pelaksanaan pembayaran luar negeri.

Untuk menjalankan tugas sebagai perantara dalam transaksi perdagangan internasional tersebut, suatu bank tentu saja tidak dapat bekerja sendiri dan hal ini tidak mungkin terlaksana apabila bank yang bersangkutan memang menginginkan tugasnya sebagai perantara harus berhasil baik. Untuk itu bank-bank tersebut harus mengadakan hubungan koresponden dengan bank-bank di luar negeri (*Correspondent Relationship*) terutama dengan bank-bank prima (*first class bank*), yaitu bank-bank yang dalam dunia perbankan dan perdagangan internasional tidak diragukan lagi bonafiditas serta moral dan financial standingnya.

Oleh karena bank-bank di luar negeri tersebut seolah-olah merupakan agen dari bank yang bersangkutan, maka hubungan tersebut sering dikenal dengan *Agency Arrangement* yang mengatur tentang cara-cara penyelesaian sehubungan dengan kepentingan-kepentingan yang menyangkut kegiatan bank masing-masing.

Pengaturan tersebut perlu diselenggarakan, sehingga suatu double traffic trade yang menyangkut kepentingan-kepentingan masing-masing pihak dapat terlaksana dengan mudah dan cepat.

Letak peranan penting dari bank sebagai perantara dalam pembayaran perdagangan luar negeri, disamping untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaannya. Hubungan

koresponden yang demikian berarti menunjukkan adanya pemakaian jasa-jasa bank luar negeri, juga dapat memberikan keuntungan kepada bank-bank yang telah menunjukkan sebagai bank koresponden atas dasar prinsip resiprositas.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. HASIL PENELITIAN

Setelah dilaksanakan penelitian peneliti mendapatkan hasil yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Deskripsi L/C Sebagai Cara Pembayaran Dalam Perdagangan Luar Negeri

Perkembangan L/C pada saat ini sangat pesat, hal ini terbukti karena sebagian besar negara telah menerima L/C sebagai suatu bentuk cara pembayaran. Sebelum sampai kepada bentuk cara pembayaran dengan L/C ini, terlebih dahulu dikemukakan perkembangan L/C sebagai suatu cara pembayaran. Pada mulanya para pedagang melakukan perdagangan tanpa mengikat bank. Hal ini dapat dilihat seperti yang dikemukakan oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak bahwa pada mulanya kredit berdokumen tidaklah seperti bentuk yang sekarang. Kredit berdokumen itu hanya didasarkan atas kepercayaan tanpa turut sertanya bank, akan tetapi saat ini tidak lagi demikian dimana pembeli sudah melibatkan bank terikat pada penjual.⁸⁷

⁸⁷ Emmy. Pangaribuan Simanjuntak. 1994. **Pembukaan Kredit Berdokumen**. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM. Hal 9.

Pendapat di atas menggambarkan keterikatan bank dalam melakukan pembayaran. Adapun perkembangan L/C sebagai suatu cara pembayaran F.P. de Rooy sebagaimana dikutip oleh H.M.N. Poerwosoetjpto.⁸⁸

Bahwa pada tahun 1920 para bankir di New York sepakat mengenai penggunaan kredit berdokumen. Pada tahun 1922 dibuat formulir baku kredit berdokumen. Tahun 1926 Commission de la lettre de Change et du Cheque dari kamar dagang International menyusun peraturan yang seragam. Pada tahun 1930 diterima sebagai Uniform Regulation for Commercial Credits. Kemudian tahun 1951 diadakan perubahan-perubahan, perubahan itu dilakukan tahun 1962 dan tahun 1973 serta tahun 1983 dan yang terakhir pada tahun 1993.

Di Indonesia Uniform Custom and Practice for Documentary Credit mulai berlaku sejak tahun 1962. Pernyataan ini diperkuat dalam sejarah L/C yang termuat dalam Kusmayadi yang mengatakan⁸⁹ :

Ketentuan ini (Uniform Customs) pertama kali dikeluarkan pada tahun 1933. Pada tahun 1951 dan tahun 1962 diadakan perubahan-perubahan dan yang berlaku sekarang adalah Uniform Customs dengan perubahan-perubahan pada tahun 1962. Tidak semua negara mengikutinya, hanya 173 negara saja termasuk Indonesia. Ke 173 negara ini semua menyatakan tunduk pada Uniform Customs. Walaupun demikian jika ada Bank dari negara yang tidak tunduk pada Uniform Customs

⁸⁸ H.M.N. Purwosutjpto. 1989. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. (4) hal 67-71.

⁸⁹ Kusmayati. 1980. *Undang-Undang Devisa, Nota Uang, Ukuran Timbangan, Undang-Undang Pelayaran*. Hal 22.

dalam tiap-tiap L/C yang dikeluarkan diberi clause tentang tunduknya pada Uniform Customs. Sebab jika tidak ada clause ini, maka L/C ini dapat ditolak karena tidak ada kepastian mengenai ketentuan-ketentuan dari istilah-istilah yang disebut dalam L/C tersebut.

Di Indonesia cara pembayaran dengan menggunakan letter of credit sudah dikenal sejak tahun 1964, yaitu dalam Undang-undang Devisa Nomor 32 tahun 1964. Dengan adanya Undang-undang ini, dapatlah dikemukakan bahwa mulai tahun 1964 diterima dan diperlakukan UCP 1962 yang direvisi walaupun Indonesia telah menjadi anggota UCP semenjak tahun 1962.

Diatas dikatakan bahwa dalam perkembangannya pembukaan kredit berdokumen (L/C) sudah melibatkan bank. Campur tangan bank terhadap dokumen pembayaran tersebut mutlak diperlukan mengingat dalam pembayaran dengan cara membuka kredit ini terjadi dengan pembayaran yang dilakukan oleh Bank atas perintah dari pembeli untuk kepentingan penjual.

Keterlibatan bank dalam pembukaan kredit berdokumen (L/C) ini tidak hanya melibatkan bank dalam negeri, tetapi tidak lepas juga dengan bank-bank di luar negeri.

Bank yang terlibat dalam pembukaan L/C adalah Bank Devisa yakni bank yang memperoleh surat penunjukan dari bank Indonesia untuk melakukan usaha perbankan dalam valuta asing.

Selanjutnya perlu ditegaskan disini bahwa semua bank yang melaksanakan kredit berdokumen (L/C) bukan berurusan dengan barang-barangnya, melainkan harus berurusan dengan dokumen-dokumen. Jadi sejak awal dalam instruksi membuka kredit yang datang dari pembeli, sudah harus dicantumkan pada instruksi itu tentang dokumen-dokumen yang dikehendaki oleh pembeli atas dasar mana selanjutnya bank berwenang melakukan pembayaran. Dengan demikian secara tidak langsung akan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C seperti, Perusahaan Pelayaran Frieght Forwader, EMKL/EMKU, Perusahaan Asuransi Surveyor, Bea Cukai serta pihak-pihak yang ditunjuk Pemerintah untuk mengeluarkan surat-surat keterangan/sertifikat lainnya bagi barang-barang yang diperdagangkan.

2. Campur Tangan Pihak Ketiga Terhadap Dokumen Pembayaran Perdagangan Ekspor-Import (Letter Of Credit) Di Indonesia dan Pengamanannya.

2.1. Proses Pembukaan Letter of Credit (L/C) Dalam Transaksi Eksport-Import.

Dalam pembukaan L/C terdapat beberapa pihak yang tersangkut yaitu :

- a. Pembeli/applicant/Importir merupakan pihak yang membuka kredit (L/C).
- b. Penjual/beneficiary/Eksportir merupakan pihak untuk kepentingan siapa kredit (L/C) itu dibuka.

Dalam transaksi ekspor-impor baik Eksportir maupun Importir harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan umum antara lain adalah : ⁹⁰

1. Harus merupakan badan hukum (PT, CV, Fa, PN, Perum, dsb.).
 2. Eksportir harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau mendapat Izin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen.
 3. Importir harus memiliki Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengaruh Importir Terbatas (APIT).
- c. Bank dalam hal ini sebagai pihak ketiga adalah pihak yang membuka kredit, Bank tersebut adalah Bank Devisa yang dapat berfungsi sebagai :
- Opening bank atau issuing bank, juga dapat disebut bank pembuka L/C, berkedudukan di negara importir;

⁹⁰ Wawancara dengan pihak terkait di Departemen Perdagangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- Advising bank adalah bank yang meneruskan L/C atau bank koresponden (agen dari issuing bank) yang memberitahukan kepada beneficiary bahwa L/C telah dibuka untuknya;
- Confirming bank adalah bank yang melakukan konfirmasi atau permintaan issuing bank kepada advising bank supaya L/C tersebut dikuatkan/diperkuat ;
- Paying bank adalah bank yang secara khusus ditunjuk dalam L/C untuk melakukan pembayaran ⁹¹.

Dalam praktek terdapat juga. ⁹²

- Negotiating bank adalah bank yang menyetujui untuk membeli wesel (draft) dari beneficiary/Eksportir (namanya tidak disebutkan dalam L/C.
- Reimbursing bank, bilamana antara bank eksportir dan bank importir tidak ada hubungan rekening sehingga kemudian untuk penyelesaian pembayaran biasanya ditunjuk bank ketiga yang disebut reimbursing bank.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 3 UCP 1993 diketahui bahwa dasar dari pembukaan L/C adalah sales contract.

⁹¹ BNI 1946. **Ekspor-Import**. 1997.

⁹² Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi VIC. Niaga Ekspor-Import Bank Niaga. 1996.

Sebelum sebuah L/C tersebut dibuka oleh importir melalui banknya, telah didahului oleh suatu proses yang cukup panjang hingga terwujudnya perjanjian jual beli (sales contract) yang merupakan dasar dari pembukaan L/C oleh importir. Sebelum terwujudnya sales contract terlebih dahulu diawali adanya pertemuan baik secara langsung maupun tidak langsung antara eksportir dan importir. Pertemuan tersebut dapat terjadi dalam suatu event-event tertentu misalnya dalam pameran dagang, workshop, kunjungan-kunjungan kenegaraan, atau misi-misi dagang yang khusus diadakan untuk itu. Dapat pula terjadi melalui pemanfaatan sarana jasa-jasa perbankan, atau buku-buku petunjuk perdagangan, iklan dan sebagainya. Pencarian hubungan diawali dengan surat menyurat, hubungan telex/kawat atau telepon. Pihak-pihak mana yang akan memulai terlebih dahulu tergantung kondisi kepentingan masing-masing. Bila importir yang memulai terlebih dahulu, maka importir berdasarkan informasi yang diperoleh dari banknya akan membutuhkan barang-barang dengan kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain tertentu. Dari surat tersebut eksportir akan mengirimkan informasi yang diminta oleh importir secara lengkap. Apabila importir menerima dan menyetujui tawaran dimaksud, maka importir membuat surat pesanan yang lazim dinamakan Order Sheet yang dikirimkan kepada eksportir tersebut. Untuk persetujuan atau

penegasan atas order tersebut maka dibuatlah perjanjian jual beli (sales contract). Selanjutnya sales contract tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Dengan demikian sales contract tersebut merupakan dokumen yang penting oleh karena berdasarkan perjanjian inilah saling pengertian antara kedua pihak dituangkan dan ditegaskan. Sales contract tersebut memuat tentang kepastian hak dan kewajiban bagi eksportir maupun importir sehingga transaksi tersebut dapat direalisasikan dengan baik. Sales contract berisikan konsensus sebagai berikut : ⁹³

1. Persetujuan tentang kesepakatan syarat-syarat dan kondisi-kondisi tentang transaksi jual/beli atau ekspor/impor yang dilakukan oleh penjual / eksportir/seller / beneficiary dengan pembeli / importir / applicant / buyer.
2. Jumlah dan jenis pengiriman barang yang harus dikirim oleh eksportir dan telah disepakati oleh importir.
3. Jadwal pengiriman ke kota/pelabuhan yang telah ditentukan.
4. Jumlah yang harus dibayar oleh importir atas harga barang yang telah disepakati oleh eksportir.

Isi dari sales contract adalah syarat dan kondisi yang disepakati dalam perjanjian antara importir dan eksportir untuk

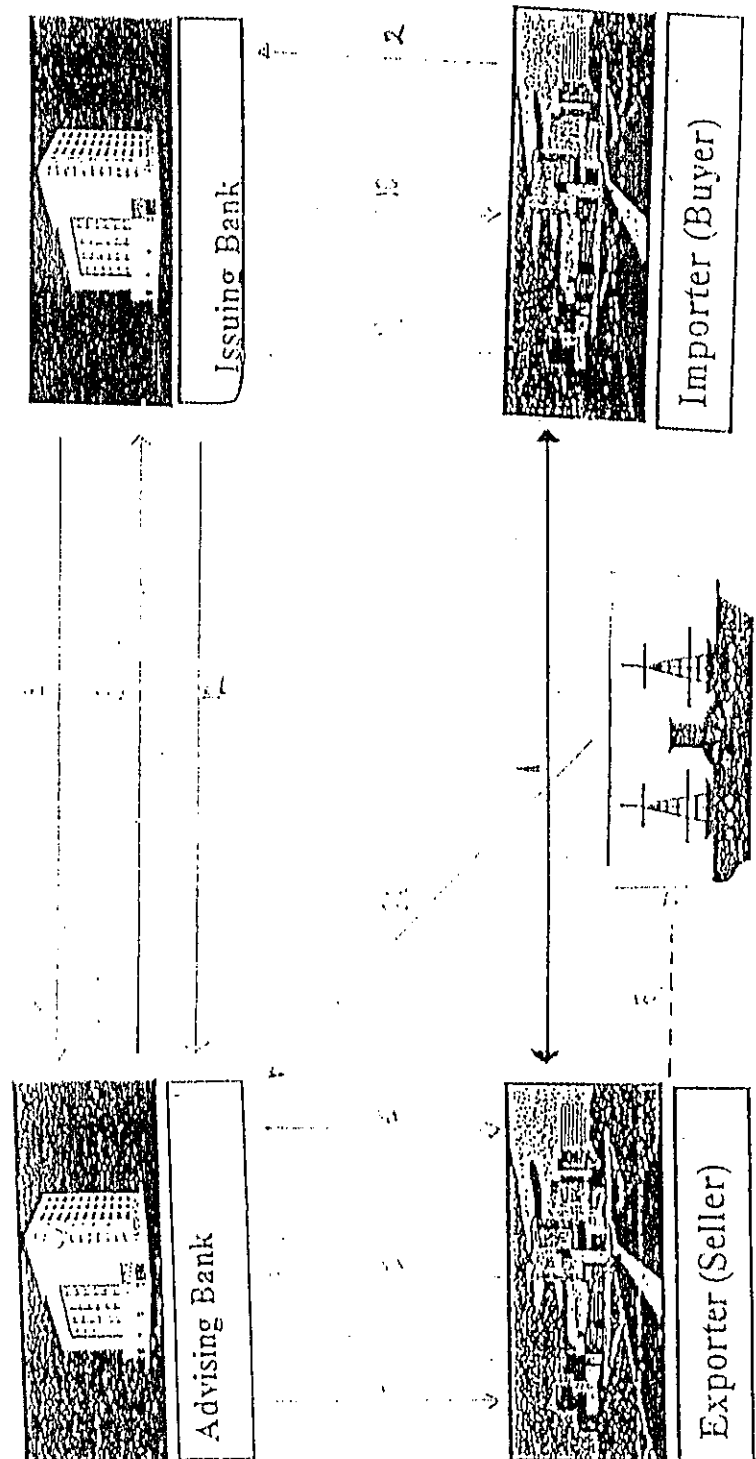
⁹³ Ruddy Tri Santosa. 1994. **Pembiayaan Transaksi Luar Negeri**. Yogyakarta : Penerbit Andi Offset. Hal. 2.

melaksanakan transaksi ekspor dan impor. Syarat dan kondisi yang tertuang dalam sales contract meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Bentuk L/C yang dibuka
2. Nilai dan valuta L/C
3. Tanggal jatuh tempo dan saat mulai berlakunya L/C.
4. Tempat dimana L/C berlaku dan tempat di mana L/C berakhir.
5. Nama, jumlah dan uraian tentang barang.
6. Tanggal terakhir pengapalan barang.
7. Sistem pengapalan barang (sekaligus atau sebagian-sebagian).
8. Cara pembungkusan barang.
9. Syarat-syarat pembayaran
10. Cara penutupan asuransi
11. Sarana pengangkutan
12. Dokumen-dokumen yang harus disertakan (berikut jumlah rangkapnya).

Jika eksportir dan importir sudah menandatangani perjanjian jual beli (sales contract) tersebut, maka importir dapat meminta kepada bank untuk membuka letter of credit. Jalannya pembukaan suatu L/C dapat digambarkan secara sistematis dalam skema berikut ini :

PROSES TRANSAKSI EXPORT-IMPORTER DENGAN L/C



Proses pembukaan L/C dalam transaksi export-import diawali adanya penandatanganan sales contract antara Exportir-Importir.

Setelah penandatanganan sales contract Importir menghubungi banknya (Bank Devisa) untuk membuka suatu L/C untuk dan atas nama eksportir. Importir disini harus mengisi, melengkapi dan menandatangani suatu formulir yang telah disediakan oleh bank yaitu Formulir Permohonan Membuka Kredit atau application form. Di dalam formulir inilah disebutkan suatu permohonan dari importir kepada bank untuk membuka suatu L/C bagi kepentingan penjual. Di dalam formulir itulah disebutkan semua persyaratan-persyaratan yang dikehendaki di dalam L/C antara lain mengenai :

1. Nama dan alamat bank koresponden
2. Nama dan alamat pembeli/importir
3. Kredit dibuka dengan pur/telegram/telex dll.
4. Sifat kredit, reveble atau irreveble
5. Nama dan alamat beneficiary/Eksportir
6. Bank sebagai advising/confirming bank
7. Jumlah kredit
8. Tanggal berlakunya kredit
9. Kepada siapa wesel di tarik dan tanggal jatuh temponya
10. Dokumen-dokumen apa yang diperlukan
11. Nama barang termasuk perincian dan harganya

12. Tanggal pengapalan
13. Pelabuhan muat dan bongkar
14. Cara pengiriman seluruhnya/sebagian
15. Pindah kapal diizinkan/tidak
16. Berapa lama penyerahan dokumen dikehendaki.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa persyaratan-persyaratan yang harus diisi di dalam suatu formulir Permohonan Membuka Kredit berbeda antara bank yang satu dengan lainnya, namun demikian dalam garis besarnya mengandung hal yang sama.

Setelah semua ketentuan yang berlaku dipenuhi oleh Importir seperti surat izin impor bank melakukan penutupan Kontrak Valuta (KV) dengan importir dan melaksanakan pembukaan L/C atas nama importir. Bank mengeluarkan L/C dilengkapi dengan semua persyaratan-persyaratan yang dikemukakan di dalam application form dan mengirimkan L/C itu kepada eksportir langsung atau melalui bank koresponden atau cabangnya. Bank dalam hal ini bertindak sebagai opening/issuing bank. Koresponden bank di luar negeri yang bertindak sebagai perantara kedua ini disebut advising bank/negotiating bank.

Advising bank kemudian memberitahukan kepada eksportir mengenai pembukaan L/C tersebut. Di dalam hal advising bank juga dikuasakan untuk membeli wesel-wesel yang

ditarik oleh eksportir atas L/C itu, maka advising bank itu juga dapat disebut negotiating bank.

Apabila Eksportir telah menerima L/C maka selanjutnya menjadi kewajiban bagi eksportir untuk mengirim atau mengapalkan barang-barang dan memperoleh semua dokumen-dokumen yang diperlukan untuk itu, terutama yang diminta dalam L/C. Semua dokumen-dokumen ini adalah menjadi dasar dari adanya realisasi dari L/C yaitu pembayaran dan harus ditawarkan kepada Bank sebelum hari gugur dari L/C. sebelum bank melakukan pembayaran, bank harus meneliti lebih dulu apakah dokumen-dokumen itu sesuai dengan yang ditentukan dalam L/C. Apabila tidak bank wajib menolak dokumen-dokumen tersebut, tetapi apabila sesuai maka bank harus membyaar L//C itu.

Advising bank (negotiating bank) menegoisasi (membeli) wesel yang ditujukan eksportir tersebut. Selanjutnya dokumen-dokumen pengapalan dikirimkan oleh negotiating bank (advising bank) untuk mendapat ganti pembayaran (reimbursement).

Issuing bank memeriksa dokumen-dokumen tersebut apakah sesuai dengan syarat-syarat L/C dan bila ya, kemudian meminta importir menebusnya dengan cara pembayaran yang disyaratkan dalam L/C.

Importir membayar atau meminta issuing bank untuk mendebit rekeningnya pada bank tersebut.

Terakhir Issuing bank kemudian membuka negotiating bank dengan mengkredit rekening negotiating bank pada issuing bank, kalau ada, atau bila tidak pada bank ketiga yang ditunjuk.

2.2. Campur Tangan Bank dan Lembaga/Instansi Terkait Terhadap L/C Dalam Perdagangan Export-Import

Dari proses pembukaan L/C diketahui bahwa pembayaran yang dilakukan dengan cara membuka kredit tersebut adalah untuk pembayaran atas pembelian suatu barang atau suatu partai barang. Penjual (Exportir) yang berhak atas harga barang yang dijualnya hanya dapat meminta uang tersebut dari Bank atas penyerahan beberapa dokumen mengenai barang-barang yang di beli oleh pembeli (Importir) yang meminta Bank untuk membuka kredit yang diharapkan akan diserahkan oleh penjual (Exportir) kepada Bank pada saat Exportir tersebut meminta pembayaran kepada Bank. Sebagaimana ditegaskan dalam artikel 4 UCP 1993 berikut ini : ⁹⁴

"In credit operation all parties concerned deal with document, and not with goods, services and/or other performances to which the documents may relate".

Dari artikel tersebut diketahui bahwa dalam pelaksanaan L/C semua pihak yang bersangkutan hanya berurusan dengan dokumen-dokumen, dan bukan dengan barang-barang, jasa-jasa

dan /atau pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang bersangkutan.

Hubungan demikian ini perlu diketahui untuk memudahkan pengawasan atas terlaksananya transaksi terutama dalam pengawasan atas "flow of document". Hal ini perlu ditegaskan karena semua bank yang melaksanakan kredit berdokumen (L/C) bukanlah berurusan dengan barang-barangnya, melainkan harus berurusan dengan dokumen-dokumen.

Dokumen-dokumen yang dimaksud dalam praktek meliputi :

- a. Dokumen pengangkutan konosemen (Bill of Lading).
- b. Invoice
- c. Dokumen asuransi
- d. Wesel (draft)
- e. Dokumen-dokumen Tambahan lainnya seperti :
 1. Certificate of Origin
 2. Certificate of Inspection
 3. Packing List
 4. Weight List
 5. Laporan pemeriksaan surveyor.

Bank hanya berurusan dengan dokumen-dokumen dengan demikian bank bertanggung jawab atas pemeriksaan dokumen-dokumen tersebut.

⁹⁴ Article 4 ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits. 1993.

Terhadap Dokumen pengangkutan, dalam hal ini adalah Bill of lading (Konosemen) hal yang perlu menjadi perhatian bank (pemeriksaan) diterangkan pada :

1. Diterbitkan oleh Maskapai Perdagangan atau agennya.
2. Tanggal penerbitan, on board tidak boleh melampaui tanggal pengapalan terakhir.
3. Full set originals.
4. Charty party on dech tidak diperkenankan
5. Clean/tanpa informasi mengenai kerusakan barang atau packingnya.

Adapun beberapa hal yang terdapat pada Bill of lading meliputi :

- Uraian umum tentang barang harus konsisten dengan yang disebut dalam L/C.
- Menunjukkan merk dan jumlah arang yang dikirimkan.
- Nama kapal pengangkut barang (carrier), yaitu pihak perusahaan perkapalan yang mengangkut barang ke tempat tujuan.
- Menegaskan bahwa barang telah dimuat di dalam kapal.
- Nama pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar.
- Nama shipper, nama consignee (bila tidak atas kuasa atau order atas pihak penerima barang di tempat tujuan), dan nama

- Nama shipper, nama consignee (bila tidak atas kuasa atau order atas pihak penerima barang di tempat tujuan), dan nama dan alamat notify party (pihak yang harus diberitahu oleh perusahaan pelayaran mengenai kedatangan barang di tempat tujuan).
- Biaya pengangkutan telah dibayar atau dibayar di tempat tujuan/bongkar.
- Nama shipper (consignor) yaitu pihak-pihak yang mempergunakan jasa perkapalan untuk mengangkut barang, baik itu kepunyaan orang lain maupun milik sendiri.
- Nomor Original Bill of Lading
- Tanggal penerbitan Bill of Lading.

Bill (Konosemen) tersebut dapat diterbitkan sebagai; atas pembawa, atas nama, atas nama atau kuasa (order).

Selanjutnya pemeriksaan terhadap Invoice meliputi :

1. Diterbitkan oleh beneficiary (eksportir) dan ditujukan kepada importir.
2. Nilai invoice tidak boleh melebihi nilai L/C.
3. Perincian barang pada invoice harus sama dengan yang tercantum dalam L/C.

Bank dapat menolak invoice apabila tidak sesuai dengan L/C yang dibawa.

Kemudian terhadap dokumen asuransi pemeriksaan oleh bank meliputi :

1. Diterbitkan/ditandatangani oleh Perusahaan Asuransi atau agennya dan sesuai persyaratan L/C.
2. Tanggal efektif penutupan asuransi, paling lambat sama dengan tanggal on board.
3. Valuta dokumen, asuransi harus sama dengan Valuta L/C, dan nilai penutupan asuransi minimal 100% dari nilai CIFT.
4. Resiko yang ditutup harus jelas.

Terhadap Draft (Wesel) pemeriksaan meliputi :

1. Dibuat dengan nomor L/C yang tepat.
2. Tanda tangan asli oleh pihak yang disebut penerima dalam L/C.
3. Jenisnya, yakni atas unjuk atau berjangka.
4. Ditarik atas tertagih yang disebutkan dalam L/C.

Sedangkan terhadap dokumen-dokumen tambahan pemeriksaan pada intinya ditekankan bahwa harus memenuhi persyaratan dalam L/C, antara lain adalah pemeriksaan surveyor didasarkan atas copy L/C yang asli dan copy pembukaan L/C yang diterima dari Opening Bank. Pemeriksaan yang dilakukan antara lain meliputi :

1. Jenis dan jumlah barang.
2. Mutu barang

3. Harga satuan dan jumlah harga barang.
4. Tarif Pos (HS. Number)
5. Bea murah dan sebagainya.

Pemeriksaan tersebut dilakukan sebelum barang dimuat di kapal/pesawat terbang di pelabuhan muat barang. Sebagai bukti pemeriksaan diterbitkanlah laporan pemeriksaan surveyor (LPS) yang disampaikan kepada eksportir untuk diteruskan ke importir melalui Opening Bank. LPS yang dibuat oleh kantor SGS (Societe Generale de Surveillance) setempat terdiri dari satu lembar asli dan lima lembar tindasan.

Selanjutnya jika terhadap dokumen tersebut ditemui ketidaksesuaian antara pengadaan dokumen dengan permintaan dalam L/C atau biasa disebut Discrepancies maka akan menimbulkan kerugian maupun penundaan pembayaran atau bahkan non payment akibat project barang yang dirasa kurang sesuai oleh pembeli (Importir) seperti apa yang tertuang di dalam L/C.

Discrepancies secara jelas diatur dalam UCP 500 Thn. 1993 pasal 13 dan 14.

Di dalam praktek sehari-hari dokumen-dokumen yang telah secara lengkap disiapkan oleh Eksportir untuk mengekspor barangnya seperti apa yang tercantum di dalam L/C, maka L/C yang bersangkutan dikenal dengan istilah L/C Complied With

Pengaturan tentang dokumen di dalam UCP 500 diatur mulai pasal 20 sampai pasal 38.

3. Hubungan Hukum Para Pihak Yang Terkait Dalam Pembukaan Dokumen Pembayaran Perdagangan Ekspor-Impor (Letter Of Credit)

Hubungan hukum merupakan hubungan-hubungan tertentu yang dikualifikasikan oleh hukum. Agar terjadi suatu hubungan hukum diperlukan pihak-pihak yang bertindak sebagai subyek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut adalah obyek hukum.⁹⁵

Dengan terdapatnya beberapa pihak dalam pembukaan L/C, maka terdapat hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut yaitu :

- a. Hubungan hukum antara pembeli (Importir) dan penjual (Eksportir);
- b. Hubungan hukum antara bank dan penjual (Eksportir);
- c. Hubungan hukum antara bank dan pembeli (Importir);

⁹⁵ Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hal 39.

3.1. Hubungan Hukum Importir Dengan Eksportir

Terjadinya pembayaran dengan membuka kredit berdokumen (L/C) adalah karena antara importir dan eksportir telah ada kata sepakat pada saat perjanjian jual beli (Sales Contract) diadakan.

Perjanjian tersebut antara lain menyangkut jumlah, mutu barang, harga, tanggal pengapalan, cara-cara pembayaran dan data-data lain yang diperlukan. Dalam perjanjian jual beli (sales contract) inilah dicantumkan keterangan-keterangan yang terinci tentang tingkat, mutu dan keterangan-keterangan lain yang biasanya tidak cukup dicantumkan dalam L/C.

Guna merealisasi perjanjian jual beli (sales contract) tersebut, importir selanjutnya akan membuka L/C yang memuat syarat-syarat transaksi yang telah disepakati bersama sepanjang syarat-syarat tersebut memungkinkan untuk dimuat dalam L/C. Apabila tidak memungkinkan maka L/C akan dibuka dengan memberikan reference untuk memenuhi barang yang dibeli sesuai sales contract yang telah disetujui dengan segala persyaratannya.

Dalam pasal 3 revision UCP 1993 telah menyebutkan :

Credits, by their nature, are separate transactions from the sales or other contracts on which they may be based, and bank are in no way concerned with or bound by such contract"

Dari kalimat "from the sale or other contracts which they may be based" dapat diketahui bahwa pembukaan kredit itu dapat terjadi berdasarkan perjanjian jual beli atau perjanjian lainnya. Emmy Pangaribuan menyebutkan bahwa perjanjian mengenai pembukaan kredit itu harus atas dasar suatu perikatan yang telah ada sebelumnya, yang di dalam hukum surat berharga pada umumnya disebut perikatan dasar.⁹⁶

Selanjutnya dari hasil penelitian diketahui bahwa para eksportir dan importir menggunakan istilah perjanjian jual beli yang beraneka ragam antara lain Contract, Purchase Contract dan Perjanjian Jual Beli.

Karena hubungan antara Eksportir dan Importir adalah jual-beli sehingga dengan terjadinya kesepakatan mengenai harga, maka Ekporitr berkewajiban untuk menyerahkan barang dan dokumen kepada Importir dan memperoleh hak atas pembayaran harga barang melalui L/C.

Adapun hak Importir adalah memperoleh barang dan dokumen-dokumen yang menjadi obyek jual beli yang dilakukan antara Eksportir dan Importir dan berkewajiban untuk membayar harga barang yang menjadi obyek perjanjian jual beli tersebut melalui pembukaan L/C.

⁹⁶ Emmy Pangaribuan Simanjuntak. Op.cit hal 18.

3.2. Hubungan Hukum Antara Importir dengan Bank

Hubungan hukum antara importir dengan bank dapat dipandang sebagai perjanjian pemberian kuasa, dimana pihak importir memberi kuasa kepada Bank untuk mengeluarkan L/C dan membayar kepada eksportir. Dapat juga dipandang sebagai jenis perjanjian untuk melakukan pekerjaan (jasa) oleh Bank kepada Importir dengan mendapatkan upah.

Kewajiban utama lain Bank adalah untuk membayar kepada eksportir dan memberikan dokumen-dokumen dan kewajiban importir adalah untuk membayar uang deposit, uang harga jual beli dan uang jasa bank.

3.3. Hubungan Hukum Antara Eksportir dengan Bank

Hubungan hukum antara Eksportir dengan Bank masih bergantung pada jenis L/C yang dibuka. Sebab Eksportir dalam pembukaan L/C hanya pihak yang dijanjikan sesuatu oleh Importir dan Bank.

Pemberitahuan bank kepada penjual (Eksportir) tentang pembukaan L/C menimbulkan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

- Dalam pembayaran dengan menggunakan revocable L/C berarti bank tidak terikat pada pemberitahuan tersebut, sebab disini bank membuka kredit atas perintah pembeli (Importir)

yang sampai saat pembayaran pada setiap saat masih dapat menarik kembali L/C tersebut tanpa pemberitahuan lebih dulu kepada penjual (eksportir) oleh karena antara bank dan penjual (Eksportir) tidak ada hubungan hukum; hal ini dapat dilihat pada ketentuan UCP article 8a revision 1993 :

"A revocable credit may be amended or cancelled by the issuing bank at any moment and without prior notice to the beneficiary".

- Dalam cara pembayaran dengan menggunakan irrevocable L/C, berarti bank terikat pada eksportir, sebab disini bank tidak dapat menarik kembali L/C tersebut kalau tidak ada persetujuan eksportir dan importir. Jadi irrevocable L/C merupakan jaminan yang pasti dari bank untuk melaksanakan pembayaran atas barang, asalkan dokumen yang diserahkan lengkap sesuai dengan syarat-syarat L/C.

Ketentuan mengenai hal tersebut dapat dilihat pada UCP article 9a revision 1993 :

"An irrevocable credit constitutes a definite undertaking of the issuing bank, provided that the terms and conditions of the credit are complied".

4. L/C Sebagai Sarana Penunjang Kelancaran Perdagangan Ekspor - Impor

4.1. Manfaat L/C Dalam Perdagangan Ekspor – Impor

Manfaat L/C dalam perdagangan luar negeri dapat dilihat dari sisi eksportir dan importir.

Dari sisi eksportir antara lain :

- Eksportir dapat lebih menggantungkan pada L/C yang dikeluarkan oleh bank daripada oleh pedagang (merchan's L/C) dan karena itu merasa terjamin atas pembayaran setelah adanya dokumen-dokumen yang sesuai dengan syarat L/C.
- Eksportir dapat membayarkan dengan segera dari bank pembayar bilamana semua dokumen yang diminta sesuai dengan syarat L/C diminta pada bank pembayar walaupun importir belum menerima dokumen.
- Eksportir dapat menggunakan L/C untuk pembiayaan selanjutnya seperti back to back L/C (L/C yang diterbitkan sama dengan L/C yang diterima)

Dari sisi importir manfaat tersebut meliputi :

- Importir tidak diharuskan menyediakan dana sebesar L/C namun kadang-kadang sebesar prosentase tertentu saja tetapi harus dilunasi sampai barang/dokumen tiba.
- Importir merasa terjamin bahwa bank pembuka akan menolak pembayaran kepada eksportir apabila terjadi penyimpangan

pada dokumen atau dokumen tersebut tidak sesuai dengan sales contract dibuat terdahulu.

4.2. Hambatan-Hambatan Pengguna L/C Dalam Perdagangan Ekspor-Import

Meskipun L/C banyak memberi manfaat baik bagi eksportir maupun importir, namun demikian L/C ini juga mengandung beberapa kelemahan/kerugian antara lain :⁹⁷

- a. Biaya bank yang cukup tinggi
- b. Kurang praktis dalam penanganan karena diperlakukan penyiapan-penyiapan dokumen L/C
- c. Ada kemungkinan L/C tidak harus dipenuhi sehingga dokumen harus dikembalikan bahkan kemungkinan tidak dibayar.
- d. Mungkin barang yang diterima tidak sesuai dengan L/C.

⁹⁷ Aryani Witasari. Majalah Hukum Kaligawe. Edisi 5/Th. III Pebruari 1995 hal 46.

B. ANALISIS HASIL PENELITIAN

1. Campur Tangan Pihak Ketiga Terhadap Dokumen Pembayaran Perdagangan Ekspor – Impor (L/C) di Indonesia.

1.1. Proses Pembukaan Letter of Credit (L/C) Dalam Perdagangan Ekspor-Impor

Bank mempunyai peranan yang penting dalam transaksi ekspor-impor yakni memproses dan melaksanakan pembukaan L/C untuk importir. Dasar bagi pembukaan L/C yang digunakan oleh bank adalah syarat-syarat L/C yang ditetapkan oleh importir berkaitan dengan sales contract (kontrak jual beli) yang disepakati oleh eksportir-importir di luar keterlibatan bank.

Sales Contract merupakan awal dari pembukaan Documentary Letter of Credit (L/C). Dimana syarat-syarat yang terdapat di dalam sales contract juga akan menjadi syarat-syarat dalam Letter of Credit (L/C), meskipun tidak seluruhnya dan harus disesuaikan dengan peraturan hukum dinegara eksportir maupun importir, termasuk ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Uniform Customs and Practise for Documentary Credit (UCP).⁹⁸

⁹⁸ Ruddy Tri Santosa. 1994. *Pembiayaan Transaksi Luar Negeri*. Yogyakarta : Penerbit Andi Offset. Hal 3.

Adapun Sales Contract dan Letter of Credit merupakan dua perbuatan hukum yang berdiri sendiri, terpisah satu dengan lainnya.

Pihak-pihak yang berkepentingan dalam sales Contract adalah :

- Importir, dan
- Eksportir.

Sedangkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Letter of Credit adalah :

- Bank
- Eksportir dan
- Importir.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa dasar bagi pembukaan L/C yang digunakan oleh Bank adalah syarat-syarat L/C yang ditetapkan oleh importir berkaitan dengan Sales Contract. Syarat-syarat mana diuraikan dalam permohonan pembukaan L/C yang ditujukan pada bank pembuka, bank pembuka disini oleh Rosselyne. Nutabarat disebut dengan "Opening Bank" atau "Issuing Bank" Istilah opening bank dan issuing bank yang arti harfiahnya adalah bank pembuka dan penerbit L/C, pada hakikatnya diartikan sama, jadi dilakukan oleh satu bank yang sama walaupun ada sebenarnya kemungkinan bahwa yang membuka dan

menerbitkan L/C tersebut adalah dua buah bank yang berbeda-beda.⁹⁹

Sebelum membuka L/C untuk importir, bank haruslah mempertimbangkan dan menganalisa keadaan importir yang bersangkutan, dinilai dari segi kredibilitas dan bonafiditas/kemampuannya untuk memenuhi pembayaran. Hal ini penting oleh karena ada kemungkinan setelah bank membuka L/C dan menerima perjanjian bahwa importir akan menebus dokumen pada waktunya, maka importir tersebut tidak mempunyai dana yang cukup untuk melunasi seluruh atau sebagian/sisa pembayaran L/C atas barang-barang yang diimpor tersebut sesuai syarat-syarat L/C. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan atas permintaan nasabah/importir kepada bank untuk membuka L/C haruslah diperlakukan seakan importir tersebut meminta persekot pinjaman dan karena itu sejalan dengan permohonan kredit.¹⁰⁰

⁹⁹ Roselyne Hutabarat. Opcit. Hal 166.

¹⁰⁰ Kebanyakan importir-importir merupakan nasabah bank pemegang rekening giro dalam waktu yang relatif lama, dalam meminta fasilitas pembukaan L/C akan meminta sejumlah pembukaan L/C untuk jangka waktu yang lebih dari satu periode atau satu transaksi dan biasanya bank pembuka L/C akan menyediakan apa yang disebut "*a line of credit*" untuk keperluan ini dengan maksimum limit yang terstruktur. Roselyne Hutabarat. Opcit hal 174.

Penilaian bonafiditas nasabah pembuka L/C merupakan langkah yang paling penting dalam tahap ini. Karena suatu pengamanan yang paling ampuh dan juga menguntungkan bagi bank sebenarnya adalah adanya setoran jaminan dari nasabah. Namun dengan adanya persaingan yang ketat dewasa ini, bank jarang sekali mendapatkan nasabah yang mau menyetor 100%, bahkan banyak bank yang harus membuka L/C tanpa setoran Jaminan.¹⁰¹

Jadi pada dasarnya L/C dibuka oleh bank berdasarkan instruksi importir (applicant) (P.L/C) hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam article 2 UCP 1993.

"For the purpose of these articles, the expressions "Documentary Credit (s)" and "Standby Letter (s) of Credit" (here in after referred to as "Credit (s)" any arrangement, however named or described, whereby a bank (the "Issuing Bank") Acting at the request and on the instructions of a customer (the "Applicant") or on its own behalf,

- i. is to make a payment to or to the order of a three party ("the beneficiary"), or is to accept and pay bills of exchange (Draft (s) drawn by the Beneficiary.
Or
- ii. Authorises another bank to effect such payment, or to accept and pay such bills of exchange (Draft (s)),
Or,
- iii. Authorises another bank to negotiated, against stipulated document (s), provided that the term and conditions of the credit are complied wit.

For the purpose of these Articles, branches of a bank in different countries are considered another bank.

¹⁰¹ Sujito. 1996. **Peranan Bank Devisa Dalam Perdagangan Ekspor-Impor**. Santeks Vol. IV No. 1 Desember 1996. hal 43.

Dengan demikian suara garis besar dapat dikatakan bahwa :

1. L/C dibuka oleh bank atas perintah pembeli/importir/buyer/applicant for the credit.
2. Tanggung jawab pembukaan L/C terletak sepenuhnya pada importir.
3. Komitmen dari bank untuk :
 - (i) Melakukan pembayaran atas order pihak ketiga (beneficiary, atau untuk membayar atau mengaksep wesel/draft yang ditarik beneficiary,
 - (ii) Memberi kuasa kepada bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran tersebut, atau membayar, mengaksep atau menegosiasi transaksi Wesel (draft) atas dasar penyerahan dokumen-dokumen yang efisien, sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi (turn and conditions) yang disebut dalam L/C.

Sesuai ketentuan pasal 5 UCP 1993, L/C yang diterbitkan hendaknya ringkas namun lengkap dan tepat. Dalam hal ini nasabah/importir/applicant seringkali menggunakan L/C yang sangat rinci sesuai dengan sales contract yang telah ditandatanganinya bersama. Eksportir/beneficiary. Hal ini berakibat pada :

Pertama, tingginya biaya telex untuk pengiriman L/C.

Kedua, memperbesar kemungkinan salah ketik atau salah interpretasi sehingga mengharuskan dilakukannya amandemen, yang berarti ada tambahan biaya telex lagi.

Untuk mengatasi masalah ini, peran Customer Service dari Bank Devisa tersebut sangat penting guna memberikan penjelasan kepada importir/applicant tentang perlunya pembuatan L/C yang ringkas dan tepat. Selain itu ketrampilan karyawan bank dalam menyusun kalimat dalam L/C sangat diperlukan sehingga L/C yang kita kirimkan cukup singkat, namun lengkap dan tepat sehingga tidak menimbulkan dispute antara pihak-pihak yang terlibat dalam L/C tersebut).¹⁰²

Mengenai cara pengiriman pembukaan L/C, dapat dilakukan melalui beberapa cara : UCP 1993 dalam pasal 11.

Pertama, dengan surat (by email) pertimbangan penggunaan surat dalam pengiriman ini adalah faktor biaya yang lebih murah daripada menggunakan tele transmission. Disamping juga dengan pertimbangan bahwa pengadaan barang yang masih cukup lama waktunya.¹⁰³

¹⁰² Sujito. 1996. Ibid. hal. 44

¹⁰³ Periksa ketentuan pasal 11 ayat ii UCP 1993.

Kedua, dengan Brief advice pertimbangannya untuk mempercepat proses pemberitahuan kepada beneficiary/importir. Pemberitahuan pendahuluan ini mencakup hal-hal yang pokok saja dan kemudian diikuti konfirmasi persurat. Di klasula akhir dari Brief advice terdapat kalimat "full detail to follow".¹⁰⁴

Ketiga, melalui Teks-Transmision Pembuatan L/C dengan tele-transmision disini meliputi :

- Transmisi dengan kawat, telegram atau telex, dan
- Transmisi dengan jaringan komunikasi data misalnya SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)

Dengan demikian maka :

- Beneficiary langsung dapat menggunakan L/C tersebut;
- Bank yang ditunjuk dapat membayar, mengaksep atau menegosiasi atas dokumen yang telah disyaratkan.¹⁰⁵

Cara pengiriman pembukaan L/C mungkin bisa dipilih yang paling efisien sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya untuk impor barang yang tidak mendesak keperluannya, atau untuk negara tujuan yang dekat, bisa menggunakan Surat Tercatat. Sedangkan untuk barang

¹⁰⁴ Periksa kembali ketentuan pasal 11a ayat ii UCP 1993.

¹⁰⁵ Soepriyo Andibroto. Opcit. hal 100-101.

yang dibutuhkan segera, ditujukan ke negara yang jauh atau jumlah transaksinya besar, cukup efisien bila L/C nya dikirim dengan telex. Kemungkinan lain dengan "Short Cable" yang diikuti dengan surat tercatat.¹⁰⁶

Jika menghadapi penerimaan L/C yang dibuka dengan surat, kemudian pihak bank yang membayar kemungkinan menaruh keragu-raguan untuk menetapkan kebenaran atau sahnyanya tanda tangan yang tercantum pada L/C tersebut. Maka untuk menghindari terjadinya kerugian yang diakibatkan adanya perubahan tersebut pihak bank penerima harus mengambil langkah-langkah tertentu antara lain :¹⁰⁷

1. Mencocokkan dengan teliti tanda tangan pejabat bank yang tercantum pada L/C dengan tanda tangan (list of authorized signatures) yang diterima dari bank yang bersangkutan.
2. Mencocokkan formulir L/C yang digunakan dengan contoh formulir yang ada.

Letter of Credit sebagai suatu bentuk jaminan pembayaran yang diberikan oleh Issuing Bank mempunyai berbagai macam bentuk dan jenis yang berciri tersendiri.

¹⁰⁶ Santeks Vol IV No. 1 Desember 1996 hal 44.

¹⁰⁷ Soepriyo Andibroto. Opcit. hal 149-150.

Adapun jenis dan bentuk L/C dapat dibedakan dari segi kepastiannya, bank penjamin, cara dan saat pembayaran, kemungkinan penggunaan dan lain-lain. Tetapi sebenarnya secara garis besar bentuk L/C hanya dibedakan menjadi dua jenis.¹⁰⁸

Oleh karena itu L/C, harus menyebutkan bentuknya, karena jika tidak menyebutkan bentuknya akan dianggap sebagai L/C yang irrevocable.

Article 6 UCP 1993 mengatur :

- a. A Credit may be either
 - i. Revocable, or
 - ii. Irrevocable
- b. The Credit, therover, should clearly Indicate whether it is revocable or irrevocable.
- c. In the absence of such indication the Credit shall lot demad to be irrevocable

Jika L/C tersebut Revocable, maka L/C tersebut dapat dibatalkan secara sepihak oleh Issuing Bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada beneficiary/eksportir. Namun demikian Issuing Bank tetap terikat untuk membayar kembali kepada bank yang telah membayar, mengaksept, menegosiasi dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan dan kondisi L/C yang telah dilakukan sebelum diterimanya pemberitahuan pembatalan L/C tersebut.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Periksa UCP 1993 pasal 6.

¹⁰⁹ Lihat ketentuan pasal 8 UCP 1993.

Adapun pada Irrevocable L/C maka L/C tersebut tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari Advising Bank Confirming Bank maupun beneficiary/eksportir.

Irrevocable L/C merupakan jaminan yang pasti dari Issuing Bank atas penyerahan dokumen-dokumen yang sesuai dengan termyn conditions di dalam L/C yang bersangkutan.¹¹⁰

Oleh karena pelaksanaan pembayaran yang dilakukan bank pembayar adalah atas dasar kuasa yang diberikan kepadanya oleh Issuing bank, maka konsekuensinya bank pemberi kuasa harus mengganti pembayaran tersebut (reimburse) kepada bank penerima kuasa yang disebutkan dalam L/C.¹¹¹

Untuk itulah maka suatu L/C harus secara jelas menyatakan syarat pembayaran yang berlaku atas L/C tersebut, mengingat terdapat 4 (empat) cara penyelesaian pembayaran yang meliputi :

- a. Penyelesaian pembayaran dengan pembayaran tunai (sight payment)

¹¹⁰ Ruddy Tri Santosa. Opcit hal 81.

¹¹¹ Soepriyo Andhibroto. Opcit hal 215. Periksa juga pasal 10 UCP 1993.

- b. Penyelesaian pembayaran dengan pembayaran bertanggung (deferred payment).
- c. Penyelesaian pembayaran dengan akseptasi (acceptance).
- d. Penyelesaian pembayaran dengan negosiasi (negotiation).

Jika suatu L/C menyatakan pembayaran atas tunjuk (sight payment), maka Issuing/Opening Bank atau bank yang dikuasakan harus menjamin pembayaran atas dokumen-dokumen L/C, baik yang disertai wesel atau tidak, yang diambil alih dari penjual/eksportir/beneficiary untuk memenuhi syarat-syarat L/C.¹¹²

Jadi setelah bank melakukan pemeriksaan dokumen dan jika ternyata memenuhi semua syarat serta kondisi L/C, maka bank segera melakukan pembayaran kepada pihak beneficiary/eksportir dan kemudian mengirimkan dokumen-dokumen dan kemudian mengirimkan dokumen-dokumen tersebut kepada Issuing bank. Atas pembayaran yang telah dilakukan itu paying bank akan memperoleh Reinbursement (penggantian pembayaran) dari

¹¹² Ruddy Tri Santosa, Ibid hal 81.

issuing bank menurut cara yang telah disepakati sebelumnya.¹¹³

1.2. Campur Tangan Bank dan Lembaga/Instansi Terkait Terhadap L/C Dalam Perdagangan Ekspor – Impor.

Pembayaran dengan cara membuka L/C dalam transaksi ekspor-impor sebagaimana telah disebutkan di atas tersebut terjadi dengan pembayaran yang dilakukan oleh bank atas perintah dari pembeli (importir) untuk kepentingan penjual (eksportir).

Keterlibatan bank sebagai pihak ketiga tersebut terjadi sehubungan adanya instruksi pembeli (importir) dimana selanjutnya bagi penjual (eksportir) pembayaran baru diterimanya pada waktu yang ditentukan asalkan penjual (eksportir) menyerahkan dokumen yang sesuai dengan persyaratan dalam L/C tersebut.

Berpijak pada ketentuan yang diatas dalam pasal 4 UCP 1993 disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan L/C, maka yang bersangkutan akan berurusan dengan dokumen-dokumen dan tidak dengan barang-barang. Bank melakukan pemeriksaan semata-mata atas dasar dokumen-dokumen yang diajukan kepadanya dan

¹¹³ Soepriyo Andhibroto. Ibid hal 216.

meneliti apakah syarat-syarat L/C tersebut telah dipenuhi. Bank dalam hal ini tidak berwenang untuk memeriksa apakah barang-barang yang disampaikan betul-betul sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam L/C. Bank tidak dapat dinyatakan bertanggung jawab untuk perbedaan-perbedaan misalnya antara barang-barang yang diberi harga dengan barang-barang yang benar-benar dikirimkan. Selain itu bank juga tidak diharuskan melayani keluhan/keluhan tagihan-tagihan pembeli (importir).

Karena bank hanya berurusan dengan dokumen-dokumen, maka penting untuk diketahui atas dasar dokumen-dokumen manakah kredit itu dilaksanakan, Article 5b, UCP 1993 menyatakan :

"All instruction for the insurance of a Credit and the Credit itself and, where applicable, all instruction for an amendment there to and the amendment itself, must state precisely the document (s) against which payment, acceptance or negotiation is to be made"

Dari artikel tersebut, dapat diketahui bahwa sejak semula dari instruksi membuka kredit itu datang dari pembeli, sudah harus dicantumkan pada instruksi itu tentang dokumen-dokumen yang dikehendaki oleh pembeli dan atas dasar mana Bank berwenang melakukan pembayaran.

Dokumen-dokumen tersebut antara lain :
konosemen / Bill of Lading), dokumen faktur penjualan,
dokumen-dokumen lain.¹¹⁴

Bill of Lading adalah dokumen yang ditanda-tangani oleh kapten kapal, pemilik kapal, atau agennya, yang menjelaskan tentang barang yang dimuat di kapal dan syarat-syarat pengangkutannya. Bill of Lading juga merupakan tanda terima yang berlaku sebagai bukti adanya suatu kontrak, dan sebagai dokumen yang memberi hak atas barang.¹¹⁵

Konosemen atau Bill of Lading ini mempunyai kekuatan hukum, karena di dalam Kitab Undang-undang Hukum dagang pasal 506, yang berlaku di Indonesia disebutkan :

Konosemen adalah suatu dokumen yang bertanggal, dalam mana pengangkut menerangkan telah menerima barang tertentu untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan tertentu dan menyerahkan barang-barang dimaksud kepada orang tertentu, begitu pula menerangkan tentang syarat-syarat penyerahan barangnya.

¹¹⁴ Periksa Soepriyo Andhibroto. Rddy Tri Santosa, hal 25, Emmy Pangaribuan Simanjuntak hal 77, Hartono Hadisoeperto hal 67, Amir M.S hal 51.

¹¹⁵ Ruddy Tri Santosa. Ibid hal 27.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa konosemen atau Bill Of Lading berfungsi sebagai .¹¹⁶

1. Tanda terima (kuitansi) barang-barang.
2. Bukti pemilikan atas barang.
3. Bukti adanya perjanjian pengangkutan laut.

Sehubungan dengan konosemen sebagai dokumen atas barang-barang, maka di dalam hal membuka kredit (L/C) konosemen inipun mempunyai peranan yaitu bahwa konosemen merupakan salah satu dokumen yang harus diserahkan kepada Bank oleh pihak yang berhak atas pembayaran barang-barang.

Agar suatu konosemen dipandang sah, ia harus memenuhi beberapa persyaratan.

Oleh Herman A.L. Landasan Konosemen dikatakan berfungsi sebagai berikut :¹¹⁷

- a. Pelindung atas barang-barang yang diangkut dengan kapal yang bersangkutan.
- b. Sebagai tanda bukti milik atas barang.
- c. Surat tanda terima barang di atas kapal.
- d. Merupakan kuitansi pembayaran uang tambang.

¹¹⁶ Aryani Witasari. Ibid hal 40.

¹¹⁷ Tuti Triyani Gondhokusumo. 1986. **Pengangkutan Melalui Laut Jilid 2**. Semarang : Fak. Hukum UNTAG Semarang. hal 118.

- e. Sebagai tanda bukti lawan
- f. Sebagai kontrak atau persyaratan pengangkutan.
- g. Sebagai surat berharga yang dapat diperdagangkan.

Seperti :¹¹⁸

1. Ia harus dikeluarkan atau dibuat oleh seorang. Pengangkut dan ditanda tangani dan ditanggali.
2. Memuat pernyataan dari pengangkut bahwa ia telah menerima sejumlah barang.
3. Memuat pernyataan dari pengangkut bahwa ia akan mengangkut barang-barang yang diterimanya dan sesuai dengan syarat-syarat penyerahannya akan diserahkan di tempat tujuan.
4. Memuat syarat-syarat penyerahannya.

Sebuah L/C yang mensyaratkan suatu konosemen, harus menyebutkan dengan jelas bentuk konosemen tersebut. Penyebutan bentuk ini erat hubungannya dengan syarat-syarat peralihan konosemen.

Jika Konosemen / Bill of Lading diterbitkan sebagai:¹¹⁹

¹¹⁸ Emmy Pangaribuan Simanjuntak. Ibid hal 79.

¹¹⁹ Periksa Ruddy Tri Santosa. Ibid hal 29. Emmy Pangaribuan. Ibid hal 80.

- ATAS PEMBAWA/Atas Tunjuk.

Siapa saja yang membawa Bill of Lading berhak atas barang yang disebut dalam Bill of Lading. Barang dapat diterima dengan hanya menyerahkan Bill of Lading kepada perusahaan pelayaran yang bersangkutan atau gudang penimbunan barang di pelabuhan.

- ATAS NAMA

Hak atas barang hanya dapat diterima oleh orang atau perusahaan yang namanya disebut dalam Bill of Lading tersebut. Konosemen ini juga biasa disebut dengan Recta Konosemen, pengalihan hak atas konosemen ini dilakukan secara Cessie (KUH Perdata Pasal 613).

- ATAS NAMA ATAU KUASA (ORDER)/Atas Pengganti

Pengalihan hak atas konosemen ini hanya dapat dilakukan melalui endorsemen (KUHD pasal 508). Endorsemen tersebut dapat dilakukan beberapa kali.

Bila endorsemen dilakukan secara blanko (endorse in blanc) maka konosemen atas nama atau order ini menjadi konosemen atas pembawa.

Konosemen atas tunjuk jarang dipakai di dalam praktek mengingat konosemen bentuk ini risikonya besar

sekali, karena peralihan hak atas konosemen bentuk ini hanya terjadi dengan penyerahan dari tangan ke tangan saja, sehingga kemungkinan jatuh ke tangan orang lain yang tidak berhak adalah lebih besar.¹²⁰

Adapun untuk konosemen yang sering dipakai dalam praktek adalah konosemen atas pengganti dan atas nama. Peralihan hak atas konosemen atas pengganti hanya terjadi dengan adanya tanda tangan dari orang yang sungguh-sungguh berhak (endorsemen). Dengan demikian kemungkinan jatuh kepada orang yang tidak berhak adalah kecil.¹²¹

Demikian juga untuk konosemen atas nama, yang sering dipergunakan terutama bilamana Bank pembuka L/C menghendaki suatu jaminan bahwa Ia mempunyai kekuasaan atas barang-barang yang dibeli. Misalnya apabila L/C yang dibuka tersebut dibayar sebagian oleh Bank, karena dana dari pembeli belum cukup sehingga bank meminta supaya konosemen dari barang-barang itu dikeluarkan dalam bentuk atas namanya.¹²²

Pasal 506 KUHD menyebutkan bahwa konosemen adalah suatu dokumen yang bertanggal, jadi penanggalan

¹²⁰ C.S.T. Kansil. 1992. **Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia**. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 179. Amir M.S. Opcit hal 57.

¹²¹ C.S.T. Kansil. Ibid hal 58.

¹²² Emmy Pangaribuan Simanjuntak. Hal 81.

merupakan persyaratan pada konosemen. Demikian juga

Article 234 nomor ii UCP 1993. Menyatakan :

“Loading on board or shipment on a named vessel way be indicated by pre printed wording on the bill of lading that the good, have been louded on board named vessel or shipped on a named vessel, in which cast the date of issuance of the bill of loading will be clemed to be the date of lading on board, and the date of shipment.

Dari pasal tersebut menunjukkan bahwa tanggal dari konosemen dipandang menjadi tanggal pengiriman barang-barang. Oleh karena itulah bahwa penanggalan yang disebut dalam L/C pada umumnya dianggap sebagai tanggal terakhir barang-barang itu dikehendaki untuk dikirim harus diperhatikan dalam mengawasi tanggal dari konosemen yang sebaiknya tidak lebih mundur dari tanggal yang disebut dalam kredit.¹²³

Hal ini penting untuk mengetahui juga mengenai waktu penyerahan dokumen (presentation period) dalam waktu 21 hari, untuk kepentingan pembayaran dan akseptasi serta negoisasi maupun penutupan asuransinya yang efektif sejak tanggal pengapalan terakhir.¹²⁴

Alasan penolakan konosemen tersebut diatas adalah :

¹²³ Emmy Pangaribuan Simanjuntak. Ibid hal 81.

¹²⁴ Periksa pasal 47 UCP 1993.

- a. Perusahaan ekspedisi atau ekspediter menurut ketentuan pasal 86 ayat 1 KUHD merupakan suatu usaha yang hanya mencari pengangkutan untuk barang-barang bergerak bagi pihak pengirim. Baik mengenai pengangkutan di darat maupun di laut. Selanjutnya Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Penguasaan Angkutan Laut dalam pasal 1 mengatur bahwa : Ekspedisi Muatan Kapal Laut adalah :

“Usaha yang ditujukan kepada pengurusan dokumen-dokumen dan pekerjaan yang menyangkut penerimaan/penyerahan muatan yang diangkut melalui lautan untuk diserahkan kepada/diterima, dari perusahaan pelayaran untuk kepentingan pemilik barang”.

Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa Perusahaan Ekspedisi tidaklah mengeluarkan konosemen, tetapi hanya mengurus dokumen-dokumen. Oleh karena itulah maka dalam Uniform Custom ditetapkan bahwa Bank tidak boleh menerima konosemen yang dikeluarkan oleh Eksportir.

- b. Bank juga dilarang untuk menerima konosemen yang dikeluarkan dengan menunjuk pada ketentuan perjanjian Charter Kapal di dalam charter party.
- Dengan alasan bila Bank menerima konosemen yang berisi syarat-syarat yang tunduk pada Charter Party, maka

dia pun harus terikat pada syarat-syarat didalam charter party itu, padahal dia tidak mempunyai kepentingan di dalam charter itu. Yang penting bagi Bank ialah bahwa dokumen mengenai barang-barang yang sudah dibeli dan diangkut untuk diserahkan itu setelah melakukan pembayaran harus diteruskan kepada pembeli atau orang yang menyuruh membuka kredit.¹²⁵

- c. Penolakan atas konosemen yang barangnya diangkut dengan kapal layar karena pengangkutan yang demikian ini jelas lebih banyak resikonya dan biasanya dilakukan oleh perusahaan pelayaran yang relatif tidak begitu besar dan mungkin kurang bonafide.¹²⁶

Namun demikian penolakan-penolakan tersebut menjadi tidak berarti memihak para pihak sudah menguasai khusus atau mensyaratkan lain di dalam kredit (L/C).

Kemudian jumlah konosemen (pengisian konosemen) menganut ketentuan dalam Clausula yaitu jumlah konosemen resmi yang dapat diperdagangkan dengan ketentuan, jika satu daripadanya telah dipakai untuk mengambil barang yang lainnya tidak berlaku lagi, sesuai

¹²⁵ Emmy Pangaribuan Simanjuntak. Ibid hal 83.

¹²⁶ Soepriyo Andhibroto. Ibid hal 185.

dengan hukum "one for all and all for one". Hal ini untuk mencegah terhadap penggunaan lebih dari satu kali dari konosemen untuk barang yang sama.¹²⁷

Suatu dokumen yang berisi syarat-syarat perjanjian, biasanya ditanda tangani oleh para pihak yang mengadakannya, namun demikian di dalam konosemen tidak ada pihak yang menanda tangani, tapi ditetapkan, bahwa dengan menerima konosemen berarti mereka telah menyetujui semua syarat perjanjian yang tersebut di dalamnya. Di dalam praktek, konosemen ini akhirnya ditanda tangani oleh para pemegangnya, tetapi penandatanganan ini untuk pemindahan hak atau untuk penerimaan daripada barang-barang itu.

Dokumen lain yang perlu dikaji lebih lanjut adalah Wesel (draft). Wesel mempunyai fungsi yang penting pula di dalam L/C, karena pelaksanaan pembayaran kredit berdokumen (L/C) itu dapat dilakukan baik dengan mempergunakan wesel atau tanpa wesel. Oleh karena itu

¹²⁷ Tuti Triyanti Gondhokusumo. Ibid hal 123.

maka bagi pelaksanaan pembayaran L/C dengan wesel, wesel itu merupakan syarat mutlak adanya.¹²⁸

Dengan demikian pada kredit berdokumen (L/C) yang pembayarannya dengan mempergunakan wesel, disamping adanya dokumen-dokumen yang disyaratkan di dalam perjanjiannya seperti B/L, Invoice dan sebagainya juga harus di sertai dengan wesel yang diterbitkan oleh penjual/eksportir dan umumnya ditujukan kepada pembeli/ Importir.

Wesel adalah surat perintah pembayaran tertulis tanpa syarat kepada pihak tertentu untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebutkan dalam wesel tersebut.

Dalam transaksi ekspor, wesel ditanda-tangani oleh beneficiary sebagai sarana untuk menagih pembayaran kepada bank (buyer) di luar negeri. Wesel ini biasa disebut dengan Wesel Ekspor.

Dilihat dari sudut pembayarannya, maka wesel (draft) dibedakan antara :

- Sight Draft, bila draft yang diajukan segera dapat dibayar, dan

¹²⁸ Hartono Hadisoeparto. 1984. **Kredit Berdokumen**. hal 97.

- Usance Draft, bila pembayaran wesel dilakukan setelah tanggal jatuh tempo (30,90 atau 120 hari) setelah wesel ditunjukkan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wesel adalah:¹²⁹

- Nominal wesel yang tertulis dengan angka harus sama dengan yang tertulis dalam huruf.
- Bermeterai cukup.
- Tanggal pada meterai harus sama dengan tanggal penarikan.
- Wesel dapat berupa Sight Draft atau Usance Draft.
- Dapat dilakukan endorsemen karena merupakan surat atas order.
- Bila berupa Usance Draft maka perlu dilakukan akseptasi.
- Memuat data-data yang konsisten dengan dokumen pengapalan lainnya.
- Ditanda-tangani oleh maskapai asuransi dengan meteri secukupnya.

Bilamana sesuatu Bank Devisa telah menyanggupi membayar suatu L/C, maka Bank bersangkutan telah mengikat diri untuk mengakseptie (mempunyai – melakukan

¹²⁹ Ruddy Tri Santosa. Opcit hal 39.

pembayaran) atau mengakomodir (melunasi pembayaran) setiap wesel ditarik atas L/C tersebut asal saja memenuhi semua syarat yang disebut. Jadi dalam hal ini Eksportir untuk dapat menerima pembayaran, tinggal melakukan penarikan wesel atas L/C yang sudah tersedia dengan dilengkapi shipping document yang disyaratkan. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa wesel merupakan suatu dokumen yang vital pula disamping L/C dalam perdagangan luar negeri.

Dokumen selanjutnya adalah faktur penjualan (commercial invoice), dokumen ini lazim dipergunakan dalam transaksi perdagangan. Faktur penjualan (Commercial Invoice) adalah dokumen dari eksportir sebagai lampiran Bill of Lading yang berisi tentang catatan barang-barang yang dikirim beserta harga barang-barang ditempat eksportir. Selain itu faktur penjualan juga berisi catatan mengenai biaya angkutan-angkutan dari barang sesuai dengan syarat-syarat dalam perjanjian jual belinya.

Pasal 37 UCP 1993 mengatur perihal syarat dan ketentuan mengenai invoice. Oleh karena faktor perdagangan (commercial Invoice) itu sebenarnya adalah untuk kepentingan si pembeli maka Bank yang biasanya menerima faktur itu wajib meneliti beberapa persyaratan yang ada pada

faktur dan sesuai pula dengan yang disebut di dalam kredit. Syarat-syarat dari faktur yang ditentukan di dalam artikel anda ada tiga buah, yaitu :¹³⁰

1. Faktur perdagangan harus dibuat atas pembeli/importir, dan diterbitkan oleh beneficiary/Eksportir L/C dan tidak perlu ditanda tangani.
2. Jumlah harga tidak boleh melebihi daripada yang ditetapkan dalam kredit.
3. Memuat uraian barang-barang yang disebut dalam permohonan kredit.

Syarat NO.1 dan 2 dapat diperjanjikan lain adapun syarat No.3 harus sama persis tentang susunan kalimatnya.

Dokumen lain yang terkait dalam pembukaan L/C adalah dokumen asuransi (pertanggungan). Dokumen pertanggungan merupakan suatu dokumen yang membuktikan bahwa barang dikirim sudah diasuransikan. Dokumen ini penting sekali untuk diupayakan, sebab pengangkut tidak akan mengangkut barang yang belum diasuransikan, karena perjalanan melalui lautan terlalu banyak mengandung resiko.¹³¹

¹³⁰ Emmy Pangaribuan Simanjuntak. Opcit hal 94.

¹³¹ Aryani Witasari. Opcit hal 43.

Dalam pasal 34a UCP 1993 menyebutkan adanya syarat umum dan syarat khusus bagi dokumen pertanggungan.

a. Syarat Umum Dokumen Pertanggungan.

1. Bahwa dokumen pertanggungan harus dikeluarkan oleh perusahaan pertanggungan atau agennya atau underwritten sedangkan dokumen pertanggungan yang ditanda tangani makelar tidak dapat diterima.
2. Dokumen pertanggungan harus ditanda tangani oleh pihak tertentu.

b. Syarat Khusus :

1. Tanggal dokumen pertanggungan minimal sama dengan tanggal yang ada pada dokumen pengapalan, sehingga Bank dapat menolak dokumen pertanggungan yang lebih mundur dari dokumen pengapalan, tetapi dapat diperjanjikan lain.¹³²
2. Dokumen pertanggungan harus dibuat dalam valuta yang sama dengan kredit, ini juga dapat diperjanjikan lain.¹³³
3. Mengenal batas maksimal dan minimal dari jumlah yang dipertanggungkan yaitu terendah nilai CIF (Cost

¹³² Periksa Pasal 34 e UCP 1993

¹³³ Periksa Pasal 34 e UCP 1993

Insurance and Fright) dan CIP (Carriage and Insurance Paid) + 10%)¹³⁴. Ini penilaian CIF/CIP ditentukan dalam dokumen itu sendiri. Tanggung jawab biaya pertanggungan dengan CIF/CIP adalah menjadi tanggungan Penjual lain halnya dengan perjanjian FOB adalah tanggung jawab Pembeli.

4. Dalam perjanjian pembukaan L/C harus disertai dokumen yang dikehendaki oleh Pembeli, karena Bank hanya diwajibkan menerima dokumen pertanggungan yang sesuai perjanjian L/C.
5. Dalam dokumen pertanggungan menyebut jenis resiko yang dipertanggungkan.

Mengenai dokumen-dokumen lainnya selain yang sudah disebutkan pihak Bank diberi kebebasan untuk menerimanya dan tidak menimbulkan tanggung jawab, terdiri dari :¹³⁵

1. Surat Bukti Perdagangan
2. DO (Delivery Order).
3. Faktur Konsulat (Consulat Invoice).
4. Sertifikat Berat (Certificate of Weight)
5. Sertifikat Mutu (Certificate of Quality)

¹³⁴ Lihat ketentuan dalam pasal 34 f UCP 1993.

¹³⁵ Roselyne Hutabarat. Opcit hal 111-130.

6. Sertifikat Asli (Certificate of Origin)

Sekarang kita tengok kembali ke masalah campur tangan Bank dan Instansi terkait terhadap dokumen pembayaran perdagangan ekspor-impor. Bahwa pembayaran dengan membuka L/C mengandung suatu arti bahwa kredit (pembayaran) akan dilaksanakan setelah semua dokumen yang disyaratkan dalam perjanjian atau dalam pembukaan L/C diserahkan kepada Bank Devisa yang berwenang untuk menerima dokumen tersebut yang dimaksud dengan dokumen dalam hal ini adalah surat keterangan yang diperoleh eksportir setelah mengapalkan barang untuk dikirim kepada Importirnya di luar negeri dan surat-surat keterangan lain yang diperoleh dari instansi-instansi lain yang berwenang mengeluarkan surat keterangan, sebagaimana telah disebutkan dimuka. Dokumen-dokumen yang menyertai dalam pembukaan L/C ini sangat penting artinya, baik bagi pihak importir maupun pihak Bank selaku pemegang kuasa dari Importir yang harus melakukan pembayaran. Dan bagi pihak Eksportir (beneficiary) dokumen-dokumen itu juga mempunyai arti yang penting pula, karena Eksportir baru dapat menerima pembayaran dari advising Bank apabila telah menyerahkan

dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan barang yang diekspor.

Di dalam pelaksanaan pembayaran dengan membuka L/C semua dokumen yang disyaratkan harus diserahkan kepada Bank Devisa yang diberi kuasa untuk menerima dokumen serta diberi kuasa untuk melaksanakan pembayaran atas nilai yang tercantum di dalam Letter of Credit (L/C).

Setelah Bank memeriksa dokumen yang diterima dari Eksportir sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya, dan selanjutnya Bank menganggap bahwa dokumen-dokumen tersebut telah memenuhi persyaratan, maka Bank akan segera membayar Eksportir harga pembelian barang-barang sebesar nilai di dalam L/C yang dibuka untuk kepentingan tersebut.

Kewenangan yang dapat dilakukan Bank sehingga kemudian Bank dapat melakukan pembayaran kepada Eksportir harga pembelian barang-barang sebesar nilai di dalam L/C dapat kita kaji dalam pembahasan berikut ini.

Dalam pelaksanaan pembayaran dengan kredit berdokumen (L/C), pertama-tama yang sangat penting diperhatikan semua pihak yang berkepentingan (Bank-bank dan mereka yang berhak atas pembayaran) ialah bahwa

semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan bagi pembayaran itu harus dilengkapi. Bagi Bank, tidak hanya kelengkapan dari dokumen itu yang perlu diteliti melainkan juga bahwa dokumen-dokumen itu telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kredit (L/C) bersangkutan .

Pasal 13 UCP 1993 mengatur

"Bank must examine all document the stipulated in the Credit with reasonable care to ascertain wheter not they appear, on their face, to be in compliance with the termj and conditons of the Credit".

Dari kata-kata "whe the or not they appear on their face menimbulkan suatu pengertian bahwa pemeriksaan oleh Bank atas dokumen-dokumen itu adalah cukup sampai Bank tersebut dapat memastikan bahwa menurut penglihatan pada permukaan atau secara nyata dokumen-dokumen itu adalah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pembukaan L/C atau advis kredit (berita pembukaan L/C).

Menurut pendapat dari ICC Publication No.512 kata atau penyertaan "appear on their face" mengandung arti bahwa penentuan apakah dokumen-dokumen sesuai dengan persyaratan atau kondisi kredit dan telah sesuai satu sama lain hanya di dasarkan pada pemeriksaan dan dengan metode pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank bukan berdasarkan pendapat orang lain.

Jadi kewajiban Bank terutama adalah untuk memeriksa apakah dokumen-dokumen tersebut sudah memenuhi formalitas yang sesuai dengan syarat-syarat pembukaan kredit (LC/) tersebut. Adapun ketentuan ini berlaku baik bagi Bank pertama maupun Bank yang diberi kuasa.

Kembali pada ketentuan pasal 4 UCP 1993 diketahui bahwa pembukaan L/C adalah di dasarkan pada perikatan (perjanjian jual beli) yang telah ada terlebih dahulu. Jadi L/C dan perjanjian jual beli tidak dapat dilepas. Akan tetapi "Pelaksanaan dari pembukaan kredit itu tidak lagi berurusan dengan barang-barang melainkan hanya dengan dokumen-dokumen mengenai barang tersebut. Pelaksanaan pemeriksaan dokumen jual beli itu hanya terbatas pada syarat formal yang ditentukan dalam L/C, dan tidak bertanggung jawab memeriksa keadaan barang yang diperjanjikan. Jadi jika pemeriksaan telah dilakukan atas dasar syarat yang dikehendaki dalam pembukaan L/C maka Bank telah terikat untuk melakukan pembayaran.

Seperti sudah disebutkan di atas bahwa kewajiban Bank dalam memeriksa dokumen-dokumen tersebut sudah terbatas pada Bank pertama namun juga Bank yang diberi kuasa (Confirming Bank).

Confirming Bank dalam hal ini setelah melakukan pemeriksaan dan melakukan pembayaran, eksepsi atau membeli wesel kemudian mengirim dokumen kepada Bank pembuka.¹³⁶

Memeriksa dokumen adalah "hak" bank pembuka, sebaliknya "kewajibannya" adalah mengganti pembayaran yang telah dilakukan oleh Confirming Bank atas perintahnya itu.¹³⁷

Terhadap Dokumen yang tidak memenuhi persyaratan maka dalam hal ini Emmy Pangaribuan Simanjuntak membedakan tanggung jawab Bank terhadap dokumen yang tidak memenuhi persyaratan tersebut menjadi dua antara lain :¹³⁸

- a. Terhadap dokumen yang sudah memenuhi syarat formal (yang kelihatan).

Dalam hal demikian Issuing Bank hanya dapat mengajukan keberatan kepada Confirming Bank tentang persyaratan yang tampak dari luar saja (formal). Hal ini sesuai wewenang yang ada pada Confirming Bank bahwa dalam melakukan pemeriksaan disertai pada

¹³⁶ Lihat ketentuan pasal 14 a UCP 1993.

¹³⁷ Periksa pasal 14 a UCP 1993.

¹³⁸ Emmy Pangaribuan Simanjuntak. Op cit hal. 69-74.

pemeriksaan dokumen yang tampak dari luar saja (formal).¹³⁹

Selanjutnya pemeriksaan terhadap dokumen tersebut oleh Issuing Bank atau Confirming Bank tersebut dibatasi dalam tenggang waktu 7 hari.

Terhadap dokumen-dokumen yang tidak cocok dengan syarat dan kondisi kredit tersebut, maka Bank berhak menolak dan bahkan mengajukan tuntutan bahwa apa yang tercantum dalam dokumen-dokumen itu tidak sesuai dengan syarat dan kondisi kredit. Issuing Bank harus memberitahukan penolakan dokumen itu kepada Confirming Bank atau Beneficiary (Eksportir) dalam waktu yang cepat dengan alasan dari keberatan itu, baik dokumennya masih dipegangnya untuk pemeriksaan atau sudah dalam pengiriman¹⁴⁰. Dan sekali lagi penolakan dokumen yang tidak sesuai persyaratan ini, hanya terbatas pada syarat formal.

- b. Terhadap Dokumen yang tidak memenuhi syarat material.

Bahwa pada prinsipnya Confirming Bank tidak bertanggung jawab atas kebenaran apa yang ada dibalik

¹³⁹ Periksa pula pasal 14 b UCP 1993.

¹⁴⁰ Lihat ketentuan yang diatur dalam pasal 14 d UCP 1993.

dokumen : maksudnya adalah Bank tidak bertanggung jawab atas kekurangan pada bentuk dokumen, kelengkapan, kesempurnaan, keaslian, pemalsuan atau akibat lain dari dokumen itu. Bank juga tidak bertanggung jawab atas uraian dalam dokumen mengenai banyaknya, beratnya, mutunya, keadaannya, pengepakannya, penyerahan, nilai ataupun adanya barang-barang menurut adanya dokumen, demikian juga terhadap kesanggupan, kelalaian, kesanggupan membayar dari si pengirim barang (Perusahaan Pengangkutan). Hal ini merupakan konsekuensi logis bahwa pelaksanaan L/C adalah bersangkutan dengan dokumen dan bukan pada barangnya.

Dalam hal ini terjadi kesalahan teknis dalam pengiriman berita oleh Issuing Bank kepada Confirming Bank, maka Confirming Bank hanya menyampaikan dalam bentuk aslinya, sehingga tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan itu.

Bank baru dapat melakukan pembayaran kepada Beneficiary (eksportir), apabila dokumen-dokumen sesuai dengan yang disyaratkan pada kredit advis. Bank dapat menolak pembayaran apabila syarat-syarat/dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam kredit

advis tidak sesuai walaupun dokumen-dokumen itu sesuai dengan yang disyaratkan dalam perjanjian jual beli.

Dari bank devisa ternyata bahwa penyimpangan (discrepancy) adalah sebagai berikut :

1. L/C sudah lewat waktu.
2. Batas waktu pengapalan sudah terlampaui.
3. Dokumen sudah daluarsa.
4. Pemindahan pengapalan atau pengapalan sebagian dilaksanakan sedangkan L/C melarang.
5. Dokumen tidak lengkap.
6. Jumlah copy dokumen melebihi atau kurang dari yang dipersyaratkan oleh L/C.
7. Tanggal draft beberapa hari setelah tanggal negosiasi (tanggal yang tercantum dalam S.P).
8. Pengiriman barang dan harga barang berbeda dengan L/C sedangkan partial shipment tidak diperkenankan.
9. Dokumen tidak konsisten satu sama lainnya.
10. Perwakilan importir tidak menandatangani invoice, sedangkan L/C mensyaratkannya.
11. Nilai wesel berbeda dengan nilai yang tercantum dalam voice.

12. Jumlah uang pada draft dengan angka berbeda dengan huruf.
13. Invoice tidak ditanda tangani sedangkan L/C mensyaratkan signed commercial invoice.
14. Nama dan alamat importir atau eksportir dalam invoice atau dokumen lainnya berbeda dengan L/C..
15. Uraian atau berat barang pada invoice berbeda dengan L/C.
16. Pada invoice tidak tercantum syarat pengapalannya, misalnya FOB, C & F, CIF, dan lain-lain.
17. Marking, nomor L/C dan nomor contract pada dokumen berbeda dengan L/C.
18. B/L dan Polis Asuransi tidak diendorse sebagaimana mestinya.
19. Ukuran barang pada dokumen berbeda dengan L/C.
20. On deck shipment, sedangkan L/C mensyaratkan on board shipment.
21. Dalam B/L tidak tertera kata-kata "on board" atau kata tersebut diketik pada B/L tetapi tidak diendorse/ditanda tangani dan dibubuhi tanggal.
22. Pelabuhan tujuan berbeda dengan syarat-syarat L/C.
23. Pada B/L tidak tertera "freight to collect" atau "freight prepaid/paid, sedangkan L/C mensyaratkan hal tersebut.

24. Notify party tidak tercantum pada B/L atau berbeda dengan L/C.
25. Unclean B/L, yaitu pada B/L tercantum catatan-catatan seperti use, second hand bag dan seterusnya, sedangkan L/C mensyaratkan clean B/L.
26. Cover insurance tidak sesuai dengan syarat L/C
27. Under Insurance.
28. Mistyping, dan lain-lain.

Pada sisi berikutnya, Alasdair Watson¹⁴¹ mengemukakan bahwa penyimpangan-penyimpangan yang bersifat umum adalah :

- a. Credit Expired
- b. Late shipment
- c. Claused bills of lading.
- d. Presentation after permitted from date of issuance shipping document.
- e. Short shipment.
- f. Credit amount exceeded.
- g. Under insured.
- h. Description of goods an invoice differs from that of the credit.
- i. Marks and numbers differ between documents
- j. Goods shipped on deck.
- k. Bills of lading, insurance document or bill of exchange not endorsed correctly.
- l. Absence of documents of lower order presented than required by the credit.
- m. Insurance document of lower order presented than required by the credit.
- n. Weights differ between documents.
- o. Class of Bill of Lading not acceptable, eg : charter party, house bills.

¹⁴¹ Alasdair Watson. 1976. *The Finance of International Trade Notebook and Documents*. Hal 145.

- p. Insurance cover expressed in a currency other than that of the credit.
- q. Absence of signatures, where required, on documents presented.
- r. Bill of exchange drawn payable on the wrong party.
- s. Bill of exchange drawn payable on an indeterminable data.
- t. Insurance risks covered less than those specified in the credit.
- u. u. Absence of freight paid statement on bills of lading where the credit covers a *caf* or *CIF* shipment.
- v. No evidence of goods actually shipped on board.
- w. The amounts shown on the invoice and bill of exchange differ.
- x. Shipment made between parts other than those stated in the credit.
- y. Insurance dated later than the date on the document movement.
- z. Documents inconsistent with each other.

Kemudian Soepriyo Andhibroto¹⁴² mengelompokkan penyimpangan-penyimpangan yang bersumber dari dokumen yang belum sempurna dengan penyimpangan terhadap syarat-syarat L/C. Banyaknya kemungkinan penyimpangan (*discrepancy*), pihak bank harus dengan teliti dan seksama memeriksa dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam L/C.

Kemudian oleh Soepriyo Andhibroto¹⁴³ dikatakan bahwa, kewajiban bank untuk mengadakan pemeriksaan dokumen, hanya berdasarkan kredit *advis*. Apabila dokumen

¹⁴² Soepriyo Andhibroto. *Opcit* hal 230.

¹⁴³ Soepriyo Andhibroto. *Ibid* hal 227.

tidak cocok dengan kredit advis, maka bank berhak menolak pembayaran, walaupun dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan perjanjian jual beli.

A.G. Lubuliea¹⁴⁴ menegaskan lagi bahwa bank sama sekali tidak terikat dengan perjanjian jual beli, melainkan hanya terikat pada uraian yang tercantum dalam L/C.

Apabila bank menemukan adanya penyimpangan (discrepancy) dokumen L/C, maka bank tidak akan melakukan pembayaran kepada eksportir. Tetapi bank memberitahukan kepada beneficiary bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap dokumen yang disyaratkan dalam L/C. Pada prinsipnya berat atau ringannya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi akan menentukan untuk dapat dilengkapi, diperbaiki serta disesuaikan dengan syarat-syarat L/C.

Apabila dokumen masih mengandung discrepancy, bank koresponden dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meminta persetujuan issuing bank atas discrepancies tersebut dengan telex/kawat.
2. Negosiasi dilaksanakan atas dasar Letter of Indemnity.
3. Negosiasi under reserve (hasil ekspor diblokir).

¹⁴⁴ AG. Lubuliea. 1983. *Tata Cara Pemeriksaan/Handeling Dokumen Ekspor*. Hal 11.

4. Dokumen dikirim bersama-sama dengan wesel.

Menurut Alasdair Watson¹⁴⁵ ada beberapa alternatif dalam menyelesaikan penyimpangan-penyimpangan itu, yaitu :

- i. return to the beneficiary to amend the to amend the documents
- ii. take the beneficiary's indemnity and pay.
- iii. take the beneficiary's banker's indemnity and pay.
- iv. cable for authority to pay
- v. send documents for collection under the credit.
- vi. pay despite the discrepancy on specific knowledge of negligible risk based on practical experience-no security if judgement wrong.
- vii. return documents to beneficiary for sending through his own bankers.

2. Hubungan Hukum Para Pihak Yang Terkait Dalam Pembukaan Dokumen Pembayaran Perdagangan Ekspor-Impor (L/C) Di Indonesia

Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subyek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan/hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum.

¹⁴⁵ Alasdair Watson. 1976. *The Finance of Internasional Trade Notebook Documents*. hal 21.

Mengenai hubungan hukum ini, Logemaan berpendapat, bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/ berhak meminta prestasi yang disebut dengan "prestatie subject" dan pihak yang wajib melakukan prestasi yang disebut "plicht-subject".¹⁴⁶

Dalam transaksi ekspor-impor yang dilakukan antara Eksportir dan Importir dengan menggunakan L/C sebagai cara pembayarannya menimbulkan adanya hubungan hukum antara lain :

1. Hubungan hukum antara Eksportir dan Importir.
2. Hubungan hukum antara Bank dan Penjual/Ekportir.
3. Hubungan hukum antara Bank dan Pembeli/Importir.

Hubungan hukum yang terjadi di dalam penggunaan Letter Of Credit sebagai cara pembayaran dalam transaksi ekspor impor meliputi beberapa perjanjian yang saling berhubungan satu terhadap yang lain.

Karena setiap perjanjian secara hukum harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 1320 KUH Perdata. Demikian juga dengan perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh para pihak tersebut diatas harus dibuat atas dasar persyaratan dan ketentuan yang diatur pada Buku III KUH Perdata dalam pasal 1320 yang merupakan syarat utama untuk sahnya setiap

¹⁴⁶ R. Soeroso. 1993. **Pengantar Ilmu Hukum**. Jakarta : PT. Sinar Grafika. hal 270.

persetujuan, yang harus dipenuhi empat syarat sebagai berikut :¹⁴⁷

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Pada syarat pertama telah ditetapkan bahwa perjanjian baru dapat dikatakan sah apabila para pihak yang mengadakan perjanjian sepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.¹⁴⁸ Dengan demikian, berdasarkan pasal KUH Perdata, ditentukan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan secara kekhilafan, atau diperolehnya dengan penipuan.¹⁴⁹

Kekhilafan tersebut terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian. Adapun paksaan adalah paksaan rohani atau

¹⁴⁷ R. Subekti dan Tjitro Sudibio. 1986. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**. hal 305.

¹⁴⁸ C.S.T. Kansil. 1994. **Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia**. Jakarta : Sinar Grafika. hal 191.

¹⁴⁹ Arie S. Hutagalung. 1993. **Hukum Perjanjian Indonesia (Masalah-masalah Praktis Dalam Pembuatan Perjanjian Bisnis)**. Komponen Pelatihan Hukum Nopember – Desember 1993.

paksaan jiwa terhadap orang yang membuat perjanjian. Selanjutnya penipuan dapat terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk lawannya memberikan perizinannya.¹⁵⁰

Pada syarat kedua disebutkan bahwa para pihak yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum.¹⁵¹ Di dalam KUH Perdata yang disebut sebagai pihak-pihak yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :¹⁵²

- a. Orang-orang yang belum dewasa.
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan.

Pada syarat ketiga menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus jelas menyebutkan hal tertentu atau harus jelas menyebutnya apa yang menjadi obyek perjanjian. Jika yang menjadi obyek adalah barang, maka harus jelas apa jenisnya, jumlahnya, harganya, setidak-tidaknya dari keterangan obyek yang diperjanjikan harus dapat ditetapkan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing.¹⁵³

¹⁵⁰ Periksa pasal 1321, 1323, 1324 dan pasal 1328 KUH Perdata.

¹⁵¹ Periksa pasal 1329 KUH Perdata.

¹⁵² Periksa pasal 1331 KUH Perdata.

¹⁵³ C.S.T. Kansil. Ibid hal 143-144.

Pada syarat keempat disebutkan bahwa dengan suatu sebab yang halal, perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban dan kesusilaan.¹⁵⁴

Apabila dalam perjanjian tersebut syarat pertama dan kedua yang merupakan syarat subyektif tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya, perjanjian dapat dimintakan pembatalan, sedangkan apabila syarat ketiga dan keempat sebagai syarat obyektif tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya perjanjian tersebut batal dari hukum.¹⁵⁵

Kemudian berpijak pada ketentuan yang diatur oleh pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Dengan demikian, maka semua syarat perjanjian dan isi perjanjian yang sudah disepakati juga merupakan undang-undang bagi para pihak tersebut.

2.1. Hubungan Hukum Antara Eksportir dan Importir

Bahwa dasar pembukaan L/C yang dilakukan importir diawali adanya sales contract antara Eksportir dan

¹⁵⁴ Mariam Darus Baldruzaman. 1993. **Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak)**. Makalah Pada Lokakarya Hukum Kontrak. Kerjasama Elips Project FH UI – FH USU – Tanggal 16 Desember 1993. hal 25.

¹⁵⁵ C.S.T. Kansil. Ibid hal 191. R. Subekti. Ibid hal 20.

Importir. Hal ini dipertegas dalam ketentuan yang tertuang di dalam article 3 UCP 1993.

"Credit, by their nature, are separate transaction from the sales on other contract (s) on which they in may be based and bank are in no way concerned with use bound by such contract (s), even if any refferenc what soever to such contract (s) is included in the credit."

Dengan demikian dasar pembukaan L/C tersebut adalah jual beli antara Eksportir dan Importir yang tertuang dalam "Sales Contract".

Dalam pasal 1457 KUH Perdata disebutkan bahwa jual beli adalah perjanjian dengan maka pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan benda dan pihak pembeli untuk membayar harga yang telah disetujui. Rumusan ini mengandung empat (4) unsur pokok yaitu unsur subyek, obyek, perbuatan dan tujuan.¹⁵⁶

1. Unsur subyek terdiri dari penjual dan pembeli. Penjual dapat berupa pengusaha dan bukan pengusaha, sedangkan pembeli juga dapat berupa pengusaha dan bukan pengusaha.
2. Unsur obyek terdiri dari benda harga. Benda dapat berupa barang konsumsi untuk dipakai sendiri dan barang dagangan untuk diperjualbelikan, harga dapat

¹⁵⁶ Abdulkadir Muhammad. 1995. **Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia**. Bandung : PT Citra Aditya Bakti hal 216-217.

dibayar tunai dan dapat pula secara kredit, dapat dibayar dengan mata uang dan dapat pula dengan surat berharga.

3. Unsur perbuatan terdiri dari menjual dengan penyerahan barang dan membeli dengan pembayaran harga.
4. Unsur tujuan terdiri dari peralihan hak, memperoleh kenikmatan, memperoleh keuntungan atau laba yang telah diperhitungkan.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, jual beli kemudian dibedakan menjadi jual beli umum dan jual beli khusus. Jual beli umum lazim disebut "jual beli saja", dan jual beli khusus disebut "jual beli perdagangan".¹⁵⁷

Jual beli yang dilakukan oleh eksportir dan importir termasuk jual beli khusus. (jual beli perdagangan).

Jual beli perdagangan tersebut dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Jika dibuat secara tertulis perjanjian itu disebut kontrak jual beli (sales contract).

Ruddy Tri Santosa menyebut kontrak sebagai persetujuan yang bersifat mengikat menurut hukum yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, dimana disatu pihak memperoleh hak dan di lain pihak melakukan kewajiban. Dari sini dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan

¹⁵⁷ Abdulkadir Muhammad. Ibid hal 217.

sales contract atau Commercial Contract (Contract of sale to goods) dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu transaksi ekspor dan impor, yang telah terikat dalam suatu kesepakatan atau konsensus yang lazimnya dikenal dengan istilah Consensus Ad Idem dalam istilah hukumnya.¹⁵⁸

Terdapat berbagai pendapat dan ketentuan tentang jual beli, diantaranya :

Kemudian R. Subekti¹⁵⁹ memberikan pengertian jual beli :

"Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut".

John W. Hardwicke dan Robert W. Emerson¹⁶⁰ menyatakan :

"A sale of goods is transfer of title from a seller to buys for a consideration known as the price. One of the conner stone principles on common law is that a seller can transfer only the title (rights) that he/she has. If the seller has no title (e.q., a thief) or has a defective title (e.q. subject to mortgage rights, or lien) he/she transfer merely tinese limited rights, even though the parties may call the transportation a sale.

Hartono Hardisoepipto¹⁶¹ menyebutkan

"Jual beli adalah merupakan perbuatan hukum antara pihak penjual disatu pihak dengan pihak pembeli di lain pihak mengenai sesuatu barang"

¹⁵⁸ Ruddy Tri Santosa. Opcit hal 2.

¹⁵⁹ R. Subekti. 1985. **Aneka Perjanjian**. Bandung : Penerbit Alumni. hal 1.

¹⁶⁰ John W. Hadwicke and Robert W. Emerson. 1987. **Business Law**. hal 189.

¹⁶¹ Hartono Hadisoepipto. Opcit hal 4.

Pasal 1457 KUH Perdata mengatur :

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan perjanjian itu pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Dari ketentuan / pendapat-pendapat tersebut dapat diketahui bahwa jual beli merupakan perbuatan hukum yang bersegi dua, karenanya jual beli itu merupakan suatu perjanjian.

Jual beli antara Eksportir dan Importir dalam transaksi perdagangan ekspor-impor juga merupakan perjanjian. Sebagai perjanjian maka secara mendasar harus dibuat atas dasar persyaratan dan ketentuan undang-undang sebagaimana diatas pada Bab III KUH Perdata, pasal 1320 yang merupakan syarat utama untuk sahnya setiap persetujuan sebagaimana telah disebutkan diatas.¹⁶²

Dengan disepakatinya semua syarat perjanjian dan isi perjanjian maka merupakan undang-undang bagi para pihak tersebut.¹⁶³

Isi perjanjian tersebut antara lain meliputi :

1. Jenis barang
2. Ukuran barang
3. Jumlah barang

¹⁶² Periksa kembali ketentuan pasal 1320 KUH Perdata.

¹⁶³ Periksa kembali ketentuan pasal 1338 KUH Perdata.

4. Harga barang
5. Pengapalan
6. Tanggal akhir pengapalan pelabuhan berangkat dan tujuan
7. Pelabuhan berangkat dan tujuan
8. Pembayaran dilakukan
9. Asuransi

Adapun istilah yang dipergunakan dalam menyebut perjanjian jual beli antara Eksportir dan Importir tersebut bisa bermacam-macam Purchase Order, Contract atau Perjanjian Jual Beli.

Keseluruhan istilah yang digunakan, apakah hal itu "Contract", "Purchase Contract" atau "Perjanjian Jual Beli", adalah merupakan suatu pengertian perjanjian jual beli dimana seseorang menyerahkan barang kepada orang lain dan orang yang menerima benda itu menyerahkan sejumlah uang sebagai pembayaran.

Selanjutnya segala ketentuan jual beli dalam KUH Perdata berlaku terhadap jual beli perdagangan, kecuali jika ditentukan lain secara khusus dalam kontrak jual beli, karena dalam jual beli perdagangan antar negara (ekspor-impor), yang menjadi pedoman adalah peraturan internasional mengenai cara pembayaran yang harus dilakukan oleh

pembeli melalui bank, yaitu : "Uniform Customs and Practice for Documentary Credit".

Adapun untuk mengetahui laporan janji pembeli untuk membuka kredit tersebut dilakukan untuk menjawabnya, maka pendapat dari Emmy Pengaribuan¹⁶⁴ berikut ini akan dapat dijadikan pijakan akan dasar dalam menjawabnya, yaitu Pertama, janji membuka kredit adalah pada saat perjanjian jual beli diadakan :

Pembeli menyuruh membuka kredit atas dasar suatu janji yang telah ditetapkan didalam perjanjian jual beli, pada saat perjanjian jual beli diadakan.

Dalam hal ini UCP 1993 secara jelas juga mengaturnya dalam ayat 3 UCP 1993.

"Credit, by their nature, are separate transactions fram the sales of other contracts on which they may be based, and banks are in no way concerned with or bound by such contract.

Dari kata-kata from the sales or other contracts on which they may be based, dapat disimpulkan bahwa pembukaan kredit itu dapat terjadi berdasarkan perjanjian jual beli atau perjanjian lainnya.

¹⁶⁴ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Op. cit. Hal. 18

FM Vertis¹⁶⁵ dalam hal ini juga mengemukakan hal yang sama bahwa pembukaan L/C antara pembeli dan penjual tidak dapat dipisahkan dari perjanjian dasar.

Kedua, janji membuka kredit adalah setelah saat perjanjian jual beli. Bahwa janji membuka kredit dapat juga ditentukan setelah waktu diadakannya jual beli itu. Hal ini dipertegas Putu Antara¹⁶⁶, bahwa setelah penjual dan pembeli menandatangani perjanjian jual beli yang mengandung/menetapkan kesepakatan bahwa cara pembayaran akan dilakukan dengan L/C, maka pembeli akan mengajukan permohonan/aplikasi kepada bank untuk membuka L/C.

Jadi Perjanjian jual beli (Sales Contract) yang menjadi dasar dari pembukaan kredit tersebut tetap merupakan suatu perjanjian jual beli di dalam pengertian sebenarnya, yaitu bahwa perjanjian jual beli itu telah ada segera setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan tentang barang dan harganya, meskipun benda itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.¹⁶⁷

Janji atau klausula yang dimaksudkan dalam perjanjian jual beli itu tidaklah membuat perjanjian jual beli itu

¹⁶⁵ FM Vertis, 1983, *Banker's Documentary Credit*, Lloyd's of London Press Ltd.

¹⁶⁶ Putu Antara, 1990, *Pelaksanaan Perjanjian Letter of Credit dalam Praktek Perbankan*, Lokakarya 4 hari tentang Internasional Business contract, hal. 19.

¹⁶⁷ Periksa Pasal 1458 KUH Perdata.

menjadi suatu perjanjian dengan syarat digantungkan (opschorten devoorwarder), melainkan hanya memastikan kembali apa yang menjadi kewajiban dari kedua belah pihak pada saatnya.

Hak penjual atas harga pembelian terhadap pembeli tidak berarti hapus, karena pembeli telah memerintahkan membuka kredit kepada bank untuk kepentingan penjual. Apabila bank sungguh-sungguh telah membayar harga pembelian itu kepada penjual, barulah kewajiban membayar dari pembeli dapat hapus atau selesai. Maka dari itu perbuatan memerintahkan untuk membuka kredit itu juga mengandung pengertian bahwa resiko tentang insolvabilitas dari bank yang disuruhnya/bank yang membuka kredit itu adalah tetap menjadi beban dari pembeli atau risiko dari pembeli.

Kemudian tentang jangka waktu pembukaan L/C dari hasil penelitian diketahui berkisar antara 1 minggu sampai dengan 2 (dua) bulan. Dalam hal ini baik Eksportir maupun importir memberikan penjelasan bahwa pembukaan L/C dapat dilakukan sesegera mungkin jika barang yang diinginkan dalam perjanjian jual beli tersebut telah tersedia. Namun demikian keterlambatan mungkin saja terjadi jika barang tidak ada atau masih disiapkan, tentu saja hal

demikian akan berakibat pembukaan L/C menjadi terlambat. Yang penting disini adalah bahwa dalam perjanjian jual beli sudah ditentukan cara pembayaran dilakukan dengan Letter of Credit.

2.2. Hubungan Hukum Antara Pembeli (Importir) Dengan Bank.

Dari pengertian L/C yang terdapat dalam UCP 1993, pasal 2 diketahui bahwa L/C adalah perjanjian diantara suatu bank (Issuing Bank) bertindak atas permintaan dan amanat seorang nasabah (Applicant) atau atas namanya sendiri untuk :

1. Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga (Beneficiary) atau ordernya (orang yang ditunjuk oleh pihak ketiga), atau mengaksep dan membayar wesel-wesel yang ditarik oleh Beneficiary, atau
2. Memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran, atau untuk mengaksep dan membayar wesel-wesel tersebut, atau.
3. Memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi, atas penyerahan dokumen-dokumen yang ditetapkan, asalkan sesuai dengan persyaratan dan kondisi dari kredit yang bersangkutan.

Perjanjian yang menjadi dasar dari hubungan antara importir/applicant dengan Opening Bank tersebut oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak dipandang sebagai pemberian kuasa dengan pemberian upah.

Dalam perjanjian pemberian kuasa, pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menyelenggarakan suatu urusan, dan penerima kuasa atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan urusan dengan mendapat upah, atau tanpa mendapat upah.

Dalam kaitannya dengan hubungan hukum antara Importir dengan Bank, maka Importir adalah pemberi kuasa, dan Bank (Opening/Issuing Bank) adalah penerima kuasa. Apa yang dikuasakan oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa nampak jelas pada kewajiban bank (Opening/Issuing) untuk melaksanakan apa yang tertuang dalam ketentuan pasal 2 UCP 1993 sebagaimana tersebut di atas.

Selanjutnya menurut Molengraaft hubungan hukum itu lebih tepat dipandang timbul dari suatu perjanjian yang mempunyai unsur-unsur campuran antara perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian melakukan beberapa pekerjaan.

EPT-PUSTAKA-INDO

Bukti atas apa yang dijelaskan Molengraaft tersebut tampak pada ketentuan yang diatur dalam Article 13a UCP 1993.

"Bank's must examine all document with reasonable care to ascertain that they appear on their face to be in accordance with the terms and conditions of the credit"

Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa Bank harus memeriksa semua dokumen yang disebutkan dalam kredit dengan seksama untuk memastikan apakah dokumen tersebut secara nyata sesuai atau tidak dengan persyaratan dan kondisi kredit.

Jadi memeriksa dokumen-dokumen dan menyerahkannya kembali pada pembeli oleh Bank dapat dipandang sebagai akibat dari hubungan hukum antara pembeli dan Bank yang timbul dari perjanjian melakukan beberapa pekerjaan.

Selanjutnya perjanjian melakukan pekerjaan menurut ketentuan yang diatur di dalam buku III bab VIIA KUH Perdata meliputi tiga jenis perjanjian, yaitu perjanjian pelayanan berkala, perjanjian perusahaan, dan perjanjian pemborongan pekerjaan.

Kalau dikatakan bahwa hubungan antara Importir dengan Bank timbul dari perjanjian melakukan beberapa

pekerjaan maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam buku III KUH Perdata tersebut, dapat dikatakan bahwa perjanjian melakukan pekerjaan yang dimaksud adalah perjanjian pelayanan berkala. Dalam perjanjian ini semua hal yang telah disepakati serta syarat-syarat yang diperjanjikan dan hal-hal yang menurut kebiasaan dalam perusahaan mengikat kedua belah pihak. Perjanjian ini menimbulkan hubungan hukum "koordinasi" artinya kedudukan hukum yang sama/sejajar antara pihak yang satu (pengusaha) dan pihak yang lain (pengelola perusahaan). Hubungan hukum pelayanan berkala bersifat "tidak tetap".

Demikian juga perjanjian pemberian kuasa, yang dimaksud disini merupakan perjanjian pemberian kuasa dengan mendapat upah, karena dalam perjanjian pemberian kuasa tidak selalu mendapatkan upah. Perjanjian ini juga menimbulkan hubungan hukum "koordinasi" artinya kedudukan hukum yang sama/sejajar antara pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Berdasarkan uraian/pendapat tersebut di atas maka nampak disini bahwa perjanjian yang menjadi dasar dari hubungan antara Importir dengan Bank adalah lebih tepat di pandang timbul dari suatu perjanjian yang mempunyai unsur-unsur campuran antara perjanjian pemberian kuasa dan

perjanjian melakukan pekerjaan sebagaimana dikemukakan oleh Molengraaft.

Kemudian di dalam kedua hubungan hukum tersebut tentu menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini Bank Pembuka/Opening Bank hanya dapat bertindak sebatas kuasa yang diberikan oleh Importir. Di dalam hubungan ini ditentukan bahwa Bank tidak boleh membayar kepada Penjual/Eksportir/Beneficiary setelah lewatnya waktu yang ditetapkan dalam perjanjian dengan ancaman hilangnya hak menagih dari Bank terhadap Importir bila hal itu dilanggar.

Kewajiban Bank adalah membayar kepada Eksportir melalui Bank koresponden sesuai yang diperintahkan Importir, dan kemudian Bank Pembuka/Opening Bank mempunyai hak untuk meminta penggantian dari apa yang telah dibayarnya kepada penjual/Eksportir/Beneficiary beserta upahnya

2.3. Hubungan Hukum antara Penjual (Eksportir) Dengan Bank.

Untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara Bank dengan Eksportir kita perlu melihat jenis L/C yang dibuka (Revocable atau Irrevocable) karena jenis L/C

ini akan menentukan bagaimana hubungan hukum antara Bank dengan Eksportir.

Adapun yang dimaksud L/C yang Revocable adalah L/C yang dapat ditarik kembali atau dapat diubah setiap saat oleh Issuing Bank tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Beneficiary/Eksportir.

UCP 1993 dalam article 8a mengatur sebagai berikut :

"A revocable credit may be amended or cancelled by the Issuing Bank at any moment and with at priur notice to the Beneficiary".

Selanjutnya L/C yang irrevocable adalah merupakan kebalikan dari revocable L/C, irrevocable L/C ini tidak dapat dibatalkan atau diubah sewaktu-waktu selama jangka waktu berlakunya L/C tanpa mendapat persetujuan dari semua pihak termasuk Beneficiary/Eksportir.

Dalam Revocable L/C, kedudukan Beneficiary/Eksportir dalam posisi yang lemah dan tidak menentu sebab L/C yang dibuka untuk kepentingannya dapat setiap waktu dibatalkan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu padanya. Importir yang tidak bertanggung jawab dapat merugikan Eksportir yang dengan itikad baik telah benar-benar mengirimkan barang sesuai dengan perjanjian jual beli.

Jadi pada L/C revocable bank tidak terikat dengan penjual (tidak ada hubungan hukum).

Terhadap penarikan kembali (pembatalan) tersebut Importir tidak dapat dikatakan wanprestasi, karena kemungkinan Importir akan melakukan pembayaran dengan cara lain.

Namun jika kemudian ternyata L/C tersebut terlanjur diteruskan pada Bank kedua (cabang), dan telah dilakukan pembayaran, maka pembayaran yang telah dilakukan Bank kedua (cabang) tersebut, adalah sah, sepanjang pemberitahuan tentang penarikan kembali (pembatalan) belum sampai padanya.

Kemudian terhadap irrevocable L/C, kedudukan daripada Eksportir (Beneficiary) lebih kuat dan terjamin. Karena Bank tidak mengikatkan diri dan tidak dapat ditarik kembali untuk membayar sejumlah uang yang disebut dalam perintah membuka kredit (L/C) terhadap penjual/eksportir dengan syarat yang ditentukan.

Kewajiban Bank antara lain adalah :

1. Membayar Tunai
2. Mengaksep wesel yang diterbitkan penjual/eksportir

Dalam hal Bank mengaksep wesel yang diterbitkan penjual, maka Bank disini menjadi tersangkut, dan

penjual/Eksportir pada hari gugur wesel tersebut akan memperoleh pembayaran dari Bank tersangkut tersebut.

Dalam membahas hubungan antara Bank dan Penjual/Eksportir dalam kaitannya dengan L/C irrevocable ini dikatakan bahwa keterikatan bank/kewajiban Bank timbul karena perbuatan Bank mengirim advis kepada Penjual/Eksportir.

3. L/C Sebagai Sarana Penunjang Kelancaran Perdagangan Ekspor-Import.

3.1. Manfaat L/C Dalam Perdagangan Ekspor-Import.

Mengingat pelaksanaan pembayaran dengan L/C tersebut dapatlah dikatakan bahwa pembayaran luar negeri dengan menggunakan L/C merupakan cara yang aman apabila ditinjau dari kedua belah pihak baik dari pihak eksportir maupun dari pihak importir akan memperoleh kepastian bahwa hak-hak mereka dalam transaksi akan dipenuhi apabila masing-masing dapat melengkapi semua persyaratan yang dikehendaki dalam L/C. Itulah sebabnya mengapa L/C banyak digunakan dalam pembayaran luar negeri. Disamping itu pembukaan L/C di dalam menunjang kelancaran kegiatan ekspor-impor mempunyai manfaat antara lain :

a. Memperlancar hubungan pembayaran luar negeri.

Masalah pembayaran perdagangan luar negeri dalam pelaksanaannya tidak semudah perdagangan dalam negeri. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan daripada pihak, faktor-faktor tertentu serta resiko-resiko yang menjadi penghambat. Hal ini dapat dihindari dengan melibatkan pihak Bank sebagai perantara dalam pelaksanaan pembayarannya, yaitu melalui L/C. Dengan Letter of Credit perbedaan kepentingan dari pihak dapat dijembatani, dan resiko yang menjadi penghambat dapat dihindari.

Dengan mekanisme tersebut yang hanya berkaitan dengan dokumen kepentingan para pihak dapat terpenuhi dengan baik. Jadi dengan penggunaan Letter of Credit, masalah pembayaran luar negeri yang semula merupakan masalah yang sulit untuk penyelesaiannya, akan tetapi dapat terlaksana dengan lebih praktis dan lancar.

b. Memberikan jaminan keamanan bagi importir maupun eksportir dalam pelaksanaan transaksi perdagangan luar negeri.

c. Menjamin Kelengkapan Dokumen Pengapalan

Dengan cara L/C dibutuhkan banyak dokumen dan dokumen ini merupakan syarat yang telah ditentukan sehingga dokumen disini mempunyai peranan yang sangat penting. Bank bersedia mencairkan L/C apabila eksportir telah memenuhi dokumen yang diminta.

Oleh J.T. Sianipar dikatakan bahwa :¹⁶⁸ Pembelian barang dengan cara L/C ini melindungi kepastian kedua belah pihak karena :

- a. Pembeli/Importir mendapat jaminan bahwa barang yang dikirim untuknya adalah sesuai dengan permintaannya, karena hanya setelah barang itu dikapalkan dan atas dasar dokumen yang disebutkanyalah harga barang tersebut akan dibayarkan oleh bank.
- b. Penjual/Eksportir mendapat jaminan bahwa segera setelah barangnya disediakan dan dikapalkan, maka pembayaran akan segera diperolehnya.

Sedangkan menurut Sardjono Brotodiningrat mengatakan:¹⁶⁹

Dengan semakin meluasnya jaringan perdagangan luar negeri yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara lain, telah menyebabkan penggunaan L/C semakin meluas/banyak sebagai salah satu cara memperoleh hasil

¹⁶⁸ J.T. Sianipar, 1982, Asuransi Pengangkutan Laut, hal. 40.

¹⁶⁹ Sardjono Brotodiningrat, Op.cit. hal 23-24.

ekspor yang lebih cepat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut :

- a. Karena kebaikan/keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan L/C jauh lebih banyak dari tanpa L/C. Ini dikaitkan dengan jaminan kecepatan dan keamanan pembayaran yang diperoleh eksportir sepanjang syarat-syarat L/C dipenuhi.
- b. Deregulasi-deregulasi dibidang perdagangan luar negeri mendorong para eksportir untuk memanfaatkan peluang yang diberikan pemerintah dengan cara lebih aktif untuk mencari pasaran ekspor.
- c. Tuntutan para importir yang ingin memanfaatkan kebaikan dari cara pembayaran dengan L/C.
- d. Bank-bank turut mendorong penggunaan L/C dengan cara memberikan jasa conselling kepada para pengusaha kecil.

3.2. Hambatan-Hambatan Penggunaan L/C Dalam Perdagangan Ekspor-Import

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam perdagangan ekspor-impor yang menggunakan L/C sebagai cara pembayaran, maka terdapat tiga pihak utama yakni pembeli/Importir, penjual/Eksportir dan Bank. Campur tangan

Bank disini sangat besar, khususnya yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang diterima berdasarkan suatu L/C.

Pada umumnya masalah-masalah yang merupakan hambatan dalam pembayaran ekspor-impor dengan menggunakan L/C antara lain adalah :

1. Hambatan yang berasal dari Pihak Bank yaitu :

- Bank terlambat mengirim dokumen.
- Bank salah dalam menterjemahkan dokumen.

Meskipun dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UCP banyak memberikan perlindungan terhadap pihak Bank tersebut, namun dalam praktek terjadi, ada sementara Bank yang terpaksa harus bertanggung jawab atas kealpaan dan kelalaiannya.

2. Hambatan yang berasal dari pihak Nasabah (Importir dan Eksportir).

a. Dokumen yang kurang sempurna, antara lain :

- Ketidaksesuaian isi dokumen dengan syarat L/C.
- Tidak lengkapnya pengisian tanggal, tanda tangan dan stempel pada dokumen.
- Kesalahan ketik.

Terhadap hambatan tersebut, maka Bank menempuh tindakan seperti :

- Menghutangi Eksportir/Beneficiary untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dokumen.
- Bank pembayar mengirim kepada Issuing Bank mengenai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan minta persetujuan Issuing Bank untuk membayar atau mengambil alih dokumen-dokumen tersebut.

b. Tidak lengkapnya syarat-syarat L/C.

- Penarikan melampaui nilai (over drawn)
- L/C telah jatuh tempo.
- Pengapalan barang telah melampaui tanggal pengapalan terakhir yang ditetapkan.
- Salah satu dokumen yang disyaratkan (L/C) tidak terpenuhi.

Untuk mengawasi hal tersebut maka Bank menempuh tindakan : mengambil alternatif lain sepanjang tindakan yang diambil tersebut tidak merugikan pihak bank.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Letter of Credit merupakan salah satu bentuk cara pembayaran dalam transaksi perdagangan ekspor-impor. Di dalam tahap perkembangannya, semula L/C didasarkan hanya saling percaya antara pembeli/importir dan penjual/eksportir. Penjual/eksportir hanya mendapat jaminan bahwa pembayaran akan dilakukan dengan jasa bank. Akhirnya keadaan itu berubah dari bentuk bahwa Pembeli/Importir membuka kredit untuk Penjual/Eksportir, menjadi bank yang membuka kredit atas instruksi Pembeli/Importir. Pengertian dalam bentuk seperti inilah yang sekarang dijumpai dalam pembukaan *letter of credit*. terhadap L/C tersebut ketentuan hukum yang mengaturnya terdapat dalam Uniform Customers and Practice for Documentary Credit yang telah mengalami beberapa revisi (perubahan-perubahan) yakni pada tahun 1951, 1962, 1973, 1983 dan terakhir pada tahun 1993. Dengan demikian sampai saat ini terhadap L/C ketentuan hukum yang mengatur dan berlaku adalah ketentuan yang terdapat dalam UCP khususnya UCP 1993.

Dengan demikian penulis mempunyai suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Campur tangan pihak ketiga terhadap dokumen pembayaran perdagangan ekspor-impor (L/C) di Indonesia terjadi mengingat bahwa dasar bagi pembukaan *letter of credit* adalah syarat-syarat

L/C yang ditetapkan oleh Importir berkaitan dengan sales contract yang disepakati oleh Eksportir. Importir di luar keterlihatan pihak ketiga.

Campur tangan pihak ketiga khususnya adalah bank hanya terhadap dokumen dan tidak dengan barang-barang maka sejak semula dari instruksi membuka L/C yang datang dari Pembeli/Importir sudah harus dicantumkan pada instruksi itu tentang dokumen-dokumen yang dikehendaki oleh Pembeli/Importir dan atas dasar mana Bank berwenang melakukan pembayaran. Pemeriksaan oleh bank atas dokumen-dokumen itu adalah cukup sampai bank tersebut dapat memastikan bahwa menurut penglihatan pada permulaan atau secara nyata dokumen-dokumen itu adalah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pembukaan L/C. Sedangkan penentuan apakah dokumen-dokumen sesuai dengan persyaratan atau kondisi kredit (L/C) dan telah sesuai satu sama lain hanya didasarkan pada pemeriksaan dan dengan metode pemeriksaan yang dilakukan oleh bank bukan berdasarkan pendapat orang lain. Sejauh ini ketentuan hukum yang mengatur dan berlaku terhadap hal ini adalah ketentuan-ketentuan dalam Uniform Customers and Practice for Commercial Documentary Credit (UCP) yang telah mengalami beberapa kali revisi terakhir ketentuan dalam UCP yang telah direvisi adalah sebagaimana terdapat dalam UCP 1993.

2. Hubungan Hukum Para Pihak yang Terkait Dalam Pembukaan Dokumen Pembayaran Perdagangan Ekspor Impor (L/C)

- Hubungan Hukum Antara Pembeli/Importir dan Penjual/Eksportir
Karena perjanjian pembukaan L/C didasarkan pada perjanjian jual beli yang telah dilakukan terlebih dahulu antara Penjual/Eksportir dan Pembeli/Importir. Maka hubungan hukum antara Pembeli/Importir dan Penjual/Eksportir merupakan hubungan hukum jual beli. Dengan demikian ketentuan tentang jual-beli sebagaimana tertuang dalam pasal 1457 s/d pasal 1532 KUH Perdata berlaku terhadapnya.
- Hubungan Hukum Antara Bank dan Pembeli/Importir
Bahwa perjanjian yang menjadi dasar dari hubungan antara Importir dengan Bank adalah lebih tepat dipandang perlu dari suatu perjanjian yang mempunyai unsur-unsur campuran antara perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian melakukan pekerjaan. Jadi hubungan hukum antara bank dan Pembeli/Importir merupakan hubungan hukum pemberian kuasa dengan pemberian upah dan melakukan pekerjaan.
- Hubungan Hukum Antara Penjual/Eksportir dengan Bank
Hubungan hukum antara Penjual/Eksportir dengan bank dengan syarat bergantung pada jenis L/C yang dibuka :

- Pada L/C yang revocable

Bank tidak terikat dengan Penjual/Eksportir mengingat pada L/C jenis ini dapat dibatalkan setiap waktu oleh bank tanpa persetujuan dari Penjual/Eksportir. Jadi kedudukan Penjual/Eksportir adalah lemah.

- Pada L/C yang irrevocable

Kedudukan Penjual/Eksportir lebih kuat dan terjamin karena bank telah mengikatkan diri dan tidak dapat membatalkannya sewaktu-waktu.

3. L/C sebagai Saranan Penunjang Kelancaran Perdagangan Ekspor - Impor

Memberikan manfaat yang besar bagi Pembeli/Importir dan Penjual/Eksportir karena L/C merupakan cara yang aman karena baik Importir maupun Eksportir akan memperoleh kepastian bahwa hak-hak mereka dalam transaksi akan dipenuhi apabila masing-masing dapat melengkapi semua persyaratan yang dikehendaki dalam L/C.

B. SARAN

1. Mengingat bahwa campur tangan pihak ketiga dalam hal ini Bank terhadap dokumen pembayaran perdagangan ekspor-impor di Indonesia tersebut hanya menyangkut dokumen-dokumen yang diajukan kepada Bank apakah sesuai dengan syarat dan kondisi L/C dan bukan pada barang-barangnya. Dengan demikian maka Bank

dinyatakan tidak bertanggung jawab terhadap perbedaan-perbedaan tersebut misalnya antara harga, jenis barang dengan barang-barang yang benar-benar dikirim.

Dan juga perlu adanya peraturan yang mengatur atas tanggung jawab pihak ketiga dalam hal ini Bank terhadap dokumen-dokumen yang diajukan.

2. Terhadap dokumen yang tidak memenuhi syarat formal artinya dokumen tersebut tidak sesuai dengan syarat dan kondisi L/C maka bank berhak menolak dan boleh mengajukan tuntutan bahwa apa yang tercantum dalam dokumen itu tidak sesuai dengan syarat dan kondisi L/C.
3. Agar hak-hak masing-masing pihak (Importir, Eksportir) terpenuhi maka masing-masing pihak wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam L/C.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Eddy, Jonathan. 1994. **Law And Practice Of Transnational Sales**. Makalah Pada Seminar Hukum Ekonomi. Kerjasama Fakultas Hukum Undip dengan Elips Project. Semarang 22 September 1994.
- Agoes Moerjono. 1993. **Melangkah Menuju Ekspor Suatu Petunjuk Praktis**. LPPI. Institut Bankir Indonesia.
- Ali R, Ridho. 1993. **Hukum Dagang**. Bandung : Alumni.
- AK. Zaelani Zein. 1993. **Letter of Credit**. Jakarta : International Operations Series.
- Amir. M.S. 1998. **Ekspor – Impor**. Jakarta : Ppm.
- , 1989. **Ketentuan Tata Niaga Ekspor dan Impor Sesudah Deregulasi**. Jakarta : Jaya Persada.
- , 1986. **Ekspor, Impor, Teori dan Penerapannya**. Jakarta : PT. Pustaka Binaan Presindo.
- , 1980. **Tehnik Perdagangan Luar Negeri**. Jakarta : Bharata Karya Aksara.
- , 1979. **Pedoman Dan Istilah Penting Perdagangan Internasional**. Jakarta : Bharata Karya.
- , 1978. **Seluk Beluk Gapura Niaga Dan Perdagangan Internasional**. Jakarta : Bharata Karya Aksara.
- Amudi Pasaribu. 1976. **Ekonometrika**. Medan : Borta Gorat.
- Anwar, Chairul. 1999. **Hukum Perdagangan Internasional**. Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Ari Indratuti. 1984. **Pola Kebijaksanaan Ekspor PP No. 16 Tahun 1970 Dengan Berlakunya Pola Kebijaksanaan PP No. 1 Tahun 1982 serta Pengaruhnya Terhadap Komoditi Ekspor Non Migas**. Masalah-masalah Hukum No. 6 Tahun 1984.
- Asikin, Zaenal. 1995. **Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia**. Jakarta : PT. Grafindo Persada.

- Asoka Burhan. 1996. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta : PT. Bhineka Cipta.
- Black, Henry Campbell. 1990. **Black's Law Dictionary**. St. Paul Mint : West Publinging Co.
- Brotodiningrat, Sardjono. 1990. **Perkembangan Letter Of Credit**. Makalah Pada Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Perdata/Dagang. Kerjasama Fakultas Hukum UGM – Konsorsium Ilmu Hukum. Yogyakarta, 12 – 13 Maret 1990.
- CTS. Kansil. 1996. **Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia**. Buku Kedua Perbankan dan Permodalan di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.
- , 1992. **Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia**. Buku Kesatu Hukum Dagang Menurut KUHD dan KUHPerdata. Jakarta : Sinar Grafika.
- , 1979. **Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia**. Jakarta : Aksara Baru.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Edisi Kedua : Jakarta : Balai Pustaka.
- Djumhana, Muhammad. 1993. **Hukum Perbankan Di Indonesia**. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Djojohadikusuma, Sumitro. 1976. **Kebijaksanaan Bidang Ekonomi Perdagangan**. Jakarta : Yayasan Penyuluh Perdagangan.
- E.P. Ellinger. 1970. **Documentary Letter Of Credit A Comparative Study**. Singapore ; University of Singapore.
- Fuady, Munir. 1996. **Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek**. Buku Kedua. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Gondokusumo, Tuti Triyanti. 1994. **Ekspor Fiktif Bagaimana Bisa Terjadi**. Masalah-masalah Hukum No, 8 Tahun XXXIV. 1994.
- , 1994. **Perdagangan Luar Negeri Indonesia Dalam Perkembangan Perekonomian Internasional**. Makalah Pada Seminar Hukum Ekonomi. Kerjasama Fakultas Hukum Undip dengan Elips Project. Semarang 22 September 1994.

- Hadi Suprpto, Hartono. 1984. **Kredit Berdokumen**. Yogyakarta : Liberty.
- Hartono Hadisoeparto. 1984. **Kredit Dan Dokumen**. Yogyakarta : Liberty.
- Hartono, Sri Redjeki. 1981. **Asuransi dan Hukum Asuransi**. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
- Hutauruk Alfred. 1983. **Sistem Dan Pelayanan Ekspor, Impor & Lalu Lintas Devisa Indonesia**. Jakarta : Erlangga.
- I.C.C. 1993. **Uniform Customs and Practice for Documentary Credit 1993 Revision**. Publication No. 500. Paris : ICC.
- I.C.C. Chamberce. 1993. **Uniform, Customs & Practice**. No. 500 Tahun 1993. Kodin Ind, khusus untuk kalangan terbatas.
- Irawan dan M. Suparmoko. 1979. **Ekonomi Pembangunan**. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi (BPFE) Universitas Gajahmada.
- J. Satrio. 1991. **Hukum Perjanjian**. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Juhaepati Marala. 1993. **Resiko Pembiayaan Transaksi Luar Negeri**. Jakarta. Kerjasama Bank Bumi Artha dengan Marala Consultant.
- Kindleberger Charles. 1973. **Ekonomi Internasional**. Saduran J. Bunardhi. Bandung : Aksara Baru.
- Komarudin. 1978. **Persoalan Pembangunan Ekonomi Indonesia**. Bandung : Alumni.
- Lumbanraja, Maringan. 1994. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ekportir-Importir Dalam Perdagangan Luar Negeri (International Sale Of Goods)**. Makalah Pada Seminar Hukum Ekonomi. Kerjasama Fakultas Hukum Undip dengan Elips Project. Semarang 22 September 1994.
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. **Mengenal Hukum**. Yogyakarta : Liberty.
- Noerdjono, Jamal Wiwoho. 1989. **Transaksi Perdagangan Luar Negeri Documentary Credit & Devisa**. Yogyakarta : Liberty.
- Mohammad Djumhana. 1993. **Hukum Perbankan di Indonesia**. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mubyarto. 1977. **Pengantar Ekonomi Pertanian**. Jakarta : LP3ES.

- Mubyarto dan Boediono. 1981. **Ekonomi Pancasila**. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Muchamad, Abdulkadir. 1998. **Hukum Pengangkutan Niaga**. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 1978. **Pokok-pokok Hukum Pertanggungan**. Bandung : Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. 1993. **Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga**. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana, 1996. **Rahasia Perbankan di Indonesia**. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Natzir, Muhammad. 1998. **Metode Penelitian**. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Newsletter No. 22/VI/September/1995.
- Pangaribuan Simanjuntak, Emmy. 1994. **Pembukaan Kredit Berdokumen**. Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM.
- Partadiredja Ace. 1981. **Pengantar Ekonomika**. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- , 1979. **Prospek Ekonomi dan Sosial Indonesia Dimasa Depan**. Direktorat Publikasi Departemen Penerangan RI.
- Purba Radika. 1976. **Pengetahuan Perdagangan Luar Negeri Indonesia**. Jakarta : Pustaka Dian.
- Radrulzaman. 1989. **Perjanjian Kredit Bank**. Bandung : Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. **Ilmu Hukum**. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Roselyne Hutabarat. 1991. **Transaksi Ekspor Impor**. Jakarta : Erlangga.
- R. Subekti. 1985. **Aneka Perjanjian**. Bandung : Alumni.
- , 1982. **Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kopalitan**. Jakarta : Pradnya Paramita.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibjo. 1980. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**. Jakarta : Pradnya Paramita.

- Saadduddin Ibrahim dan Pranoto Kartoatmodjo. 1984. **Ekspor Dengan Syarat Pembayaran L/C Berjangka**. Jakarta : Jaya Prasada.
- , 1982. **Ekspor Dengan Syarat Pembayaran Berjangka (Irrevocable Usace B/C)**. Jakarta : Jaya Prasada.
- Sagir Suharsono. 1982. **Ekonomi Indonesia Gagasan, Pemikiran & Polemik**. Bandung : Iqra.
- Salim, Emil. 1982. **Peranan Komoditi Perkebunan Sebagai Sumber Devisa Negara**. Departemen Penerangan RI.
- , 1976. **Masalah Pembangunan Ekonomi**. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- , 1976. **Perencanaan Pembangunan dan Penataan Pendapatan**. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Santoso, Ruddy Tri. 1994. **Pembiayaan Transaksi Luar Negeri**. Yogyakarta : Penerbit Andi Offset.
- Simatupang, Richard Burton. 1995. **Aspek Hukum Dalam Bisnis**. Jakarta : PT. Bhineka Cipta.
- Siswoputranto. P.S. 1976. **Komoditi Ekspor Indonesia**. Jakarta : PT. Gramedia.
- Soelistyo. 1981. **Ekonomi Internasional**. Yogyakarta : Liberty.
- Soemardi, Dedi. 1986. **Sumber-Sumber Hukum Positif**. Bandung : Alumni.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soepriyo Andhibroto. 1987. **Letter Of Credit Dalam Teori Dan Praktek**. Semarang : Dahare Prize.
- , 1981. **Ekonomi Indonesia Post Knop 15**. Bandung : Alumni.
- Soerjono Sukanto. 1984. **Pengantar Penelitian Hukum**. Universitas Indonesia.

